

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301 • 5730316
Fax +62 21 5733437



Laporan Kinerja 2021

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM





Laporan Kinerja 2021

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

Laporan Kinerja 2021

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2022

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Tlp: +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437
Email: evaluatorksdae@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id



Kata Pengantar

Kawasan konservasi bukan “kertas putih”. Pesan ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kawasan konservasi seluas 27,016 juta hektar yang tersebar di wilayah nusantara tidak lepas dari permasalahan dan tantangan yang memaksa harus dihadapi dalam pengelolaannya. Sebanyak 568 unit kawasan konservasi dikelola oleh 74 UPT dengan total pegawai sebanyak 9.462 orang.

Sebagai salah satu Direktorat Jenderal yang bertugas menjaga kawasan konservasi di negeri ini, Direktorat Jenderal KSDAE terus berupaya melakukan perbaikan pengelolaan kawasan konservasi. Pada tahun 2021 upaya kelola kawasan terus dilakukan sejalan dengan mandat rencana strategis Ditjen KSDAE 2020-2024. Penjabaran tahun kedua pelaksanaan renstra dimaksud terdiri dari dukungan manajemen, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan kualitas lingkungan hidup. Ketiga program tersebut memiliki tujuh sasaran yang diukur menggunakan satu indikator kinerja program untuk setiap sasaran.

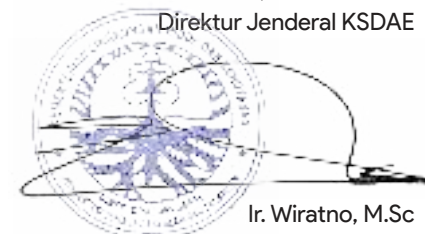


Sasaran program pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintah bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima dengan indikator kinerja berupa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,5 poin. Sasaran program kedua, meningkatnya ruang subyek dalam mengelola kawasan konservasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan konservasi baik dengan tujuan perlindungan habitat satwa liar dengan perlindungan keanekaragaman hayati dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 7.300.000 hektar. Sasaran program ketiga adalah meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL dengan indikator kinerja berupa jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL sebesar 2,05 Triliun rupiah. selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam program keempat ialah meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari dengan indikator berupa jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 70 miliar rupiah. Sasaran program kelima adalah meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan indikator kinerja berupa jumlah desa yang mendapat akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 595 Desa. Sasaran program selanjutnya adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dengan indikator

kinerja berupa nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta hektar kawasan konservasi sebesar 55 poin. terakhir, Sasaran program ke tujuh adalah terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 4.400.000 hektar.

Sulit membayangkan target kinerja Ditjen KSDAE dapat terwujud, kecuali atas keterlibatan berbagai pihak terutama masyarakat di sekitar kawasan. Para petugas lapangan menjadi bagian yang sangat penting sehingga proses pemangkuan kawasan berjalan cukup efektif dan optimal. sebagai bentuk pertanggungjawaban, capaian-capaian kinerja Ditjen KSDAE tersebut disusun dalam bentuk “Laporan Kinerja”. Pada akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kinerja dan pencapaian Direktorat Jenderal KSDAE selama kurun waktu 2021. Sebagai organisasi pembelajar, banyak hal baik yang menjadi pegangan untuk terus melangkah pada tahun-tahun selanjutnya. sebagian lainnya adalah pelajaran untuk disempurnakan sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2022
Direktur Jenderal KSDAE



Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003



“Setiap hari sejuta keajaiban dimulai saat matahari terbit” - Eric Jerome Dickey

Lokasi : BTN Bromo Tengger Semeru
Sumber : Data dan Informasi Setditjen KSDAE

Ringkasan Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK, telah ditetapkan 7 sasaran program dan indikator kinerjanya. Sasaran program pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintah bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima dengan indikator kinerja berupa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,5 poin. Sasaran program kedua adalah meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 7.300.000 hektar. Sasaran program ketiga adalah meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL dengan indikator kinerja berupa jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL sebesar 2,05 Triliun rupiah. Sasaran program keempat adalah meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari dengan indikator berupa jumlah nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar 70 milyar rupiah. Sasaran program kelima adalah meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan

konservasi dengan indikator kinerja berupa jumlah desa yang mendapat akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 595 Desa. Sasaran program keenam adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dengan indikator kinerja berupa nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta hektar kawasan konservasi sebesar 55 poin. Sasaran program yang terakhir adalah terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 4.400.000 hektar.

Pada tahun 2021, pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE sebagai pelaksana Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dihitung berdasarkan rerata capaian 7 indikator kinerja tahun 2021, capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 123,98%. Secara umum,

angka capaian kinerja program tersebut sangat baik dimana capaian 7 indikator kinerja program melebihi target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sasaran program pertama Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima diukur melalui indikator Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, pada tahun 2021 SAKIP Ditjen KSDAE telah memperoleh nilai 80,02 atau 101,94% dibandingkan target 78,5 poin. Sasaran program kedua Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati, diukur melalui indikator Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati, sampai dengan akhir tahun telah dilaksanakan pada kawasan seluas 10.655.955,99 ha atau 145,97 % dibandingkan target 7.300.000 ha. Sasaran program ketiga Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL, diukur melalui indikator Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran, dengan realisasi yang melebihi target yaitu sebesar 4,20 triliun rupiah atau 204,90% dibandingkan target 2,05 triliun rupiah, dikarenakan capaian kinerja sangat tinggi maka capaian kinerja menggunakan pembatasan maksimum sebesar 150%. Sasaran program keempat Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari, diukur dengan indikator Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL, yang pada tahun 2021 tercapai PNBPN sejumlah Rp 75,29 Miliar atau 107,55% dari target Rp 70 Miliar. Sasaran program kelima Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi, diukur dengan indikator Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif, sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebanyak 598 desa atau 100,50% dibandingkan target 595 desa. Sasaran program keenam Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi, diukur dengan indikator Nilai

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi, sampai dengan akhir tahun 2021 nilai efektivitas kawasan konservasi telah meningkat menjadi 61,56 poin atau 111,93% dibandingkan target 55 poin. Dan sasaran program terakhir Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi, diukur melalui indikator Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi, terealisasi pada kawasan seluas 8.932.059,60 ha atau 150% (203%) dibandingkan target 4.400.000 ha.

Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.644.126.169.000,-, dan sampai dengan akhir tahun 2021, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.509.394.213.550,- atau 91,81% (OMSPAN tanggal 12 Januari 2022). Capaian kinerja anggaran dinilai berdasarkan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA), nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai kinerja anggaran (NKA) yang merupakan hasil pembobotan nilai EKA dan IKPA. Nilai EKA Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 86,6, yang diperoleh dari 7 indikator yaitu capaian sasaran program 88,81%, penyerapan anggaran 91,81%, konsistensi penyerapan anggaran 88,88%, capaian output program 92,61%, efisiensi 4,62%, nilai efisiensi 61,55%, serta rata-rata nilai satuan kerja 86,33%. Nilai Direktorat Jenderal KSDAE ini termasuk dalam kategori Baik.

Nilai IKPA Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 89,18, yang diperoleh dari 13 indikator yaitu revisi DIPA (nilai 5 dari maksimal 5), deviasi halaman III DIPA (nilai 0,11 dari maksimal 5), pagu minus (nilai 5 dari maksimal 5), data kontrak (nilai 9,1 dari maksimal 10), pengelolaan UP dan TUP (nilai 7,6 dari maksimal 8) , laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara

(nilai 4,99 dari maksimal 5), Dispensasi SPM (nilai 4,25 dari maksimal 5), penyerapan anggaran (nilai 14,01 dari maksimal 15), penyelesaian tagihan (nilai 9,61 dari maksimal 10), capaian output (nilai 15,03 dari maksimal 17), retur SP2D (nilai 4,98 dari maksimal 5), Rencana penarikan kas (Renkas) (nilai 5 dari maksimal 5), serta kesalahan SPM (nilai 4,5 dari maksimal 5). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian berdasarkan aspek penyerapan anggaran, penyerapan anggaran dan pencapaian target-target kinerja serta pengelolaan perbendaharaannya. Perhitungan NKA ditentukan oleh nilai EKA dan IKPA dengan pembobotan 60% nilai EKA dan 40% IKPA. Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebesar 87,63.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal KSDAE dilakukan dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 123,98 % dengan realisasi anggaran sebesar 91,81%. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,74 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk kategori efisien. Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 berjalan secara efisien

Glosarium

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara	PK	: Perjanjian Kinerja
BBKSDA	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	PN	: Prioritas Nasional
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam	PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
BTN	: Balai Taman Nasional	PHUPJWA	: Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam
BPEE	: Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	PHUPSWA	: Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
CA	: Cagar Alam	PUPA	: Pungutan Usaha Pemanfaatan Air
CFR	: Cost and Freight	RM	: Rupiah Murni
CFW	: Cash For Work	RMP	: Rupiah Murni Pendamping
EKA	: Evaluasi Kinerja Anggaran	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
FOB	: Free on Board	SATS- DN	: Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
HLN	: Hibah Luar Negeri	SATS- LN	: Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri
HLLN	: Hibah Langsung Luar Negeri	SM	: Suaka Margasatwa
IKP	: Indikator Kinerja Program	Tahura	: Taman Hutan Raya
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	TB	: Taman Buru
IKU	: Indikator Kinerja Utama	TN	: Taman Nasional
IUPJWA	: Iuran Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam	TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
IUPSWA	: Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam	TWA	: Taman Wisata Alam
KK	: Kawasan Konservasi	UPT	: Unit Pelaksana Teknis
KKHSG	: Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KSA	: Kawasan Suaka Alam	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	SMART	: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja terpadu
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam		
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
METT	: Management Effectiveness Tracking Tools		
MOWA	: Masuk Objek Wisata Alam		
NKA	: Nilai Kinerja Anggaran		
OMSPAN	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara		
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa		
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang		

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Capaian Kinerja	vi
Glosarium	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
BAB IV PENUTUP	99
Lampiran	103

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE



BAB I

Pendahuluan

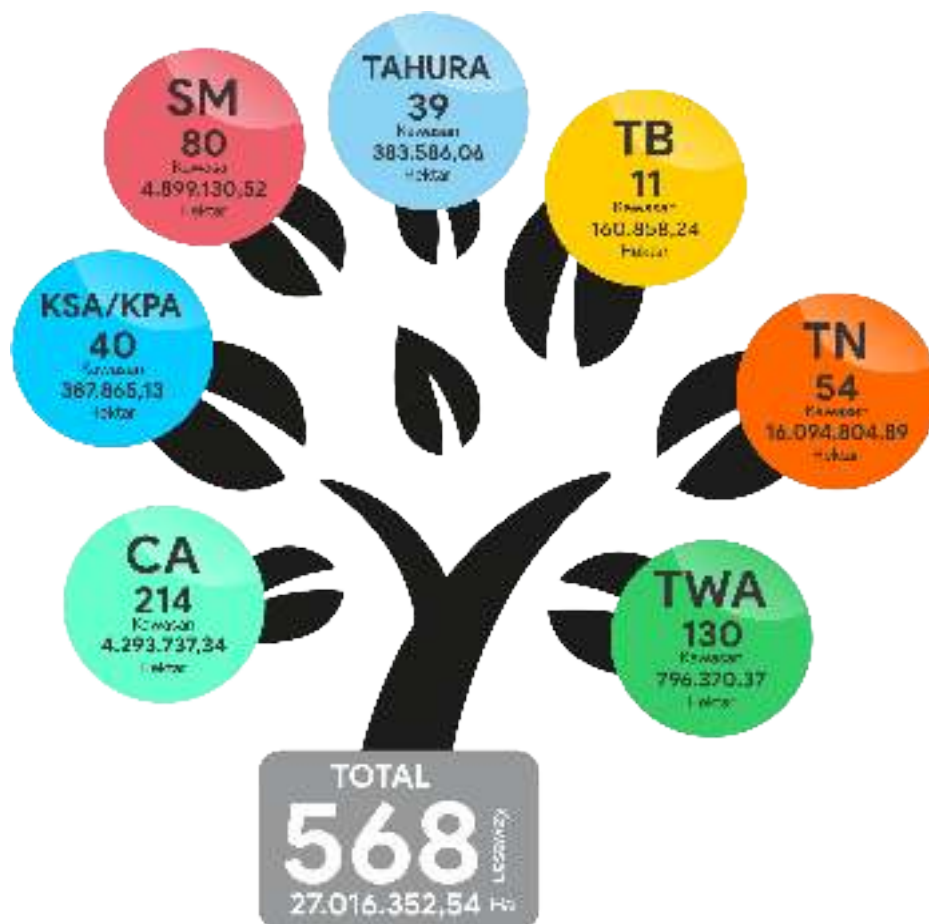
Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal KSDAE sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2021 yang merupakan ikhtisar capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Direktorat Jenderal KSDAE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki fungsi di bidang penyelenggaraan pengelolaan nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan

taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial. Penyelenggaraan fungsi tersebut dilakukan dalam bentuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki mandat dalam penyelenggaraan pengelolaan 568 unit kawasan konservasi dengan luas mencapai 27.016.352,540 hektar. Dibandingkan dengan data sebelumnya, jumlah unit kawasan ini mengalami peningkatan sebanyak 8 unit. Rincian jumlah dan luas kawasan konservasi berdasarkan arahan fungsinya disajikan pada tabel berikut.

Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021



Sumber: Direktorat Perencanaan KK, 2021

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, anggaran Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar Rp. 1.925.381.253.000. Alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa kali proses refocusing untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.644.126.169.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 sasaran program yang diemban Direktorat Jenderal KSDAE. Selain untuk pencapaian kinerja sasaran program, anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 2.234.526.000 dan program Prioritas Nasional (PN) sebesar Rp. 440.967.620.000.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE terdiri dari 6 unit kerja pusat dan 74 UPT. Unit kerja pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 Direktorat sedangkan UPT terdiri dari 16 Balai Besar (setingkat Eselon II) meliputi 8 UPT Balai Besar Taman Nasional, 8 UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta Balai (setingkat Eselon III), 18 UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 40 UPT Balai Taman Nasional. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit kerja pusat pada Direktorat Jenderal KSDAE. Struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

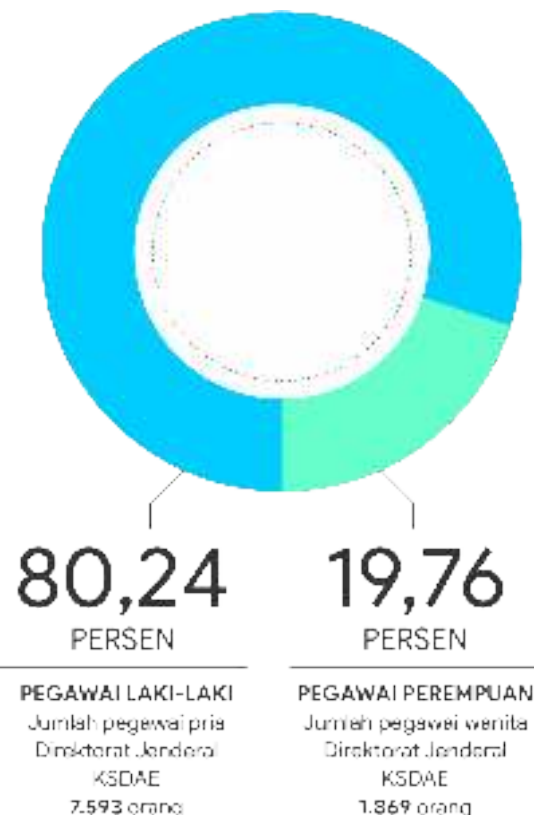


Direktorat Jenderal KSDAE memiliki sebanyak 9.462 pegawai yang terdiri dari 6.137 orang ASN dan 3.335 orang PPNPN yang tersebar di unit kerja pusat dan UPT. Jumlah pegawai pada unit kerja pusat sebanyak 441 pegawai yang terdiri dari 330 orang ASN dan 111 orang PPNPN sedangkan pada UPT sebanyak 9.021 pegawai yang terdiri 5.807 orang ASN dan 3.214 orang PPNPN.

Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	1
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	10
Pejabat Administrator (Eselon III)	125
Pejabat Pengawas (Eselon IV)	364
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	2.116
Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	1.169
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	363
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	7
Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	1
Jabatan Fungsional Perencana	5
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	20
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	15
Jabatan Fungsional Arsiparis	19
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	3
Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN	10
Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	30
Jabatan Fungsional Pranata APBN	10
Analisis Data	479
Pengolah/Pengelola Data	552
Verifikator Keuangan	21
Penata Usaha Umum	120
Jabatan Lainnya	697
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	3325

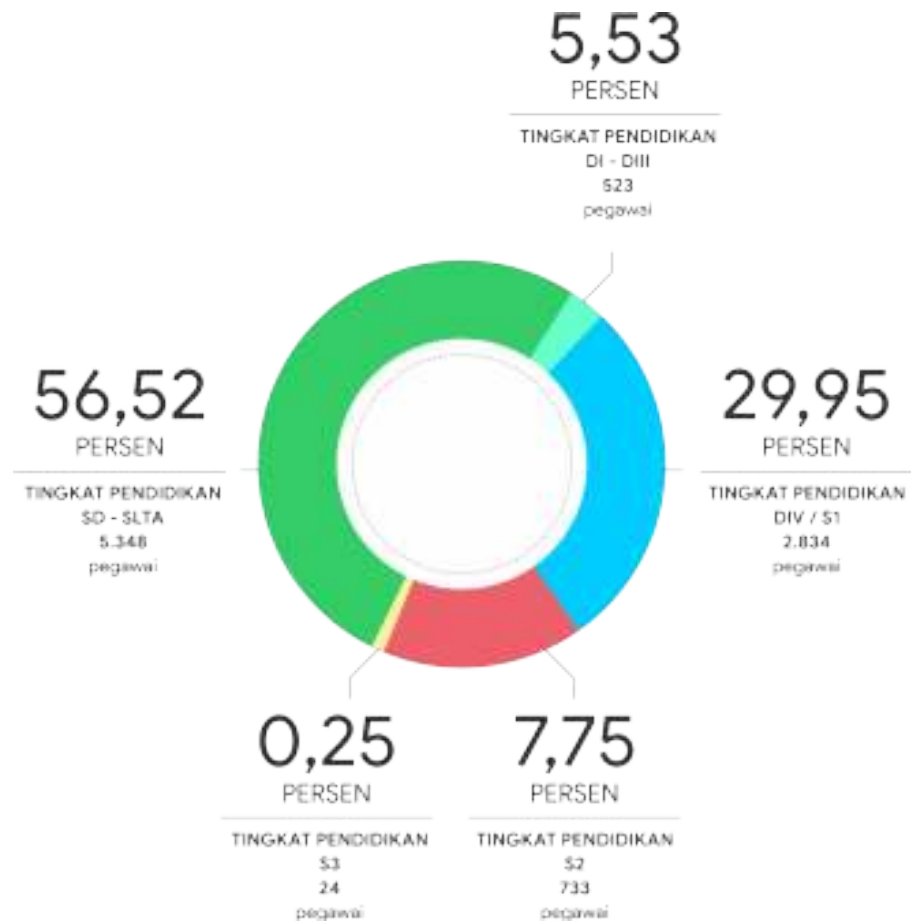
Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE
Berdasarkan Kelas Umur



Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE Tahun 2021, dengan tema kegiatan "Pemulihan Ekonomi Nasional berbasis Konservasi")

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Sasaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL;

3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada tahun 2020, terdapat perubahan program pada KLHK. Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan yang semula 1 program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjadi 3 program, yaitu [1] Dukungan Manajemen, [2] Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan [3] Kualitas Lingkungan Hidup.

TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
BERDASARKAN RENSTRA 2020-2024SASARAN
PROGRAMINDIKATOR
KINERJA
PROGRAMTARGET
KINERJAMeningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
bidang LHK yang akuntabel, responsif
dan berpelayanan prima

Nilai SAKIP Ditjen KSDAE

80
POINMeningkatnya Ruang Perlindungan
Keanekaragaman HayatiLuas Kawasan yang terverifikasi
sebagai Perlindungan
Keanekaragaman Hayati70.000.000
HEKTARMeningkatnya Nilai Ekspor
Pemanfaatan TSLJumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL
dari hasil penangkaran10,5 Triliun
RUPIAHMeningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan
Kawasan Konservasi dan
Pemanfaatan TSL secara lestariJumlah Nilai PNBP dari
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Kawasan Konservasi dan TSL1.100 Miliar
RUPIAHMeningkatnya Ruang Usaha
bagi Masyarakat di sekitar
Kawasan KonservasiJumlah Desa yang mendapatkan akses
pengelolaan Kawasan Konservasi dan
Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif4.500
DESAMeningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Hutan KonservasiNilai Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha
Kawasan Konservasi62,5
POINTerselenggaranya Inventarisasi dan
verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi
diluar Kawasan KonservasiLuas kawasan yang diinventarisasi
dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman
hayati tinggi secara partisipatif
di luar Kawasan Konservasi43 Juta
HEKTAR

B. RENCANA KERJA DITJEN KSDAE TAHUN 2021

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada periode tersebut. Sasaran Pembangunan bidang Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) sasaran program yang didukung dengan indikator kinerja program dengan target pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TARGET KINERJA BERDASARKAN RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE 2021

 SASARAN PROGRAM	 INDIKATOR KINERJA PROGRAM	 TARGET KINERJA
Meningkatnya Tata Kelola Formasi tishon bidang L-R yang ak, mabel, respon dan berpelawen prima	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	78,5 P.P. II
Meningkatnya Kuang Perindungan Keaneekaragaman Hayati	Luas Kawasan yang berwa Clasi sebagai Perindungan Keaneekaragaman Hayati	13,8 Juta Ha AK
Meningkatnya Nilai Ekspor Poma Yaatar TSL	Jumlah Nilai Ekspor Perumahan TSL dan Tpa angkuran	2,05 Triliun Rp. PPH
Meningkatnya Pengawasan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Perumahan TSL kawasan redrei	Jumlah Nilai PNEF dari Perumahan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	210 Miliar Rp. PPH
Meningkatnya Pimang Usaha Bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Dasa yang mendapat erbaikan pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perindungan Jasa Lingkungan Perumahan	500 JUSA
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Hutun Kawasan	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi	55 P.P. II
Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi keaneekaragaman hayati Unggi diluar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang di inventarisasi dan verifikasi dengan nilai keaneekaragaman hayati tinggi sebagai pert sigatif diluar Kawasan Konservasi	10 Juta Ha AK

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan penghematan dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid 19, terdapat penyesuaian target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE yang dituangkan dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dan Menteri LHK.

PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2021

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA AWAL		TARGET KINERJA REVISI
	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati		Luas Kawasan yang berstatus Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati		13,8 Juta HEKTAR		7,3 Juta HEKTAR
	Meningkatnya Nilai Ekonomi Berbasis Jasa dan Jasa Berbasis Jasa		Jumlah Nilai Ekonomi Berbasis Jasa dan Jasa Berbasis Jasa hasil perikanan		2,05 Triliun RUPIAH		2,05 Triliun RUPIAH
	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Komunitas Ekowisata		Jumlah Nilai TNBP dan Komunitas Ekowisata Kawasan Konservasi dan TSL		210 Miliar RUPIAH		70 Miliar RUPIAH
	Meningkatnya Ruang Kerja bagi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi		Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perikanan, Wisata Berbasis Produktif		500 DESA		595 DESA
	Meningkatnya Efektivitas Bangkai Hutan Konservasi		Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 (tujuh) Kawasan Konservasi		55 PERSEN		55 PERSEN
	Terselenggaranya Invenarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tingkat di luar Kawasan Konservasi		Luas kawasan yang diinventarisasi dan divalidasi tingkat nilai keanekaragaman hayati tingkat di luar Kawasan Konservasi		10 Juta HEKTAR		4,4 Juta HEKTAR
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berkelanjutan		Nilai SWKP Diarah KSDAE		78,5 PERSEN		78,5 PERSEN

Courtesy call President of the Council of States of the
Federal Assembly of the Swiss Confederation dengan
Delegasi KLHK yang dipimpin oleh Dirjen KSDAE

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Keberhasilan pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE ditopang oleh 7 Indikator Kinerja Program, sehingga capaian kinerja pelaksanaan program diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja program. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 dihitung berdasarkan capaian 7 indikator kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebesar 123,98 %. Capaian semua indikator kinerja program melebihi target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2021.



Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE
Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Hektar	7.300.000,00	10.655.955,99	145,97%
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2,05	4,20	150,00%
3	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	70,00	75,29	107,55%
4	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	595,00	598,00	100,50%
5	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi	Poin	55,00	61,56	111,93%
6	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Hektar	4.400.000,00	8.932.059,60	150,00%
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	Poin	78,50	80,02	101,94%
Rata-rata Capaian Kinerja						123,98%

a. Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja 2021



Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target Renstra 2020-2024



Inventarisasi dan verifikasi ruang-ruang perlindungan keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024 mengamanatkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan yang diduga memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) seluas 27 Juta hektare dan 43 Juta hektare.

Pada tahun 2021, telah ditetapkan luasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 7,3 juta hektar sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2021. Target tahun 2021 mencakup luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di dalam kawasan konservasi seluas dan luas kawasan 2,9 juta hektar dan di luar kawasan konservasi seluas 4,4 juta hektar. Tahun 2021 telah dilakukan verifikasi kawasan sebagai perlindungan hayati seluas **10.655.955,99** hektar, yang terdiri atas luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi seluas **1.723.896,39** Ha dan di luar kawasan konservasi seluas **8.932.059,60** ha. Capaian IKP tahun 2021. telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar **145,97%**, namun apabila dilihat dari target lokasi di dalam dan diluar kawasan konservasi maka capaian luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan

Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam

Kawasan Konservasi tahun 2021 sebesar **1.723.896,39** Ha dilakukan pada 38 UPT TN maupun KSDA, serta 4 pemerintah daerah sebagai unit pengelola Tahura yang terbagi atas 270 kawasan konservasi. Kawasan tersebut terdiri atas 16 TN (1.449.080,65 Ha), 120 CA (82.508,45 Ha), 42 SM (88.602,21 Ha), 6 TB (9.787,66 Ha), 71 TWA (72.476,75 Ha), 11 KSA/KPA (2.747,36 Ha) 4 Tahura (18.693,31 Ha). Secara total, hingga tahun 2021, dari 27,05 juta hektar target kawasan konservasi yang harus diinventarisasi baru tercapai 8,65 juta hektar atau 31,98%, sehingga masih ada sisa target sebanyak 18,39 juta hektar yang harus dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2024. Capaian tahun 2020-2021 seluas 8,65 juta hektar merupakan hasil olahan data potensi sebaran TSL dan potensi keanekaragaman hayati lainnya yang dimiliki oleh UPT baik dari hasil kegiatan inventarisasi oleh UPT, data kolektif mitra atau hasil penelitian, data SMART RBM/ Patrol dan sebagainya, yang dianalisis dengan menggunakan grid inventarisasi 1 × 1 km sebagai alat kontrol. Data tersebut berupa sebaran titik-titik koordinat perjumpaan atau temuan yang di-*overlay* dan diidentifikasi sebagai grid dengan data potensi yang jika dikonversi menjadi luas memiliki nilai 100 hektar setiap gridnya. Sebagian data lainnya sudah berupa data poligon dan grid dengan ukuran yang bermacam-macam. Kondisi ini memberikan catatan bahwa luas capaian 8,65 juta hektar belum memberikan gambaran nyata area yang sudah di-inventarisasi namun hanya memberikan luas area (grid) yang memiliki data potensi. Untuk mengetahui capaian real dari area kawasan konservasi yang sudah diinventarisasi masih memerlukan analisis lebih lanjut.

Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi pada tahun 2021 seluas **8.932.059,60** Ha, yang dilakukan 20 satuan kerja BBKSDA/BKSDA. Tahapan teknis yang

harus dilaksanakan dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB adalah penentuan areal kajian, pengumpulan dan pemilahan data, analisis data dan informasi serta pemberian skoring. Hasil capaian kawasan yang diinventarisasi seluas 8.932.059,60 Ha selanjutnya diverifikasi sehingga dihasilkan luasan dengan kategori kehati tinggi seluas 4.888.580,81 Ha, kehati sedang seluas 1.919.913,60 Ha dan kehati rendah seluas 2.123.565,15 Ha. Luas kawasan diinventarisasi dan verifikasi di luar kawasan konservasi pada tahun 2020-2021 telah mencapai 15,60 juta ha dari target selama 5 tahun sebanyak 43 juta ha, sehingga dalam 2 tahun IKP ini telah mencapai 36,28% dari total target selama 5 tahun.

Selain kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan konservasi, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi antara lain dilakukan dengan intervensi pengelolaan populasi dan habitat TSL melalui pembinaan habitat, pembinaan populasi, perlindungan kawasan, pencegahan dan penanganan konflik satwa liar, dan pelepasliaran satwa. Kegiatan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya juga dilakukan pada tahun 2021. Sejak bulan Januari hingga Desember 2021 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan pelepasliaran satwa liar ke habitat alaminya oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE bersama para pihak terkait. Sebanyak 52.359 individu satwa yang telah dilepasliarkan terdiri dari 207 jenis yang terbagi dalam kelas aves (39.810 individu dari 124 jenis), kelas reptil (11.401 individu dari 35 jenis), kelas mamalia dan primata (499 individu dari 44 jenis), kelas ikan/pisces sebanyak 274 individu Arwana, kelas arthropoda yaitu 338 individu Belangkas dan Kepiting Kenari, dan kelas Anthozoa 37 individu. Dalam kegiatan pelepasliaran tersebut, terdapat satwa yang berasal dari hasil penangkaran

komersial yaitu 94 individu Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) dari beberapa penangkar di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 29 ekor ikan Arwana yang berasal dari penangkar di Kalimantan Barat. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban penangkaran satwa dalam upaya mendukung kelestarian populasi satwa liar di habitat alaminya.

Selain kegiatan diatas, kegiatan penanganan opened area juga menjadi bagian dari salah satu upaya dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Penanganan opened area dilakukan berdasarkan baseline yang telah disempurnakan pada tahun 2020, yang membagi opened area dalam 2 kelompok besar yaitu OA terindikasi masih berkonflik seluas 866.634 Ha dan OA terindikasi sudah dapat dipulihkan seluas 970.468 Ha. Berdasarkan pembagian tersebut juga bahwa opened area ditangani melalui 2 skema besar, yaitu penanganan konflik tenurial, dan pemulihan ekosistem. Pada tahun 2021 telah dilakukan penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 558.976 ha. Penyelesaian konflik tenurial pada tahun 2021 diselesaikan melalui penanganan konflik tenurial seluas 76,921 Ha, pemulihan ekosistem seluas 31.055 ha, serta pemantauan dan pemutakhiran data spasial seluas 450.000 ha.

Patroli bersama masyarakat, Taman Nasional
Sebangau

Sumber : Hidayat Turrahman



b. Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran

Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja 2021



Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target Renstra 2020-2024



Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu penyumbang devisa dari sektor kehutanan. Dalam pemanfaatan TSL tersebut harus mempedomani peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sedangkan ketentuan perdagangan TSL diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL. Nilai ekspor pemanfaatan TSL merupakan nilai seluruh spesimen TSL yang diperdagangkan ke luar negeri yang ditentukan oleh permintaan Penghitungan nilai ekspor dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1. Rekapitulasi nilai Data Perdagangan (Data Penyerahan) dan Data Transaksi Ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi *Free on Board* (FOB) dan atau *Cost and Freight* (CFR).
2. Rekapitulasi nilai Data perdagangan pada Invoice yang dilaporkan oleh perusahaan (eksportir).
3. Rekapitulasi dari realisasi jumlah unit spesimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar internasional untuk jenis spesimen dimaksud. Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi ekspornya baik dalam bentuk rekapitulasi dokumen PEB maupun rekapitulasi *invoice*.

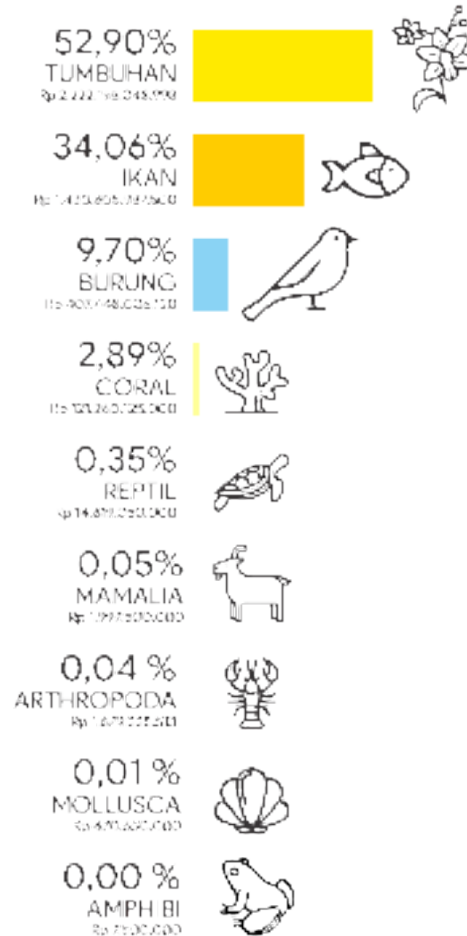
Nilai ekspor pemanfaatan TSL hasil penangkaran tahun 2021 sebesar Rp. 4.200.486.206.131,-. Nilai tersebut berasal dari 9 taksa hasil penangkaran TSL, dengan kontribusi terbesar (52,9%) adalah berasal dari perdagangan hasil tumbuhan (sonokeling, anggrek, gaharu) dan yang kedua yaitu berasal

dari ikan (Arwana formosus, ikan sapu zebra, Arwana jardini, dan Clarion Angel) dengan kontribusi sebesar 34,06%. Sejak IKP jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran dihitung realisasinya dari tahun 2020, Sonokeling menempati urutan pertama penghasil nilai ekspor tertinggi, pada tahun 2021 nilai ekspor yang dihasilkan dari sonokeling mencapai Rp. 2.198.297.295.000. Nilai pemanfaatan TSL hasil penangkaran yang berasal dari satwa, paling banyak dihasilkan oleh taksa ikan khususnya arwana, yaitu sebesar Rp. 793.335.000.000,-.

Apabila dibandingkan dengan nilai ekspor pemanfaatan TSL secara keseluruhan baik hasil penangkaran alam maupun penangkaran, nilai ekspor pemanfaatan TSL hasil penangkaran hanya 35,61% dari total nilai ekspor pemanfaatan TSL. Total nilai ekspor pemanfaatan TSL tahun 2021 sebesar Rp.11.795.822.273.144 yang berasal dari hasil tangkapan alam sebesar Rp. 7.595.336.067.013,- dan hasil penangkaran sebesar Rp. 4.200.486.206.131,-.

Sonokeling menjadi penyumbang nilai ekspor pemanfaatan TSL sejak tahun 2016, yaitu sejak Sonokeling masuk dalam appendix CITES (Appendix II) yang menyebabkan dalam regulasi ekspor Sonokeling harus sesuai dengan ketentuan CITES dan regulasi nasional dalam pengaturan ekspor TSL mewajibkan mekanisme perizinan. Penangkaran atau budidaya Sonokeling paling banyak berasal dari Perhutani, sedangkan yang lainnya berasal dari kebun rakyat secara teknis tidak benar-benar dibudidayakan namun merupakan hasil pemanenan dari tegakan yang telah ada sejak dahulu.

Nilai ekspor pemanfaatan TSL tahun 2021 berdasarkan Taksa Komoditas Perdagangan



Sumber: Direktorat KKH SG

Nilai ekspor pemanfaatan TSL hasil penangkaran selama 5 tahun mengalami fluktuasi, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebanyak 31,66% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 hal ini disebabkan oleh beberapa komoditi TSL ekspor yang tidak mewajibkan lagi penggunaan SATS-LN dalam pengiriman dan peredarannya, misalnya barang jadi berupa alat-alat musik dari kayu sonokeling, serta Ekspor karang hias (koral) belum dapat dilaksanakan karena masih terkendala penerbitan health certificate oleh Kementerian Pertanian RI. Nilai ekspor pemanfaatan TSL tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 14% apabila dibandingkan dengan nilai ekspor pemanfaatan TSL hasil penangkaran tahun sebelumnya. beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilai ekspor pada tahun 2021 yaitu:

1. Pada triwulan terakhir tahun 2021 terjadi pengalihan manajemen authority CITES dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenis ikan bersirip seperti ikan arwana, ikan sapu zebra dan ikan bersirip lainnya.
2. Ekspor sarang burung walet hasil budidaya/ penangkaran saat ini tidak memerlukan dokumen SATS-LN, namun cukup dokumen eksportir terdaftar dari Kementerian Perdagangan.
3. Tidak tercapainya transaksi ekspor (batal transaksi) karena kebijakan penanggulangan penyebaran Covid-19 pembatasan - pembatasan aktivitas di berbagai sektor. Transaksi yang tidak dapat tercapai ini merupakan transaksi ekspor yang telah terbit SATS-LN ekspornya. Meskipun terjadi batal transaksi ekspor, tetapi telah dilakukan pungutan terhadap seluruh kewajiban PNBPN dalam proses penerbitan SATS-LN (luran izin pungutan penangkapan/ pengambilan, pungutan perdagangan luar negeri dan pungutan blanko SATS DN dan SATS-LN, sehingga tetap menambah penerimaan negara melalui PNBPN.

Nilai ekspor pemanfaatan TSL hasil penangkaran selama 5 tahun mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2018 karena meningkatnya permintaan ekspor kayu sonokeling pada tahun 2018 sehingga menjadi penyumbang nilai ekspor terbesar pada tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan hasil nilai ekspor pemanfaatan TSL hasil penangkaran selama 5 tahun, tahun 2021 mencapai realisasi terendah, meskipun apabila

dibandingkan dengan target selama 1 tahun realisasi tersebut tetap melebihi target yang ditetapkan dalam PK Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021, serta dalam 2 tahun (2020-2021) realisasi nilai ekspor pemanfaatan TSL telah mencapai 86,51% (9,08 T) apabila dibandingkan dengan target selama 5 tahun periode renstra.

Nilai ekspor Pemanfaatan TSL Hasil Penangkaran 5 Tahun terakhir



Sumber: Direktorat KKH SG



Marasmius sp., jamur yang tumbuh pada kayu lapuk dan hidup pada suhu lembab. Secara ekologi jenis ini adalah saprotrof atau organisme pengurai, sehingga jenis ini memiliki peran yang penting dalam rantai makanan dalam sebuah ekosistem.

Sumber : Satria Giri

c. Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL

Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja 2021



Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target Renstra 2020-2024



Kawasan konservasi di Indonesia selain menyimpan potensi keanekaragaman hayati, akan tetapi juga menyimpan potensi keindahan alam yang dapat dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata alam. Kedua potensi tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang pemanfaatannya sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku dan tetap harus memperhatikan kelestariannya. Regulasi yang mengatur besaran PNBP pemanfaatan TSL dan pemanfaatan jasa lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau Luar Negeri.

PNBP yang dihasilkan pada tahun 2021 untuk pemanfaatan jasling dan TSL sebesar Rp. 75.286.049.253,-. Nilai PNBP tersebut diperoleh dari 2 sumber yaitu pemanfaatan jasling sebesar Rp. 44.394.783.498,- dan pemanfaatan TSL Rp. 30.891.265.755,-. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan diperoleh dari 5 jenis penerimaan, sedangkan PNBP TSL diperoleh dari 2 jenis pemanfaatan yaitu pemanfaatan TSL luar negeri dan pemanfaatan TSL dalam negeri.

Jenis PNBP pemanfaatan jasling yaitu Masuk Objek Wisata Alam (MOWA) Rp. 34.219.489.000 (77,08%), Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) Rp. 9.607.400.000 (21,64%), Pungutan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUSPWA) Rp. 132.731.145 (0,30%), Pungutan Usaha

Pemanfaatan Air (PUPA) Rp. 419.563.353 (0,95%), Iuran Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) Rp. 3.000.000 (0,01%), dan Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHUPJWA) Rp. 12.600.000 (0,03%). Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nilai PNBP tahun 2021 mengalami penurunan terutama dari pemanfaatan jasling, hal tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan dari wisata. Terjadinya lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK mengambil langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan menutup sejumlah kawasan konservasi. Seiring adanya penurunan kasus Covid-19 Direktorat Jenderal KSDAE melakukan pengelolaan pariwisata alam dengan reaktivasi sebagai mekanisme penanganan pengunjung/wisatawan. Sampai dengan saat ini reaktivasi obyek wisata alam sudah dilakukan pada 107 TN/TWA. Dalam reaktivasi obyek wisata alam, jumlah pengunjung hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kunjungan normal sebelum masa pandemi. Pemantauan reaktivasi yang dilakukan oleh Subdit PJLWA meliputi laporan harian kepada Menteri LHK tentang jumlah kunjungan wisatawan harian berdasarkan kuota, status pandemi Covid-19, buka tutup obyek wisata pada kawasan konservasi, kejadian yang bersifat insidental dan analisisnya. Jumlah PNBP yang Perbandingan PNBP pemanfaatan jasa lingkungan tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

PNBP pemanfaatan Jasling berdasarkan jenis penerimaan tahun 2020-2021

No	Jenis Pungutan	Nilai PNBP (Rp)	
		2020	2021
1	Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA)	45.639.124.044	34.219.489.000
2	Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IIUPSWA)	7.319.500.000	9.607.400.000
3	Pungutan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUSPWA)	662.537.097	132.731.145
3	Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA)	187.291.066	419.563.353
4	Iuran Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	-	3.000.000
5	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHUPJWA)	-	12.600.000
TOTAL PNBP Jasling		53.808.452.207	44.394.783.498

Sumber : Dit PJLKK, 2021

Berbeda dengan PNBP pemanfaatan jasling, PNBP pemanfaatan TSL mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PNBP pemanfaatan TSL tahun 2021 merupakan PNBP TSL terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan PNBP TSL disebabkan oleh peningkatan jumlah pemegang perizinan usaha pemanfaatan TSL (pedagang dalam negeri, pedagang luar negeri, dan penangkaran), sehingga terdapat kenaikan signifikan pada akun 425255. Selain iuran izin pemanfaatan TSL, kenaikan PNBP juga berasal dari kenaikan jumlah pungutan usaha pemanfaatan TSL. Baik dari alam

maupun penangkaran yang terdiri dari pungutan penangkaran yang terdiri dari pungutan penangkaran/ pengambilan spesimen TSL dari habitat alam, pungutan perdagangan spesimen TSL (hasil penangkaran dan hasil alam ke luar negeri, pungutan spesimen untuk penelitian, pungutan blanko SATS-DN dan blanko SATS-LN). Adapun jenis-jenis yang berkontribusi besar dalam capaian PNBP antara lain : sonokeling, jenis-jenis ikan (arwana formosus, sirip hiu dan arwana irian), jenis - jenis reptil (dalam bentuk kulit, pet, konsumsi), monyet ekor panjang dari habitat alam.

Nilai PNBP Pemanfaatan Jasling dan TSL selama 5 tahun terakhir



Sumber : Dit KKHS dan Dit PJLKK, 2021

Pemanfaatan TSL yang menghasilkan PNBP, tidak terlepas dari peran pelaku usaha pemegang izin penganal TSL baik dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah pemegang izin penganal TSL tahun 2021 sebesar 1.650 unit yang tersebar pada 26 UPT BBKSDA/ BKSDA seluruh Indonesia, dengan rincian pemegang izin penganal TSL dalam negeri sebanyak 980

unit dan pemegang izin penganal TSL luar negeri sebanyak 670 unit. BBKSDA Jawa Timur memiliki unit pemegang izin penganal TSL terbanyak yaitu 346 unit (20,97%), selanjutnya adalah BKSDA DKI Jakarta sebanyak 325 unit (19,70%) dan BKSDA Jawa Tengah sebanyak 188 unit (11,39%).

Jumlah pemegang izin pengedar TSL
berdasarkan komoditi

NO	KOMODITI	PENGEDAR TSL DALAM NEGERI (UNIT)	PENGEDAR TSL LUAR NEGERI (UNIT)	KETERANGAN
1	Amphibi	26	32	Pet dan paha katak
2	Arthropoda	30	28	Kepiting Kenari, Lipan, Serangga, Kumbang
3	Buaya	19	25	Kulit buaya <i>Crocodylus porosus</i> dan <i>Crocodylus novaeguineae</i>
4	Burung	97	63	Pet dari jenis paruh bengkok dan burung berkicau, dan sarang burung walet
5	Flora	20	35	Pasak bumi, Pakis, Ramin, Mahoni, Anggrek, Kaktus, Euphorbia, Minyak Tumbuhan, Agathis dammara, Pinus merkusii, Gaharu buaya, Akar laka
6	Gaharu	114	42	Gaharu dari jenis <i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops verstegii</i> , dan decaying logs
7	Ikan	139	92	<i>Arwana formosus</i> , <i>Arwana jardini</i> , Napoleon, Hiu, Pari, Clarion angel, Sapu zebra, Teripang, Kuda laut
8	karang Hias	57	57	Alam dan transplantasi
9	Mamalia	53	39	Rusa timor, Rusa totol, Monyet ekor panjang, Monyet hijau afrika, Bajing, kanguru (kulit), mammoth
10	Molusca	26	11	Lola merah, cangkang kima dari jenis <i>Tridacna gigas</i> , <i>Tridacna squamosa</i> , <i>Tridacna corcea</i> , <i>Tridacna maxima</i>
11	Reptil	149	117	Jenis-jenis reptil dalam bentuk Pet, kulit, dan konsumsi
12	Sonokeling	250	129	<i>Dalbergia latifolia</i> , <i>Bubinga sp</i>
JUMLAH		980	670	

Sumber : Dit KKHS, 2021

Beberapa kendala/hambatan capaian PNBP pemanfaatan TSL yaitu:

1. Pada tahun 2021 perizinan bidang TSL masih diterbitkan oleh Direktur Jenderal KSDAE secara offline, belum ada sistem yang terintegrasi secara otomatis antara Setditjen KSDAE selaku satker yg menangani penerbitan SK dengan Direktorat KKH selaku satker yang memungut PNBP iuran perizinan TSL sehingga data rekap SK yang telah terbit tidak secara otomatis sampai ke direktorat KKH untuk diterbitkan tagihan PNBPNya.
2. Rekap data masih dilakukan secara manual berdasarkan komunikasi via wa/telpon/koordinasi langsung. Hal ini menyebabkan data perijinan yang telah terbit SKnya tidak bisa terupdate secara realtime di Direktorat KKH dan juga UPT BBKSDA/BKSDA.
3. Terkait kategori PNBP pungutan spesimen TSL yang ditangkap/diambil/diperdagangkan yaitu adanya kuota stok gudang (lola merah, sirip hiu, teripang, akar laka, gaharu buaya) menjadi modus menghindar dari kewajiban PNBP penangkapan/pengambilan TSL karena spesimen sudah ada di gudang.
4. Pungutan PNBP pengambilan sarang burung walet dr habitat alam yg belum spesifik diatur dalam PP.12 tahun 2014 sehingga kemudian pungutan yang dikenakan hanya untuk iuran perijinan dan blanko dokumen angkut.
5. PNBP denda administrasi bidang TSL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinilai terlalu besar sehingga berpotensi menimbulkan piutang PNBP pada satker pemungut.

6. PNBP denda administrasi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, belum ada landasan formula yang jelas dalam hal denda dengan nilai patokan TSL dibawah Rp. 250 jt.

Tindak Lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian PNBP pemanfaatan TSL:

1. Penerbitan perijinan berusaha bidang TSL secara online melalui Online Single Submission (OSS).
2. Arahan Direktur KKHSG melalui surat nomor S.533/KKH/MJ/KSA.2/7/2021 tanggal 19 Juli 2021 bahwa stok gudang juga dikenakan pungutan PNBP pengambilan/ penangkapan dari alam kecuali bisa dibuktikan bahwa spesimen dimaksud hasil penangkaran atau telah dipenuhi kewajiban PNBP sblm jenis dimaksud masuk dalam ranah pengaturan bidang KSDAE.
3. Detail pungutan spesimen untuk sarang burung walet dimasukkan dalam substansi revisi PP.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
4. Telah disampaikan substansi Revisi pungutan denda pada PP.12 tahun 2014 yaitu menjadi 4 x PNBP terutang.
5. Direktur KKH telah berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal KLHK terkait formula besaran denda PNBP pada PP 8 tahun 1999.



Ular pucuk (*Ahaetulla prasina*) Di alam, ular merupakan satwa penjaga keseimbangan populasi kadal, cicak, dan jenis amfibi, sekaligus pakan bagi beberapa jenis raptor/ burung pemangsa

Sumber : Satria Giri

d. Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja 2021



Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target Renstra 2020-2024



Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk mendukung kelestarian kawasan. Hal tersebut sesuai dengan amanat PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar KSA dan KPA, pemerintah harus memberdayakan masyarakat tersebut. pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/ blok tradisional dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pendampingan merupakan kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat. Perubahan cara pandang, cara pikir yang terjadi di masyarakat binaan seringkali merupakan hasil dari pendampingan. Pendampingan tidak harus dalam bentuk formal tetapi juga dapat dilakukan dengan mengajak ngobrol masyarakat dengan kata kunci Dengan begitu, ketika kesepahaman sudah menyatu, kegiatan untuk memberdayakan mereka akan lebih mudah dilaksanakan.

Tahun 2021 akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat telah diberikan kepada **598** desa, yang terdiri atas 468 desa yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan dan 130 desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi. Dalam 2 tahun periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE, sebanyak 1.186 desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif dengan rincian sebanyak 989 desa telah dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan dan 197 desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam pelaksanaan kemitraan konservasi berpedoman pada Peraturan Dirjen KSDAE nomor P.6 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kemitraan konservasi terdiri dari kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem. Kegiatan kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat dilakukan pada zona/ blok tradisional dengan jenis pemberian akses meliputi pemungutan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK), budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi serta wisata alam terbatas. Sedangkan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilaksanakan pada zona atau blok rehabilitasi, mitra melakukan pemulihan ekosistem secara bertahap dan menjaga kawasan dari kebakaran hutan, perburuan, penyerobotan lahan dan penambangan.

Kemitraan konservasi tahun 2021 dilaksanakan pada 130 desa pada 31 UPT, yang terdiri atas 20 desa kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dan 110 desa kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat. Luasan akses kemitraan konservasi pada tahun 2021 mencapai 50.632,8 Ha yaitu 47.746,07 Ha (94%) merupakan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan 2.886,73 Ha kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.

Pemberian akses kemitraan konservasi 2016-2021

Tahun	Jumlah UPT	Kawasan Konservasi (unit KK)	Jumlah Desa (Desa)	Jumlah PKS (PKS)	Anggota Mitra (orang)	Luasan (Ha)
2016	2	2	11	6	227	474,45
2017	11	11	38	24	2.268	63.476,71
2018	13	13	37	47	1.847	11.036,64
2019	32	34	112	126	4.243	95.228,95
2020	27	28	65	79	2.304	63.396,62
2021	31	39	130	146	5.728	50.632,80

Sumber: Dit. Pengelolaan KK, 2021

Pemberian akses legal pemanfaatan kawasan kepada masyarakat setempat melalui kemitraan konservasi telah memberikan warna baru dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dengan adanya pemberian akses kemitraan konservasi tersebut pelibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi terfasilitasi karena keberadaan kelompok masyarakat dengan aktivitas di dalam kawasan konservasi menjadi legal dan dilibatkan dalam implementasi kerja konservasi oleh

pengelola kawasan konservasi. Melalui kemitraan konservasi, komunikasi antara pengelola kawasan dengan masyarakat sekitar dapat terjalin harmonis. Selain mendapatkan manfaat secara ekonomi, masyarakat yang terlibat dalam kemitraan konservasi juga harus bertanggung jawab untuk menjaga areal kemitraan konservasinya, dan menjaga kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman hayati di area kemitraan konservasi.

Kemitraan konservasi berdasarkan
jenis akses yang diberikan

Jenis Akses	Luas Kemitraan Konservasi (Ha)							
	2016	2017	2018	2018 - P.6	2019	2020	2021	Total
Budidaya			797			144,28		941,28
Budidaya, Perairan							221,15	221,15
HHBK	474	2.238	1.182	6.146	18.611,20	12.999,51	13.681,30	55.331,53
HHBK, Budidaya		25	1.106		1.042,30	56,00	2.530,17	4.759,74
HHBK, Budidaya, Perburuan						483,65		483,65
HHBK, Budidaya, Perburuan, Perairan						3.937,96		3.937,96
HHBK, Perairan					91,20		1.479,97	1.571,17
HHBK, Perburuan						300		300
HHBK, Wisata Alam		45.476						45.476,00
Perairan		10.926	1.806		75.484,25	45.475,22	29.833,48	163.525,29
Wisata Alam		4.812						4.811,67
Pemulihan Ekosistem							2.886,73	2.886,73
Total	474,45	63.476,71	4.890,81	6.145,83	95.228,95	63.396,62	50.632,80	284.246,17

Sumber: Dit Pengelolaan KK, 2021

Selain kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi, kegiatan pendampingan masyarakat untuk peningkatan usaha ekonom juga dilakukan pada desa yang berbatasan langsung dengan kawasan dan atau desa yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan konservasi namun masyarakatnya memiliki interaksi dengan kawasan tersebut. Verifier yang digunakan dalam pencapaian target tersebut berupa adanya kesepakatan konservasi antara pengelola kawasan dengan pemerintah desa. Beberapa hal yang termuat dalam kesepakatan konservasi ini antara lain:

1. Pengakuan pemerintah desa terhadap keberadaan kawasan konservasi
2. Dukungan pemerintah desa dalam upaya pelestarian kawasan konservasi
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi, utamanya dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif desa binaan

Kegiatan pendampingan kepada masyarakat sebagai bagian dari kesepakatan konservasi yang dilakukan UPT terhadap desa-desa sekitar kawasan konservasi antara lain: fasilitasi pembentukan kelompok, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi dan bantuan usaha, fasilitasi pendampingan kelompok (termasuk pendampingan pemasaran produk), peningkatan kapasitas kelompok, pemberian akses melalui kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem, pendampingan kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Tahun 2021 sebanyak 588 desa yang telah menandatangani kesepakatan konservasi yang tersebar pada 54 UPT baik TN maupun KSDA. Dengan bertambahnya capaian tersebut,

selama 2 tahun masa periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024, sebanyak 989 desa yang telah melakukan kesepakatan konservasi atau sebesar 98,9% dari total target, pada 575 kecamatan, 233 kabupaten, dan 33 provinsi di sekitar 276 kawasan konservasi. Faktor pendukung tercapainya target tersebut antara lain upaya pendampingan UPT yang intensif, dukungan pemerintah desa, serta peran mitra pengelola kawasan (LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, swasta, dan proyek-proyek kerja sama). Sebagian besar penandatanganan kesepakatan konservasi dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan ekonomi produktif pada kelompok-kelompok binaan di desa target.

Capaian pada IKP ini telah melebihi target yang telah ditentukan, akan tetapi secara umum pemenuhan capaian tersebut masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yaitu:

1. Adanya refocusing anggaran yang berpengaruh terhadap alokasi anggaran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di UPT target.
2. Perubahan pada personil pemerintahan desa, terutama pergantian kepala desa, di tengah proses kesepakatan konservasi. Materi kesepakatan belum dipahami oleh kepala desa pengganti sehingga dibutuhkan waktu untuk “memahamkan” kembali.
3. Masih adanya konflik agraria/ konflik tenurial pada lokasi target yang menyebabkan kepala desa belum bersedia untuk menandatangani kesepakatan konservasi.
4. Kondisi yang tidak kondusif pada lokasi target, sehingga belum dapat dilakukan penandatanganan kesepakatan konservasi.

5. Masih adanya perbedaan pemahaman, interpretasi dan implementasi regulasi maupun maupun kebijakan kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/ blok tradisional pada UPT.
6. Terbatasnya kapasitas SDM di UPT dalam melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan masyarakat dan inventarisasi terkait kondisi karakteristik sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kemitraan konservasi.
7. Kondisi akses ke zona/ blok tradisional pada umumnya sulit dijangkau dan hanya diakses oleh masyarakat setempat secara temporer.
8. Belum tercapai kesepakatan dengan masyarakat untuk solusi atas pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, karena keberadaan masyarakat sudah lebih dulu sebelum kawasan konservasi ditunjuk/ ditetapkan.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu:

1. Membangun tanggung jawab moral antara kedua belah pihak dalam rangka bersama-sama mendorong kelestarian kawasan konservasi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui payung koordinasi yang baik antara pengelola kawasan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat.
2. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terkait konservasi alam.
3. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh pengelola kawasan bersama mitra.

Pemberian penghargaan kepada pendamping dan kelompok binaan UPT berprestasi lingkup Ditjen KSDAE pada Hari Konservasi Alam Nasional 2021

Sumber : Muhammad Asad, Dit. PJLHK



e. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha kawasan Konservasi

Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja 2021



Kinerja pengelolaan dari setiap unit kawasan konservasi sudah seharusnya dapat diukur secara periodik. Proses penilaian efektivitas pengelolaan menjadi bagian penting evaluasi pengelolaan kawasan, yang penting, untuk melihat sejauh mana penggunaan sumber daya yang dimiliki, bagaimana peran dan dukungan para pihak terhadap pengelolaan, apakah kegiatan pengelolaan yang dilakukan berpengaruh terhadap nilai penting yang menjadi mandat kawasan, dan apakah pengelolaan tersebut memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2021 ini, metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah metode METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*) seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga hasil penilaian masih tahun ini masih bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi optimalnya dilakukan 2 tahun sekali, sehingga pelaksanaan rencana tindak lanjut dari hasil penilaian sudah dapat dijalankan dan dilihat hasilnya, bagi optimalisasi pengelolaan kawasan yang lebih baik. Kegiatan penilaian kawasan konservasi tahun 2021 ditargetkan pada 277 unit kawasan konservasi yang digunakan sebagai baseline (554 unit KK), tetapi jumlah kawasan konservasi sudah mengalami peningkatan menjadi 560 unit sebagaimana ditetapkan berdasarkan surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor: S.17/KK/PPKK1/KSA.1/1/2021 tanggal 26 Januari 2021, perihal Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2021. Pada tahun 2021, nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi mencapai 56,36 poin dari target yang ditetapkan adalah 55 poin sehingga capaiannya 111,93%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari 560 unit kawasan konservasi. Terdapat 10 unit kawasan konservasi yang tidak dinilai sampai dengan tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan kawasan konservasi baru yang belum

direncanakan penilaian efektivitas pengelolaannya sebanyak 7 unit dan 3 unit kawasan yang sejak tahun 2020 yang lalu tidak dinilai karena menunggu proses EKF atau kondisi dilapangan tidak memenuhi untuk dilakukan penilaian. Kawasan konservasi yang belum memiliki nilai efektivitas pengelolaan

Unit KK yang belum memiliki nilai efektivitas pengelolaan

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Fungsi	Keterangan
1	BBKSDA Jawa Barat	Malabar	CA	Tidak dinilai
2	BBKSDA NTT	Sisimeni Sanam	KSA/KPA	Tidak dinilai
3	BBKSDA Papua Barat	Hutan Pendidikan Tuan Wowi	KSA/KPA	Tidak dinilai
4	BBKSDA Papua Barat	Waigeo	SM	KK baru
5	BBKSDA Sulawesi Selatan	Sopeng	KSA/KPA	KK baru
6	BBKSDA Sulawesi Selatan	Toraja Utara	KSA/KPA	KK baru
7	BBKSDA Sulawesi Selatan	Calon Tahura Mesawa	KSA/KPA	KK baru
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kotabaru	Sebatung	TAHURA	KK baru
9	Dishutbun Kalbar	Pandan Puloh	TAHURA	KK baru
10	Pemda Kab. Malino	Malino	TAHURA	KK baru

Sumber: Dit. Pengelolaan KK, 2021

Berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian yang dilakukan, secara umum menunjukkan kawasan TN memberikan nilai rata-rata pengelolaan yang paling tinggi dibandingkan kawasan dengan fungsi lainnya, yaitu sebesar 76,54 poin. Hal ini dapat dipahami mengingat pengelolaan TN lebih terarah dengan adanya unit pengelola tersendiri, sehingga segala alokasi sumberdaya yang dimiliki baik anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara penuh untuk mendukung pengelolaan di lapangan. Walaupun demikian, saat ini masih terdapat 3 TN yang belum

memiliki unit pengelola sendiri, yaitu TN Zamrud (dikelola oleh BBKSDA Riau), TN Gandang Dewata (dikelola oleh BBKSDA Sulawesi Selatan) dan TN Gunung Maras (dikelola oleh BKSDA Sumatera Selatan), sehingga nilai efektivitas pengelolaannya lebih rendah dibandingkan kawasan TN lainnya. Sementara itu kawasan dengan nilai rata-rata terendah adalah KSA/KPA yaitu hanya 31,29 poin. Tidak jelasnya arahan fungsi pengelolaan menyebabkan kawasan ini belum dapat dikelola dengan baik sesuai dengan mandatnya.

Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
berdasarkan fungsi kawasan

Fungsi KK	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Nilai Rata-rata
TN	43	88	76,54
CA	15	87	62,93
SM	20	86	63
TWA	36	86	64,27
TB	36	73	58,09
Tahura	12	82	58,71
KSA/KPA	9	64	31,29

Sumber: Dit. Pengelolaan KK, 2021

Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2021 mengalami peningkatan untuk setiap fungsi kawasan, kecuali untuk kawasan TB dan KSA/KPA, apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2020. Taman Buru tidak mengalami peningkatan nilai efektifitas pengelolaannya karena sampai dengan saat ini

pedoman atau arahan pengelolaan untuk kawasan taman buru belum ada, sehingga di lapangan 11 kawasan buru yang ada di Indonesia belum dikelola sesuai dengan fungsinya untuk wisata buru.

Perbandingan nilai efektivitas pengelolaan KK
tahun 2020 dan 2021

Fungsi KK	S/D TAHUN 2020			S/D TAHUN 2021		
	MIN	MAX	RATA-RATA	MIN	MAX	RATA-RATA
TN	43	85	74.98	43	88	76.54
CA	54	87	60.52	15	87	62.93
SM	20	78	60.04	20	86	63.00
TWA	24	82	62.87	36	86	64.27
TB	36	78	58.36	36	73	58.09
Tahura	12	77	57.91	12	82	58.71
KSA/KPA	9	64	31.3	9	64	31.29

Sumber: Dit. Pengelolaan KK, 2021

Apabila dikelompokkan tingkat efektivitasnya dalam 4 kelas, yaitu: 0-25% (tidak efektif), >25-50 (kurang efektif), >50-75 (cukup efektif) dan >75-100 (efektif) maka sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia berada pada posisi cukup

efektif, sedangkan yang sudah efektif mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 55 unit KK (tahun 2020) menjadi 104 unit KK (tahun 2021) dan mayoritas sebagai taman nasional dan taman wisata alam.

Perbandingan kategori efektivitas pengelolaan KK di Indonesia tahun 2020 dan 2021

JUMLAH KAWASAN KONSERVASI	2020		2021	
Tidak efektif (< 25)	20		20	
Kurang efektif (>25 - 50)	110		84	
Cukup Efektif (>50 - 75)	366		342	
Efektif (>75)	55		104	

Sumber: Dit. Pengelolaan KK, 2021

Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target Renstra 2020-2024

SARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 5 TAHUN DALAM RENSTRA	REALISASI 2020-2021	CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Jenis Kawasan Konservasi	62,50 PPN	61,56 PPN	98,50%

Selama 5 tahun periode Renstra 2020-2024, target terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi seluas 27 juta Ha mencapai 62,50 poin. Sampai dengan tahun 2021, hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilakukan mencapai 61,56 poin atau 98,49% dari target 5 tahun. Meskipun secara target penilaian sudah tercapai, namun dalam proses penilaian efektivitas pengelolaan KK sampai dengan tahun 2021, sempat menemui beberapa kendala yaitu:

1. Proses penilaian terlambat.
Adanya rencana untuk menggunakan pedoman penilaian efektivitas pengelolaan yang akan disinkronkan dengan kawasan hutan lainnya berdasarkan SK Menteri KLH, menyebabkan kegiatan penilaian efektivitas KK menjadi tertunda. Keputusan menggunakan tool METT sebagaimana yang sudah digunakan selama ini baru dilakukan pada bulan September, sehingga proses penilaian dilaksanakan setelah itu. Untuk beberapa UPT khususnya KSDA dengan target lokasi penilaian KK cukup banyak, hal ini menjadi persoalan tersendiri.
2. Terbatasnya jumlah Fasilitator di Pusat dan UPT
3. Refocusing anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan anggaran penilaian efektivitas pengelolaan KK di UPT.

Sebagai tindak lanjut perlu diupayakan langkah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tool penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang sesuai dengan dinamika pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Indonesia.
2. Menyusun arahan kebijakan untuk memastikan rencana tindak lanjut hasil penilaian yang telah disusun oleh pengelola dapat ditindaklanjuti.

3. Melakukan penyegaran atau pelatihan fasilitator penilaian efektivitas pengelolaan KK yang melibatkan UPT dan UPTD.
4. Memastikan ketersediaan anggaran pengelolaan kawasan konservasi

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, selain menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi salah satu yang digunakan mewujudkan sasaran strategis KLHK Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan IKU: **“Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dan Perairan” dengan target sebesar 2,5 point sampai dengan 2024.** Peningkatan efektivitas pengelolaan ini diukur dari seluruh kawasan hutan baik hutan konservasi (HK), hutan produksi (HP), hutan lindung (HL) maupun kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Baseline yang digunakan tahun 2019 sebesar 2,0 point, sehingga target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 2,2 point. Berdasarkan konversi hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan dengan membagi nilai capaian dengan angka 25 (untuk mendapatkan 4 kelas efektivitas pengelolaan) diperoleh rata-rata nilai sebesar 2,46 point. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 2,2 point, sehingga capaiannya sebesar 111,82%.



Identifikasi tegakan di SM Isau - Isau, BKSDA Sumatera Selatan)

Sumber : Taufan Kharis

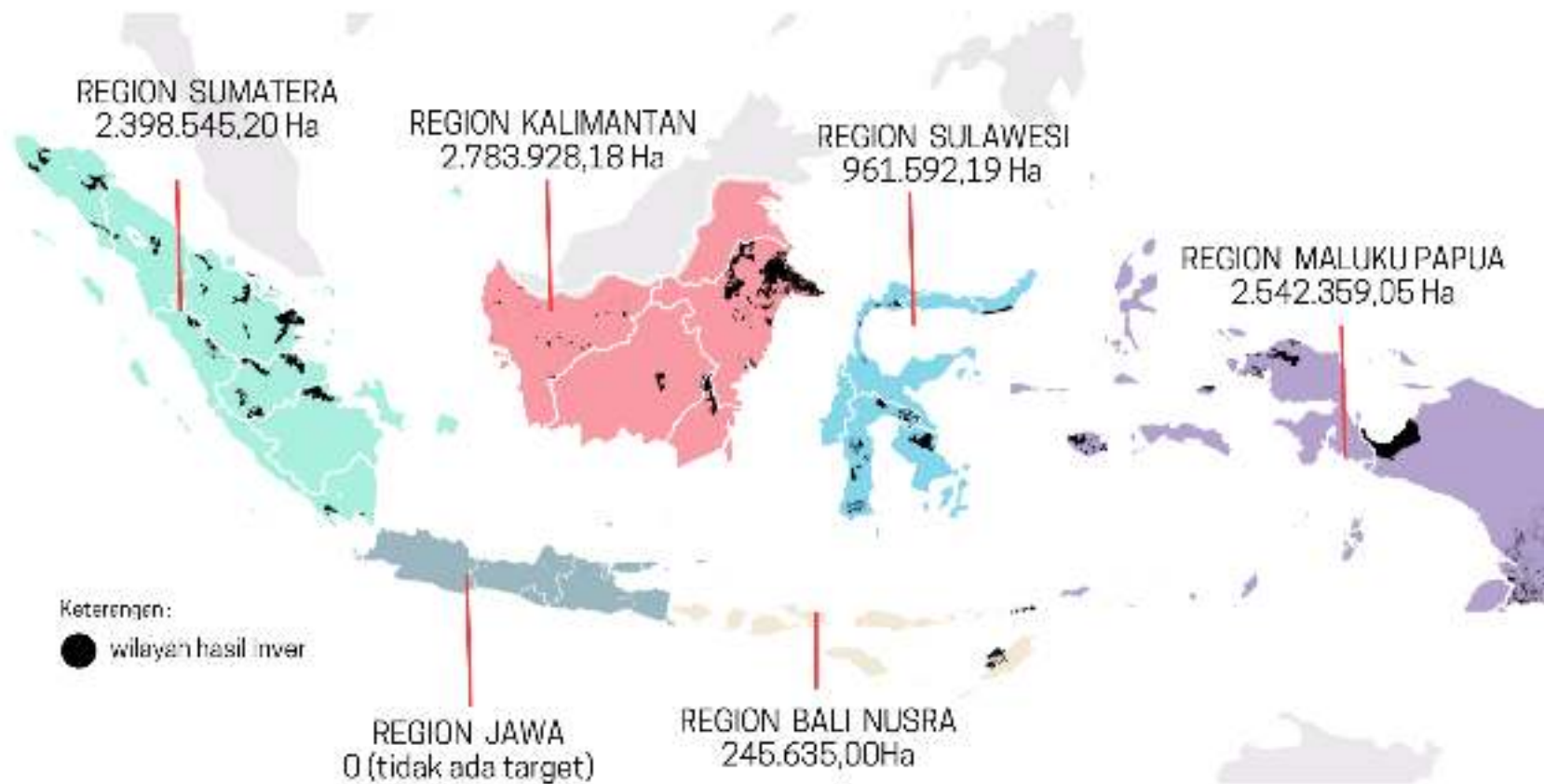
- f. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap target
Perjanjian Kinerja 2021



Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target
Renstra 2020-2024





Peta hasil inventarisasi dan verifikasi tahun 2021 per *region*

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi untuk memperoleh data dan informasi keanekaragaman hayati yang berlokasi di luar Kawasan Konservasi yang terverifikasi, dari data dan informasi tersebut, dapat menunjukkan area-area di luar Kawasan Konservasi yang terindikasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan memberikan arahan pengelolaan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh kepada para pengelola di tingkat tapak. Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi mengacu pada Perdirjen KSDAE No 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)

Berdasarkan target tahun 2021, dilakukan inventarisasi dan verifikasi yang diduga memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi yang berada di luar Kawasan konservasi yang dilakukan oleh 20 UPT BBKSDA/ BKSDA. Hasil capaian kawasan yang diinventarisasi seluas 8.932.059,60 Ha selanjutnya diverifikasi sehingga dihasilkan luasan dengan kategori kehati tinggi seluas 4.888.580,81 Ha, kehati sedang seluas 1.919.913,60 Ha dan kehati rendah seluas 2.123.565,16 Ha.

**PETA HASIL INVER KEHATI TINGGI
DI LUAR KSA, KPA DAN TB
REGION SUMATERA
TAHUN 2021**



Projeksi: Transverse Mercator
Datum: GRS 1980
Elevasi: Garis ketinggian Jember, Tolombone, Meranti, dll.
Elevasi: 1984

- Legenda**
- Kota
 - Kota Administrasi
 - Batas Desa
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi
- KATEGORI**
- Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

DISKAM

1. Laporan Analisis Sederhana KESKAD Jember dan KESKAD SPT 2019/2020 tentang Perilaku Tidak Inklusif dan Vertikal Kaminan Dengan Nilai Kemiskinan Regional Hasil Tinggi di Luar Kawasan Suka Kani, Kaminan Perikanan Kani, dan Tapan Suka

SUMBER PETA

1. Peta Hasil Survei Data Detail Batas Desa (KDB) Wilayah Region Sumatera
2. Peta Wilayah Administrasi Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial
3. Peta Administrasi, Provinsi Sumatera Selatan 2014
4. Data Kemiskinan Regional, Kabupaten Lings



KEMENTERIAN LINGKUNGAN, HAYATI DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
TAHUN 2021

Provinsi	Kategori			Luas_HA
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Aceh		23.623,00	862.486,54	454.408,54
Jambi	256.571,45	3.821,23	415.243,24	575.335,52
Lampung	17.825,41	9,52	46.936,13	63.862,08
RIAU	245.727,88	488.017,47	51.930,96	796.596,31
Sumatera Barat	15.946,01	15.848,53	177.564,74	209.407,28
Sumatera Selatan	14.594,17	37.586,40	211.323,07	264.203,64
Sumatera Utara		15.157,70	100.375,80	115.533,50
Luas_HA	450.282,91	553.430,93	1.394.931,38	2.398.545,23

Pada Region Sumatera, luas wilayah yang diinventarisasi sebesar 2.398.545,20 Ha, dengan rincian berdasarkan kategori tinggi seluas 1.394.861,38 Ha, sedang seluas 553.400,91 Ha dan rendah seluas 450.282,91 Ha. pada Region Sumatera, daerah yang diinventarisasi dan verifikasi dengan tingkat kehati tinggi sebagian besar terdapat di area dengan tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder, rawa pesisir, semak belukar, dan beberapa tipe tutupan hutan lahan lainnya dalam cakupan yang lebih kecil. Area yang teridentifikasi memiliki nilai kehati tinggi di Region Sumatera, merupakan area sebaran habitat fauna penting yang jenisnya juga terdapat di dataran Asia pada umumnya, meliputi jenis mamalia besar diantaranya Harimau Sumatera, Kucing Hutan, Macan Dahan, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Beruang Madu, Tapir, Landak, berbagai jenis Primata seperti Orang Utan Sumatera, Siamang, Simpai, Owa Ungko, Kukang, mamalia berupa Kambing Hutan, Rusa Sambar, Kijang, berbagai jenis burung seperti Rangkong, Bangau tongtong, Elang Bondol, Trenggiling, Reptil (buaya Muara). Sedangkan flora yang menjadi kunci area dikategorikan menjadi area bernilai kehati tinggi adalah habitat flora langka, salah satunya adalah *Rafflesia arnoldii*, Jelutung, dan Meranti.

**PETA HASIL INVER KEHATI TINGGI
DI LUAR KSA, KPA DAN TB
REGION KALIMANTAN
TAHUN 2021**



Skala 1:500,000
0 25 50 100 150 200
km

Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM

- Legenda**
- Kota
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Desa
 - Kawasan Konservasi
 - KATEGORI**
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

DASAR:

1. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor PB/KSDAE/SET/SKUM/211/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan Dengan Atribut Kawasan Konservasi-Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

SUMBER PETA:

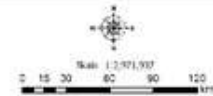
1. Peta Hasil Skoring Inver Kehati Balai Besar/Balai ASDA Inklusif Region Kalimantan
2. Peta Wilayah Administrasi Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial
3. Peta Administrasi, Pemprov Kalimantan Selatan
4. Peta Kawasan Konservasi, Kementerian LHK



Provinsi	Kategori			Luas_HA
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kalimantan Barat	51,757.77	25,334.77	69,170.52	146,263.06
Kalimantan Selatan	279,276.00	18,890.86	35,390.03	333,556.89
Kalimantan Tengah	-	8,588.63	93,315.19	101,903.82
Kalimantan Timur	831,575.89	446,928.68	923,699.83	2,202,204.40
Luas_HA	1,162,609.66	499,742.94	1,121,575.57	2,783,928.18

Region Kalimantan merupakan region dengan luasan kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi paling luas dibandingkan dengan region lainnya. Secara keseluruhan kawasan yang telah diinventarisasi dan verifikasi seluas 2.783.928,18 Ha, yang digolongkan menjadi wilayah dengan tingkat Kehati Tinggi seluas 1.121.575,57 Ha, Kehati Sedang sebesar 499.742,94 Ha dan 1.162.609,66 Ha wilayah lainnya yang masuk ke dalam wilayah dengan tingkat Kehati Rendah. Daerah yang diinventarisasi dan verifikasi dengan tingkat Kehati Tinggi sebagian besar terdapat di area dengan tutupan lahan berupa: Badan Air, Hutan Lahan Kering Sekunder, Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Semak Belukar, Hutan Rawa Sekunder, Pertambangan dan Lahan Terbuka serta beberapa tipe tutupan lahan lainnya dalam cakupan yang lebih kecil. Area yang teridentifikasi memiliki nilai kehati tinggi di Region Kalimantan, merupakan area sebaran habitat fauna penting yang jenisnya yang juga terdapat di daratan Asia pada umumnya, yang meliputi jenis mamalia besar diantaranya, Orang Utan, Beruang madu, Kijang, Elang Bondol, Bangau Tong-Tong, Julang Mas, Buaya, Owa, Kukang, Lutung, Landak, namun terdapat juga Fauna-fauna endemik khas Kalimantan seperti Bekantan, serta satwa air dilindungi lainnya seperti Buaya, Penyu, Lumba-lumba, dan dugong. Sedangkan flora yang menjadi kunci area dikategorikan menjadi area bernilai kehati tinggi adalah habitat flora langka, salah satunya adalah Ulin, berbagai jenis Anggrek.

**PETA HASIL INVER KEHATI TINGGI
DI LUAR KSA, KPA DAN TB
REGION BALI-NUSA TENGGARA
TAHUN 2021**



Proyeksi: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM

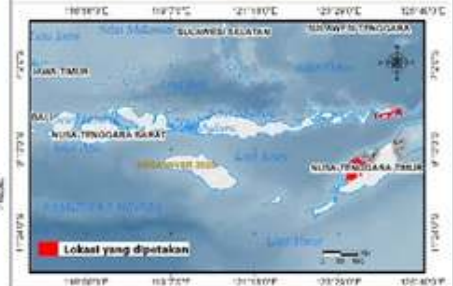
- Legenda**
- Kota
 - Batas Administrasi
 - Batas Desa
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Provinsi
 - Batas Negara
 - Batas Perairan
 - Batas Konservasi
- KATEGORI**
- Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

DASAR :

- Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor PB/KSDAB/SET/1/KUM/211/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan Dengan Matrik Kelestarian Alam-Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

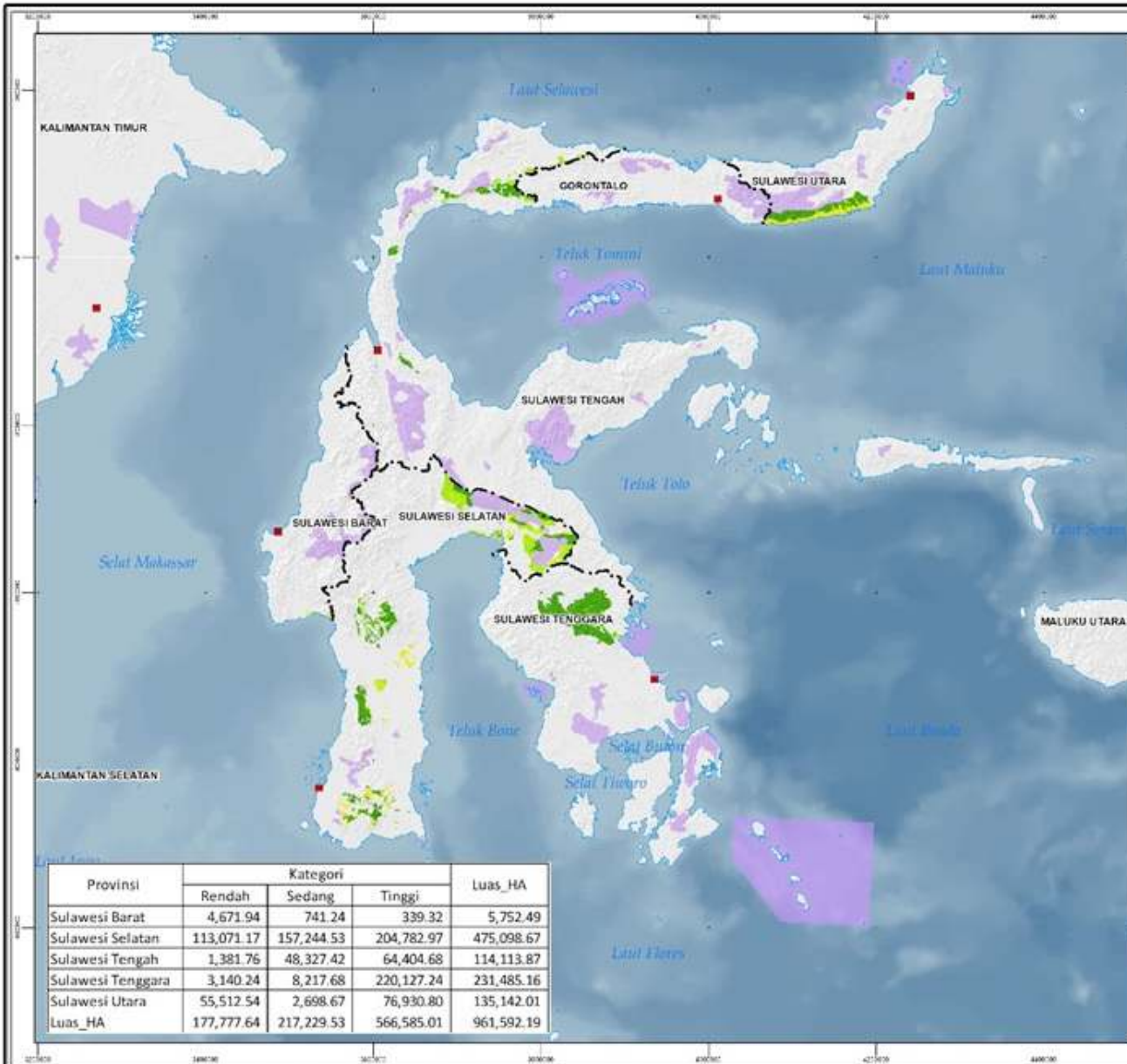
SUMBER PETA :

- Peta Hasil Skoring Inver Kehati Bali Besar/Bali ASDA Inklusif Region Bali Nusa
- Peta Wilayah Administrasi Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial
- Peta Kawasan konservasi, Kementerian LHK

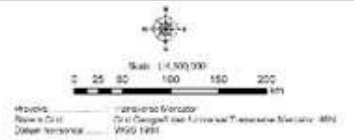


Provinsi	Kategori			Luas_HA
	Rendah	Sedang	Tinggi	
NTB			3,827.15	3,827.15
NTT	72,779.52	62,230.43	106,797.90	241,807.84
Luas_HA	72,779.52	62,230.43	110,625.05	245,635.00

Target kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Tahun 2021 di Region Bali Nusa Tenggara, hanya terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Luas hasil inventarisasi dan verifikasi yang terverifikasi di Region Bali Nusa Tenggara adalah seluas 245.634,99 Ha. Berdasarkan hasil analisis spasial dan skoring nilai kehati, region Bali Nusra memiliki luasan dengan kategori kehati tinggi seluas 110.625,05 Ha, kategori sedang 62.230,42 Ha, dan kategori rendah seluas 72.779,52 Ha. Lebih lanjut, seluruh area yang diinventarisasi dan diverifikasi di Provinsi NTB diketahui merupakan area dengan kategori kehati tinggi. Tutupan lahan yang mendominasi berupa hutan lahan kering sekunder dan savana/padang rumput. Selain itu juga terverifikasi tutupan lahan berupa semak belukar, serta sebagian kecil area hutan lahan kering primer. Pada area yang teridentifikasi memiliki nilai kehati tinggi di Region Bali Nusa Tenggara, ditemukan beberapa jenis satwa liar yang menjadi satwa kunci dalam penentuan kategori. Satwa liar yang terverifikasi di Provinsi NTB diantaranya Elang Laut Perut Putih, Elang Bondol, serta beberapa jenis Rusa Timor. Selain itu, di Provinsi NTT, ditemukan pula beberapa jenis burung endemik Nusa Tenggara, diantaranya Isap Madu Timor, Decu Timor, Anis Timor, Pergam Timor, serta Cikrak Timor. Berdasarkan pengamatan, satwa liar endemik ini dominan ditemukan berada di sekitar atau pada tegakan Ampupu (*Eucalyptus urophylla*), yang juga merupakan vegetasi endemik Nusa Tenggara.



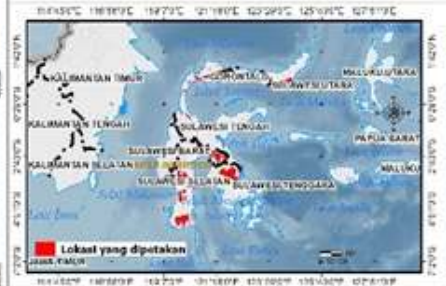
**PETA HASIL INVER KEHATI TINGGI
DI LUAR KSA, KPA DAN TB
REGION SULAWESI
TAHUN 2021**



- Legenda**
- Kota
 - Batas Administrasi**
 - Batas provinsi
 - Batas kabupaten
 - Batas provinsi
 - Batas provinsi
 - Batas provinsi
 - Kawasan Konservasi
 - KATEGORI**
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

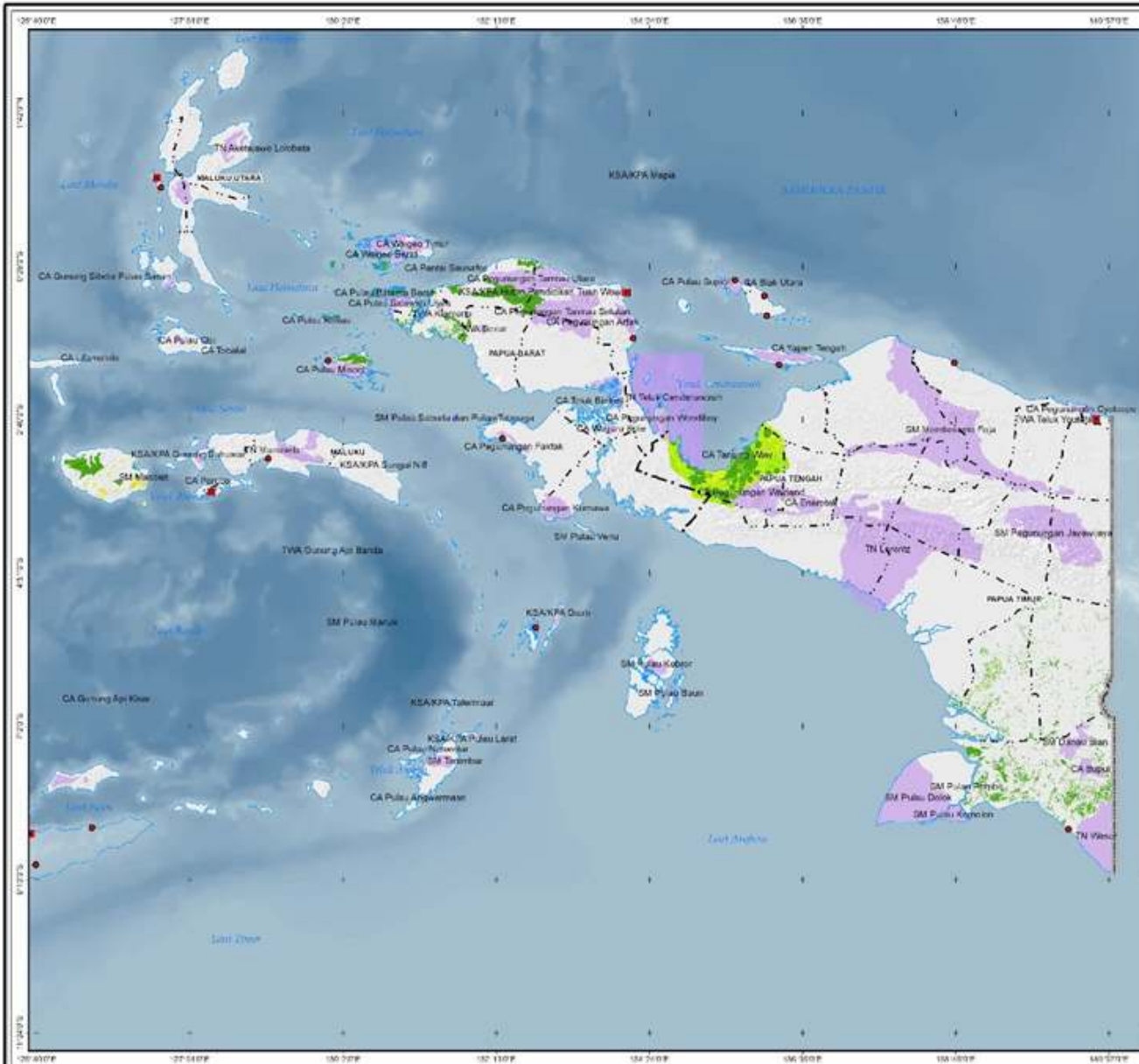
DASAR
1. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor PB/KSDAE/SET/100/211/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan Dengan Atribut Keberagaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Perikanan Alam, dan Taman Buru

SUMBER PETA
1. Peta Hasil Skoring Inver Kehati Balai Besar/Balai KSDA Inklusif Region Sulawesi
2. Peta Wilayah Administrasi Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial
3. Peta Kawasan konservasi, Kementerian LHK



Provinsi	Kategori			Luas_HA
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Sulawesi Barat	4,671.94	741.24	339.32	5,752.49
Sulawesi Selatan	113,071.17	157,244.53	204,782.97	475,098.67
Sulawesi Tengah	1,381.76	48,327.42	64,404.68	114,113.87
Sulawesi Tenggara	3,140.24	8,217.68	220,127.24	231,485.16
Sulawesi Utara	55,512.54	2,698.67	76,930.80	135,142.01
Luas_HA	177,777.64	217,229.53	566,585.01	961,592.19

Luas wilayah yang diinventarisasi pada Region Sulawesi sebesar 961.592,19 Ha, Berdasarkan hasil analisis spasial dan skoring nilai kehati, region Sulawesi memiliki luasan dengan kategori kehati tinggi seluas 566.585,01 Ha, kategori sedang 217.229,53 Ha, dan kategori rendah seluas 177.777,64 Ha. Tutupan lahan yang mendominasi berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur semak, dan semak belukar. Fauna yang diidentifikasi menjadi area bernilai kehati tinggi yang terdapat di Region Sulawesi, merupakan area sebaran habitat fauna penting yang jenisnya hanya terdapat di Region Sulawesi, seperti Anoa, Rusa Timor, Babirusa, berbagai jenis burung paruh bengkok, Maleo, burung langka khas Sulawesi serta berbagai flora langka yang habitatnya berasosiasi dengan habitat fauna penting yang ada di Sulawesi. Beberapa jenis nilai penting yang ditemukan lainnya, yaitu Monyet Yaki, Babi Hutan, Bangau Putih, Buaya Muara, Elang, Musang, Trenggiling, Tarsius, dan beberapa jenis ikan, diantaranya Ikan Belanak, Betok, Bunaka, Bungo dan lain-lain.



**PETA HASIL INVER KEHATI TINGGI
DI LUAR KSA, KPA DAN TB
REGION MALUKU-PAPUA
TAHUN 2021**



Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Koordinat: UTM
Datum: Internasional
Elevasi: WGS 1985

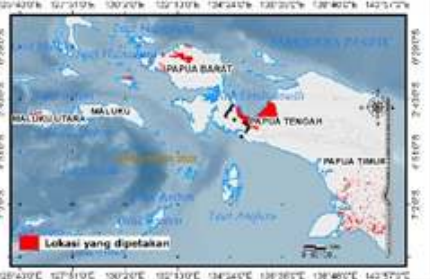
- Legenda**
- KSA
 - Batas Administrasi**
 - batas negara
 - - - - - batas provinsi
 - - - - - batas kabupaten/kota
 - garis pantai
 - Kawasan Konservasi
 - KATEGORI**
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

DASAR

1. Peraturan Direktur Jenderal KSDA Nomor P/MSD/SET.1/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan Dengan Nilai Kearifan Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Baru

SUMBER PETA

1. Peta Hasil Skoring Inver Kehati Balai Besar/KSDA Inklusif Region Maluku-Papua
2. Peta Wilayah Administrasi Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial
3. Peta Kawasan Konservasi, Kementerian LHK



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
TAHUN 2021**

Region Maluku-Papua memiliki luas wilayah yang diinventarisasi pada tahun 2021 sebesar 2.542.359,05 Ha. Berdasarkan hasil analisis spasial dan skoring nilai kehati, region Maluku-Papua memiliki dominasi luasan dengan kategori kehati tinggi seluas 1.706.790,88 Ha, kategori sedang 587.224,63 Ha, dan rendah seluas 248.343,55 Ha. Tutupan lahan didominasi oleh hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer dan beberapa tipe tutupan hutan lahan lainnya dalam cakupan yang lebih kecil. Fauna yang diidentifikasi menjadi area bernilai kehati tinggi yang terdapat di Region Maluku-Papua merupakan area sebaran habitat fauna penting yang jenisnya hanya terdapat di region tersebut, meliputi jenis Gosong Maluku, Penyu Belimbing dan Penyu Lekang serta berbagai flora langka yang habitatnya berasosiasi dengan habitat fauna penting yang ada di Region Maluku-Papua. Nilai penting lainnya yang diperoleh adanya jenis fauna dan flora, yaitu Babirusa Maluku, Kanguru, Cendrawasih Kuning Kecil, Damar Putih, Elang Papua, Gaharu Damar Putih, Jagal Irian, Kakatua Koki, Kasturi Kepala Hitam, dan beberapa jenis Nuri.

Luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi tahun 2020-2021

LUASAN INVENTARISASI (Ha)	2020	2021
	Kehati Tinggi	5.446.442,78
Kehati Sedang	1.156.385,44	1.919.913,60
kehati Rendah	60.463,74	2.123.565,16
Total Luasan	6.663.291,96	8.932.059,57

Dit. BPPE, 2021

Dalam waktu 2 tahun masa periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024, luasan inventarisasi dan verifikasi kehati di luar kawasan konservasi telah mencapai 15.595.351,53 Ha. Apabila dibandingkan target yang telah ditetapkan selama 5 tahun seluas 43 juta ha, dalam 2 tahun capaian kinerja untuk IKP ini adalah sebesar 36,28%. Apabila dibandingkan dengan atrget yang ditetapkan maka, realisasi IKP secara kumulatif masih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam kegiatan Inventarisasi dan verifikasi nilai kehati di luar kawasan konservasi yaitu:

1. Penghematan anggaran pada tahun 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan adanya pengurangan kegiatan inventarisasi di beberapa BKSDA/ BBKSDA akan tetapi tidak ada pengurangan target luasan di UPT.
2. Masih ada pemahaman yang kurang mengenai implementasi Perdirjen No. 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang petunjuk teknis inver kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar KSA, KPA dan TB
3. Tantangan dalam pengumpulan data dari stakeholder terkait kegiatan inventarisasi, mengingat areal inventarisasi dilaksanakan pada bentang alam lansekap yang beragam termasuk administrasi pengelolaannya (Hutan dan APL)



Analisis Potensi Tegakan di Taman Nasional Sebangau)

Sumber : Hidayat Turrahman

g. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA

Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap target
Perjanjian Kinerja 2021



Capaian Kinerja tahun 2020-2021 terhadap target
Renstra 2020-2024



Agar target pada tahun berikutnya dapat dicapai maka diperlukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UPT dan para pihak baik secara tatap muka maupun daring agar pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan kehati tinggi dapat lebih dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan optimal di tingkat tapak.
2. Mengingat secara administratif area yang diinventarisasi bukan wilayah pengelolaan Ditjen KSDAE maka perlu dilakukan kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terutama Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat mitra KSDAE dan terutama pemilik/pengelolaan kawasan.
3. Menghimpun data dan informasi terkait yang berasal dari instansi/ lembaga lain maupun mitra yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan capaian IKK Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan

memonitor tindak lanjut hasil evaluasi. Penilaian SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan penilaian SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP lingkup KLHK. Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya.

Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 5 komponen akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan nilai SAKIP sebesar **80,02 dengan kategori A (Memuaskan)** sebagaimana Surat Inspektur Jenderal Nomor SP. 64/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/4/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal KSDAE. Dengan hasil nilai SAKIP sebesar 80,02 maka dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar **101,94%** dari target nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 78,5 poin.

Hasil Penilaian 5 Komponen Akuntabilitas

Komponen Akuntabilitas		Nilai Maksimal	Nilai	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,18	Hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan kategori A (Memuaskan) yang diinterpretasikan “Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel”
2	Pengukuran Kinerja	25,00	19,19	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,19	
4	Evaluasi Internal	10,00	7,12	
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20,00	15,34	
Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP			80,02	

Sumber: Setditjen KSDAE, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP yaitu:

- a. Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan serta terdapat perbedaan target IKP antara di PK Eselon I dengan PK Eselon II.
- b. Belum ada SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.
- c. Belum dilakukan reвью Renstra baik pada Eselon I maupun Eselon II.
- d. Belum ada SOP pengumpulan data kinerja.
- e. Belum ada pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi yang menggambarkan relevansi dengan bantuan teknologi informasi.

- f. Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment.
- g. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Selanjutnya atas permasalahan tersebut, rekomendasi yang diberikan kepada Ditjen KSDAE yaitu:

- a. Melakukan evaluasi program terkait kesesuaian penetapan target baik pada dokumen Renstra, Renja, PK Eselon I, dan PK turunannya.
- b. Menyusun SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.

- c. Melakukan reviu Renstra untuk mengetahui kesesuaian IKP-IKK serta targetnya terhadap pencapaian tujuan Ditjen KSDAE.
- d. Menyusun SOP pengumpulan kinerja disesuaikan dengan kondisi terkini.
- e. Melakukan breakdown indikator kinerja atas ke indikator kinerja individu sehingga ada hubungan kausalitas dalam mewujudkan kinerja utama atasan.
- f. Mempersiapkan/memanfaatkan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja pegawai serta menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan prestasi kerja.

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE
selama 5 tahun terakhir



Sumber: Setditjen KSDAE, 2021

Mengantarkan peran Kementerian LHK untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju



PERMENLHK NO.15 TAHUN 2021

INTERNALISASI UUCK

Reformasi struktural yang mendukung kemandirian berusaha

PERUBAHAN PARADIGMA

Dari timber management ke landscape management

MULTIUSAHA KEHUTANAN

Untuk menciptakan keseimbangan antara pendapatan bahan baku dan mendorong multiplier effect

SIRKULAR EKONOMI

Untuk memtransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan nilai tambah

Peraturan Menteri LHK
No. 15/2021
Tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK
No. 15/2021
Tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK
No. 15/2021

Peraturan Menteri LHK
No. 15/2021
Tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK
No. 15/2021

Peraturan Menteri LHK
No. 15/2021
Tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK
No. 15/2021

B. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial merupakan tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sebagai wujud tanggapan pemerintah terhadap adanya bencana pandemi Covid-19. Untuk mendukung arah kebijakan pemerintah, strategi pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Tahun 2021 Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 Prioritas Nasional yaitu [1] PN 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, [2] PN 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan [3] PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.



TN Bromo Tengger Semeru sebagai Destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan

Sumber : Simon Onggo

C. CAPAIAN PROYEK SBSN

Proyek SBSN tahun 2021 dilaksanakan untuk mendukung kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dalam rangka perlindungan dan pengawetan tumbuhan dan satwa liar serta mendukung wilayah konservasi sebagai pusat Pendidikan dan Penelitian alam yang terintegrasi dan berskala internasional. Proyek ini bertujuan meningkatkan jumlah populasi jenis satwa terancam punah prioritas, memfasilitasi kegiatan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Dengan hasil dan dampak dari proyek SBSN ini adalah tersedianya fasilitas suaka satwa bertaraf internasional di kawasan konservasi.

Pada tahun 2021, Ditjen KSDAE mendapatkan alokasi anggaran dari pembiayaan SBSN sebesar Rp 150.286.518.000,- yang dilaksanakan oleh 6 UPT. Dimana sebanyak Rp 142.147.400.000,- merupakan proyek baru tahun 2021 yaitu pada BTN Ujung Kulon, BTN Rawa Aopa Watumohai, BKSDA Maluku, dan sebanyak Rp 8.139.118.000,- merupakan lunturn tahun 2020 yaitu pada BTN Batang Gadis, BTN Aketajawe Lolobata, dan BBTN Teluk Cenderawasih.

BTN Ujung Kulon

Nama Kegiatan
 Pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) Taman Nasional Ujung Kulon

Pagu
 Rp 72.666.861.000,-

Realisasi
 Rp 15.251.089.130 (20,99%)

Realisasi fisik
 16,14%



Proyek SBSN di BTN Ujung Kulon merupakan pekerjaan tahun jamak (2020-2021), persetujuan melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S.63/MK.2/2021 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area BTN Ujung Kulon terbit pada tanggal 21 April 2021 dan terdapat kewajiban penyusunan dokumen *Environmental Impact Assessment* (EIA) untuk pelaksanaan pembangunan sarpras di KK dengan status "World Heritage" dari UNESCO.

Dilakukan lunturn anggaran tahun 2022 sebesar Rp 57.420.557.820,-.



BTN Rawa Aopa Watumohai

Nama Kegiatan
Pembangunan Pusat Konservasi Rusa

Pagu
Rp 30.553.539.000,-

Realisasi
Rp 28.263.194.900,- (93,11%)

Realisasi fisik
99%



BKSDA MALUKU

Nama Kegiatan
Pembangunan Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku di Balai KSDA Maluku

Pagu
Rp 39.127.000.000,-

Realisasi
Rp 27.585.391.080,- (70,50%)

Realisasi fisik
91,88%
Dilakukan tuncuran anggaran tahun 2022 sebesar
Rp 3.483.086.970,-

di Kabupaten Seram di Kota Ternate
sangat baik, rapi, dan indah, dan Gudang yang sudah selesai.



BTN Batang Gadis

Nama Kegiatan
Pembangunan Pusat Konservasi Ekosistem Pegunungan Sumatera

Pagu
Rp 4.626.354.000,-

Realisasi
Rp 3.205.495.975,- (69,29%)

Realisasi fisik
56,42%
Kegiatan pembangunan sarpras tidak bisa dilanjutkan karena adanya konflik tenurial dengan desa Sasotnyak.



BTN Akejaw Lolobata

Nama Kegiatan
Pembangunan Suaka Paruh Bengkok

Pagu
Rp 667.429.000,-

Realisasi
Rp 667.429.287,- (100%)

Realisasi fisik
100%



BBTN Teluk Cendrawasih

Nama Kegiatan
Pengembangan Pusat Konservasi Sanctuary I Iju
Paus di TNTC dan Pengembangan Resort Sowa
Kwatsora TR. IC

Pagu
Rp 2.645.335.000,-

Realisasi
Rp 2.645.335.000,- (100%)

Realisasi fisik
100%

D. CAPAIAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Pada tahun 2021, kasus Covid-19 yang masih tinggi berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan akibat Covid-19 antara lain melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana program ini telah dimulai sejak tahun 2020. Pada tahun 2021, Kementerian LHK melaksanakan 3 program PEN yaitu PEN Pariwisata, Mangrove Padat Karya, dan PEN Ketahanan Pangan. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung pelaksanaan PEN melalui PEN Ketahanan Pangan atau Food Estate.

PEN Food Estate pada Direktorat Jenderal KSDAE dilaksanakan oleh 1 UPT yaitu BKSDA Kalimantan Tengah. Kegiatan PEN Food Estate di BKSDA Kalimantan Tengah telah dilaksanakan selama 2 tahun (2020-2021). Pada tahun 2021 kegiatan yang dilakukan yaitu perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, antara lain melalui pengamanan habitat/koridor satwa, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, penanaman dalam rangka pengkayaan pakan satwa, dan penanganan satwa transit dan konflik. Kegiatan PEN Food Estate ini dilaksanakan pada koridor satwa orang utan dan bekantan seluas 19.623,96 hektar.

PEN FOOD ESTATE



Pagu

Rp 2.234.526.000,-

Realisasi

Rp 2.042.282.553,- (91,40%)

Aliran dana untuk masyarakat

pagu Rp 324.900.000,-

realisasi Rp 294.900.000,- (90,77%)

Jumlah HOK yang terserap

target 2.166 HOK,

realisasi 1.966 HOK (90,77%)

Selain melalui program PEN, terdapat juga *Cash For Work* (CFW) yang merupakan pendanaan anggaran APBN KLHK yang pelaksanaannya bersifat padat karya dan melibatkan masyarakat secara langsung guna memantik perekonomian di masa pandemi. Pada Direktorat Jenderal KSDAE, anggaran pada kegiatan ini di tagging PEN Padat Karya dan dilaksanakan oleh 72 UPT. Kegiatan yang dilakukan antara lain perlindungan

dan pengamanan kawasan konservasi, penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi, pengendalian kebakaran hutan, pemulihan ekosistem di kawasan konservasi bersama masyarakat desa, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan masyarakat dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

CFW PEN Padat Karya



E. REALISASI ANGGARAN

Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE

Untuk membiayai pelaksanaan tugas bidang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pagu Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebesar Rp.1.925.381.253.000. Alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa kali proses refocusing untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi sehingga menjadi sebesar Rp.1.644.126.169.000. Apabila dibandingkan dengan pagu

tahun sebelumnya, pagu tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 40.872.202.000 atau 2,43%. Penurunan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya sisa belanja gaji karena tidak dibayarkan tunjangan kinerja ke 13 dan 14, serta tidak maksimalnya penyerapan anggaran yang berasal dari sumber dana HLN dan SBSN.

Perbandingan pagu dan realisasi
Direktorat Jenderal KSDAE dalam 5 tahun terakhir



Sumber: OMSPAN. Kemenkeu.go.id tanggal 12 Januari 2022

Pagu dan realisasi Direktorat Jenderal KSDAE tersebar pada 75 satuan kerja baik pusat maupun daerah, dengan realisasi paling tinggi pada BTN Wakatobi yaitu sebesar 100% dan realisasi paling rendah terjadi pada BTN Ujung Kulon dengan realisasi 35,99%. Terdapat 69 satuan kerja atau 92% dari total satuan kerja yang realisasi anggarannya diatas 90%, 3 satuan

kerja atau 4% yang realisasi anggarannya lebih dari 80%, 2 satuan kerja (2,67%) realisasi anggaran lebih dari 79%, serta 1 satuan kerja (91,33%) yang realisasi anggarannya kurang dari 50%. Rendahnya realisasi anggaran pada BTN Ujung Kulon disebabkan karena tidak terserap secara maksimal pagu yang berasal dari sumber dana SBSN.

Pagu dan Realisasi anggaran berdasarkan
Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	700.934.182.000	681.890.703.694	97,28%
Belanja Barang	712.474.477.000	677.238.691.204	95,05%
Belanja Modal	230.717.510.000	150.264.818.652	65,13%
Total	1.644.126.169.000	1.509.394.213.550	91,81%

Sumber: OMSPAN. Kemenkeu.go.id tanggal 12 Januari 2022

Realisasi Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan sumber dana yang paling rendah yaitu sumber dana HLN dan SBSN. Sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat outstanding kontrak sebesar Rp. 9.360.961.806,- yang berasal dari 3 sumber dana yaitu sebesar Rp. 157.618.965, - berasal dari sumber dana RM, Rp.5.598.616.160,- berasal dari sumber dana HLN,

serta Rp.3.604.726.681,- berasal dari sumber dana SBSN. Outstanding kontrak pada sumber dana HLN terjadi pada satuan kerja kantor pusat, sedangkan outstanding kontrak dari sumber dana SBSN terjadi pada BTN Maluku dan BTN Rawa Aopa.

Pagu dan Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	1.216.632.683.000	1.184.381.608.749	97,35%
Rupiah Murni Pendamping (RMP)	6.866.655.000	6.205.457.283	90,37%
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	175.000.000.000	167.834.277.312	95,91%
Hibah Luar Negeri (HLN)	88.949.763.000	66.826.874.525	75,13%
Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)	6.390.550.000	6.380.158.259	99,84%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	150.286.518.000	77.765.837.422	51,75%
Total	1.644.126.169.000	1.509.394.213.550	91,81%

Sumber: OMSPAN. Kemenkeu.go.id tanggal 12 Januari 2022

Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran tidak terserap maksimal adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (51) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.043.478.306,- karena tidak dibayarkan tunjangan kinerja ke 13 dan ke 14 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021; serta PMK Nomor 42/PMK.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini mengurangi serapan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 1,16% dari pagu anggaran.
2. Kegiatan dari sumber dana HLN terdapat sisa Rp. 16.059.434.686,- sehingga mengurangi serapan anggaran sebesar 0,97% dari pagu total. Banyaknya tahapan yang harus dilalui dalam proses pencairan dana pada salah satu hibah yaitu karena proses perpanjangan hibah BCCPGLE menyebabkan terlambatnya proses pencairan dana sumber dana HLN.
3. Kegiatan dari sumber dana SBSN terdapat sisa Rp. 68.911.167.947,- sehingga mengurangi serapan anggaran sebesar 4,7% dari pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE. Hal tersebut disebabkan karena:
 - BTN Ujung Kulon sebesar Rp 57.420.557.820,-, disebabkan karena keterlambatan penerbitan Surat Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (2021-2022) dari Menteri Keuangan. Dana tersebut diusulkan diluncurkan pada tahun 2022.
 - BTN Rawa Aopa Watumohai sebesar Rp 2.086.919.100,-, merupakan sisa kontrak dan tidak digunakan karena target sarpras sudah tercapai 100%.
 - BTN Batang Gadis sebesar Rp 1.584.258.025,-, disebabkan karena proses bangunan tidak dapat dilaksanakan mengingat ada konflik tenurial dengan masyarakat desa Sopotinjak.
 - BKSDA Maluku sebesar Rp 7.824.218.240,-, disebabkan adanya perubahan tata batas kawasan pada lokasi sarpras sehingga terdapat sisa anggaran, mengingat lokasi baru (pada kawasan yang sama) tidak dapat dilakukan pembangunan sarpras secara penuh sesuai dokumen perencanaan awal.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

TRIWULAN III TAHUN 2021

Selasa, 25 - 27 Oktober 2021



Apresiasi Pengelola BMN Terbaik dalam
kegiatan Rekonsiliasi Keuangan 2021

Sumber : Sub Bagian Administrasi Keuangan

F. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu entitas kerja. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dari aspek tersebut kemudian diukur melalui 13 indikator penilaian. Bobot penilaian dalam setiap indikator yaitu revisi DIPA [5], deviasi halaman III DIPA [5], pagu minus [5], data kontrak [10], pengelolaan UP dan TUP [8], laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara [5], Dispensasi SPM [5], penyerapan anggaran [15], penyelesaian tagihan [10], capaian output [17], retur SP2D [5], Rencana penarikan kas (Renkas) [5], serta kesalahan SPM [5].

Nilai IKPA Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 89,18 yang diperoleh dari revisi DIPA (nilai 5), deviasi halaman III DIPA (nilai 0,11), pagu minus (nilai 5), data kontrak (nilai 9,1), pengelolaan UP dan TUP (nilai 7,6), laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara (nilai 4,99), Dispensasi SPM (nilai 4,25), penyerapan anggaran (nilai 14,01), penyelesaian tagihan (nilai 9,61), capaian output (nilai 15,03), retur SP2D (nilai 4,98), Rencana penarikan kas (Renkas) (nilai 5), serta kesalahan SPM (nilai 4,5).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditentukan oleh nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Untuk menghitung NKA, pembobotan nilai antara EKA dan IKPA adalah sebesar 60% nilai EKA dan 40% nilai IKPA. Nilai

EKA merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran yang juga menggambarkan kualitas organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran dan pencapaian target-target kinerjanya. Sedangkan nilai IKPA merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas perbendaharaan organisasi yang ditentukan 4 parameter yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai EKA dan IKPA dihitung pada setiap entitas baik satuan kerja, Eselon I dan Kementerian. Nilai EKA diperoleh dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kementerian Keuangan sedangkan nilai IKPA dipantau pada sistem online monitoring sistem perbendaharaan negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan.

Hasil perhitungan NKA kemudian menjadi dasar dalam penentuan peringkat kinerja anggaran terbaik Kementerian/ Lembaga untuk setiap kategori pagu yang dikelola. Sebanyak 5 (lima) kementerian/ Lembaga dengan NKA terbaik pada setiap kategori pagu akan mendapatkan insentif anggaran yang besarnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. NKA Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebesar 87,63.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dari membandingkan rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 123,98% dengan realisasi anggaran sebesar 91,81%. Hasil nilai rasio efisiensi sebesar 0,74. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE dipandang efisien.

Penghargaan Tahun 2021 Direktorat Jenderal KSDAE



Dirjen KSDAE memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja selama 30 tahun

Sumber : Data dan Informasi Setditjen KSDAE



Pemberian Penghargaan ASN Terbaik kepada Direktur Jenderal KSDAE

Sumber : Data dan Informasi Setditjen KSDAE



Pemberian penghargaan pada acara Senandung alam dan budaya bertajuk "Masa Depan Ras Manusia" di Sleman, Yogyakarta)

Sumber : Data dan Informasi Setditjen KSDAE

Ditjen KSDAE tahun 2021 berhasil memenangkan lomba GENERATION kategori inovasi dimana GENERATION (Gender Mainstreaming Competition) merupakan perlombaan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup KLHK dengan maksud untuk mempertahankan KLHK dalam APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tingkat mentor dan menjadi instansi yang responsif gender dalam bidangnya sehingga layak menjadi tempat untuk belajar dan menjadi contoh bagi pihak lain dalam percepatan pelaksanaan PUG

Sumber : Data dan Informasi , Sekretariat Ditjen KSDAE







"Matahari terbenam adalah bukti bahwa akhir juga bisa indah." - Beau Taplin, Matahari terbenam di rawa gambut TN Sebangau

Sumber : Hidayat Turrahman

BAB IV

Penutup

Tahun 2021, Direktorat Jenderal KSDAE telah melaksanakan 3 program dan 7 indikator kinerja program dengan rata-rata capaian kinerja yang telah melebihi target yaitu sebesar 123,98%. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari semua indikator kinerja program dengan realisasi melebihi target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 sebesar 91,81%, maka diperoleh nilai 0,74. Nilai 0,74 tersebut menunjukkan dalam pencapaian kinerja tahun 2021 berjalan secara efisien.

Capaian kinerja yang telah dicapai yaitu kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 10.655.955,99 ha, nilai ekspor pemanfaatan TSL sebesar Rp 4,20 Triliun, nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar Rp 75,29 Milyar, desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 598 desa, peningkatan efektivitas kawasan konservasi sebesar 61,56

poin, dan kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 8.932.059,60 ha, dan Nilai SAKIP sebesar 80,02 poin.

Tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan ekspor pemanfaatan TSL sebesar 14% dan nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi sebesar 17,50%. Penurunan penerimaan ekspor pemanfaatan TSL disebabkan oleh beberapa hal yaitu terjadi pengalihan manajemen authority CITES KLHK ke Kementerian KKP untuk jenis ikan bersirip; ekspor sarang burung walet hasil budidaya tidak memerlukan dokumen SATS-LN, serta adanya pembatasan aktivitas berbagai sektor karena pencegahan penyebaran Covid-19 menyebabkan terjadinya batal transaksi ekspor. Sedangkan untuk penurunan nilai PNBP pemanfaatan jasa lingkungan penyebabnya sama dengan tahun 2020 yaitu menurunnya jumlah pengunjung wisata alam baik domestik maupun mancanegara disebabkan penutupan obyek wisata alam sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

penyebaran Covid-19. Namun seiring menurunnya kasus Covid-19 di berbagai daerah dan untuk meningkatkan kembali jumlah pengunjung wisata alam, Direktorat Jenderal KSDAE melakukan pengelolaan pariwisata alam dengan reaktivasi obyek wisata alam. Dalam reaktivasi obyek wisata alam, jumlah pengunjung hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kunjungan normal sebelum masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat dan ekonomi, untuk itu Direktorat Jenderal KSDAE mendukung kegiatan Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) yaitu PEN Ketahanan Pangan Food Estate dan PEN Padat Karya. PEN Food Estate hanya dilaksanakan pada 1 UPT yaitu BKSDA Kalimantan Tengah, dengan kegiatan yang dilakukan yaitu perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, antara lain melalui pengamanan habitat/koridor satwa, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, penanaman dalam rangka pengkayaan pakan satwa, dan penanganan satwa transit dan konflik. Kegiatan PEN Food Estate ini dilaksanakan pada koridor satwa orang utan dan bekantan seluas 19.623,96 hektar. PEN Padat Karya dan dilaksanakan oleh 72 UPT. Kegiatan yang dilakukan antara lain perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi, pengendalian kebakaran hutan, pemulihan ekosistem di kawasan konservasi bersama masyarakat desa, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan masyarakat dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Selain melaksanakan 3 program dan 7 indikator kinerja program, Direktorat Jenderal KSDAE juga mendukung arah kebijakan pemerintah, melalui 3 Prioritas Nasional yaitu: [1] PN 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, [2] PN 2 mengembangkan wilayah

untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan [3] PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Dalam upaya untuk mendukung kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dalam rangka perlindungan dan pengawetan tumbuhan dan satwa liar serta mendukung wilayah konservasi sebagai pusat Pendidikan dan Penelitian alam yang terintegrasi dan berskala internasional, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan alokasi anggaran dari pembiayaan SBSN sebesar Rp 150.286.518.000,- yang dilaksanakan oleh 6 UPT.

“Extended Family” istilah yang kami gunakan untuk menyebut mitra dan rekan kerja Ditjen KSDAE. Petugas lapangan, masyarakat sekitar kawasan, para praktisi, peneliti, pemerintah daerah, komunitas dan pemerhati lingkungan, serta banyak pihak lagi, adalah keluarga besar yang terus bersinergi membangun semangat yang sama untuk konservasi. Hal ini menjadi modal besar atas pencapaian pemangkuan dan proses kelola kawasan yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE. pada akhirnya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Direktorat Jenderal KSDAE akan terus senantiasa bersinergi dengan seluruh pihak dalam memastikan kelestarian fungsi kawasan konservasi dapat terjaga.



Gajah dan Senja di Suaka Margasatwa Padang
Sugihan, BKSDA Sumatera Selatan

Sumber : Taufan Kharis

Lampiran

Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka menegajikan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan prestasi kerja dan komitmen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I. WIRATNO, M.Sc.
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Selanjutnya disebut sebagai pertama

Nama : Dr. P. SITI KUREAWA, M.Sc.
Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Selaku atasan jabatan pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan kebijakan ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan program-program secara berjenjang seperti kegiatan-kegiatan sebagai perencanaan, pelaksanaan, perlu pengembangan, dan evaluasi. Pelaksanaan target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan kemajuan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Dr. P. SITI KUREAWA, M.Sc.

Pihak Pertama,

I. WIRATNO, M.Sc.
NIP. 196203056 1984051 005

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(a)	(b)	(c)	(d)
a.	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan yang berstatus sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	7.500.000 Ha
b.	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TM dan hasil penangkaran	2,05 Triliun Rupiah
c.	Meningkatnya Pengenalan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	Jumlah Nilai PRBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	70.000.000.000 Rupiah
d.	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	555 Desa
e.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi	55 Poin
f.	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi serta partisipatif diluar Kawasan Konservasi	4.400.000 Ha
g.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP dan R3004	78,5 Poin

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp1.000,)
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	605.195.537
1.	Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam	
2.	Pengelolaan Kawasan Konservasi	
3.	Simulasi Spekes dan Genetik	
4.	Pemerfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	7.919.313
5.	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	
	Program Dukungan Manajemen	1.024.620.769
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Tjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem)	

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. I. SITI NURSAVA, M.Sc.

Jakarta, Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

F. WIRATNO, M.Sc.
NIP-1962052019900010001

Lampiran 2

LUAS KAWASAN HUTAN YANG
DIINVENTARISASI DAN DIVERIFIKASI
DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN
HAYATI TINGGI SECARA PARTISIPATIF DI
DALAM KAWASAN KONSERVASI TAHUN
2021

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
Regional Sumatera			488,553.03
1	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	350,280.00
2	Balai Besar KSDA Riau	SM Kerumutan	12,738.60
		SM Tasik Serkap	100
		SM Bukit Batu	6,483.50
		SM Giam Siak Kecil	12,230.68
		CA Bukit Bungkok	6,800.97
3	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	SM Siranggas	600
		SM Dolok Surungan	642.26
		CA Dolok Tinggi Raja	114.71
		CA Martelu Purba	148.45
		TWA Deleng Lancuk	10.69
		TWA Sibolangit	24.57
		TWA Sijaba Hutaginjang	293.31
4	Balai KSDA Aceh	SM Rawa Singkil	2,526.18
		TB Lingga Isaq	6,099.29
		CA Serbojadi	308.86
		TWA Kepulauan Banyak	3,019.68
		TWA Pulau Weh	1,419.33
		TWA Janthoi	1,548.60
		TWA Kuta Malaka	956.45
5	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Air Alas	1,790.86
		CA Air Seblat	99.44
		CA Bukit Barisan Selatan	3,100.00
		CA Danau Dusun Besar	1,218.24
		CA Danau Menghijau	245.43
		CA Kepulauan Krakatau	1,100.00
		CA Pasar Ngalam	295.53
		CA Pasar Talo	413.52
		CA Seluma	206.08
		CA Talang Ulu II	0.06
		CA Tanjung Laksaha	360.53
CA Teluk Klowe	112.2		

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		CA Kioyo I dan II	1,100.00
		CA Pagar Gunung I	17.94
		CA Pagar Gunung III	0.29
		CA Sungai Baheowo	103.7
		CA Talang Ulu I	0.55
		KSA/KPA Rawa Kandis	1,200.00
		TB Gunung Nanua	432.18
		TB Semidang Bukit Kabu	576.67
		TWA Air Hitam	381.15
		TWA Air Rami I/II	306.51
		TWA Bukit Kaba	1,245.89
		TWA Danau Tes	1,300.00
		TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	11.28
		TWA Muko Muko	300
		TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	971.48
		TWA Seblat	6,400.00
		TWA Way Hawang	94.1
TWA Danau Dendam Tak Sudah	91.27		
6	Balai KSDA Jambi	CA Durian Luncuk I	73.74
		CA Durian Luncuk II	47.18
		CA Hutan Bakau Pantai Timur	205.1
		CA Sungai Batara	100
		KSA/KPA Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	100
KSA/KPA Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	200		
7	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Bentayan	100
		SM Gumai Pasemah	6,643.53
		SM Isau isau	1,726.48
		SM Gunung Raya	200
		TWA Bukit Serelo (eks PLG KH Isau Isau)	210
TWA Pundi Kayu	50		
8	Balai KSDA Sumatera Barat	CA Maninjau	100
9	Balai Taman Nasional Batang Gadis	TN Batang Gadis	3,881.00
10	Balai Taman Nasional Berbak Sembilang	TN Berbak	10,300.00

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		TN Sembilang	24,400.00
11	Balai Taman Nasional Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	8,750.27
12	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Tahura Orang Kayo Hitam	200
13	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Tahura Bukit Barisan	1,444.72
Regional Jawa			32,200.02
14	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Bojonglarang Jayanti	138.57
		CA Cadas Malang	19.35
		CA Cibanteng	200
		CA Cigenteng Cipanyi	15.49
		CA Dungus Iwul	9.22
		CA Gunung Burangrang	475.7
		CA Gunung Jagat	87.52
		CA Gunung Simpang	200
		CA Gunung Tangkuban Perahu	151.14
		CA Gunung Tilu	1,248.53
		CA Kawah Kamojang	497.52
		CA Leuweung Sancang	200
		CA Malabar	18.87
		CA Nusa Gede Panjalu	3.79
		CA Pananjung Pangandaran	198.84
		CA Pulau Dua	29.33
		CA Rawa Danau	400.41
		CA Sukawayana	22.32
		CA Takokak	32.37
		CA Talaga Bodas	45.94
CA Talaga Patengan	64.32		
CA Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	12.49		
CA Telaga Warna	71.94		
CA Yan Lapa	23.01		
CA Yunghun	0.76		
SM Cikepuh	250.08		
SM Gunung Sawal	734.24		
SM Sindangkerta	30.71		

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		TB Masigit Kareumbi	199.96
		TWA Cimanggu	83.08
		TWA Gunung Guntur	26.98
		TWA Gunung Pancar	100
		TWA Gunung Tampomas	100
		TWA Jember	37.54
		TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu	119.01
		TWA Linggarjati	7.71
		TWA Pananjung Pangandaran	1.16
		TWA Pulau Sangiang	94.72
		TWA Rumpin	52.66
		TWA Sukawayana	7.76
		TWA Talaga Bodas	19.55
		TWA Telaga Patengan	64.05
		TWA Telaga Warna	4.65
15	Balai Besar KSDA Jawa Timur	CA Besowo Gadungan	6.11
		CA Goa Nglirip	0.85
		CA Gunung Picis	0.02
		CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	178.22
		SM Dataran Tinggi Yang	100
16	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Bantarbolang	16.18
		CA Bekutuk	15.26
		CA Cabak I/II	16.21
		CA Curug Bengkawah	2.4
		CA Donoloyo	8.55
		CA Gebugan	1.85
		CA Gunung Butak	34.61
		CA Gunung Celering	131.67
		CA Karang Bolong	0.01
		CA Kecubung Uloanang	40.79
		CA Keling I ABC	8.72
		CA Keling II/III	29.91
		CA Kembang	1.77

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		CA Moga	2.67
		CA Pager Wunung Darupono	16.36
		CA Pantodomas	4.3
		CA Peson Subah I	9.86
		CA Peson Subah II	10.77
		CA Pringombo II	18.9
		CA Sepakung	10.41
		CA Sub Vak 18C/19B	6.77
		CA Telogo Dringo	28.79
		CA Telogo Sumurup	14.42
		CA Tlogo Ranjeng	29.79
		CA Wijaya Kusuma	0.15
		SM Gunung Tunggangan	104.33
		TWA Grojogan Sewu	62.36
		TWA Guci	2.32
		TWA Gunung Selok	44.54
		TWA Sumber Semen	16.82
		TWA Telogo Warno / Telogo Pengilon	28.43
17	Balai Taman Nasional Alas Purwo	TN Alas Purwo	24,740.07
18	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	Tahura R. Soeryo	353.57
Regional Sulawesi			269,523.46
19	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	TN Lore Lindu	217,991.18
		CA Faruhumpenai	1,865.08
		CA Ponda Ponda	72.55
		SM Komara	311.56
20	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	TN Gandang Dewata	3,288.77
		TWA Cani Sirenreng	1,041.04
		TWA Danau Towuti	31.72
		TWA Lejja	1,251.86
		TWA Nanggala III	891.66
21	Balai KSDA Sulawesi Tengah	CA Gunung Dako	552.08
		CA Gunung Sojol	610.8
		CA Gunung Tinombala	824.48

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		CA Morowali	1,156.47
		CA Pamona	300
		CA Tanjung Api	536.87
		SM Bakiriang	88.02
22	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	CA Kakenauwe	465.6
		CA Lamedae	639.82
		CA Napabalano	11.23
		SM Buton Utara	21,081.96
		SM Lambusango	460.59
23	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Duasudara	1,346.85
		CA Gunung Ambang	1,593.22
		CA Gunung Lokon	436.33
		CA Mas Popaya Raja	152.95
		CA Panua	1,715.71
		CA Tangale	100.54
		CA Tanjung Panjang	682.11
		SM Gunung Manembo Nembo	963.31
		SM Karakelang	613.4
		SM Nantu	6,119.14
		TWA Batu Angus	499.48
		TWA Batu Putih	460.95
		TWA Gunung Ambang	1,366.14
Regional Kalimantan			142,139.60
24	Balai Taman Nasional Sebangau	TN Sebangau	38,735.25
25	Balai KSDA Kalimantan Barat	CA Gunung Raya Pasi	94.59
		CA Karimata	883.6
		CA Muara Kendawangan	1,100.00
		CA Nyiut Penrissen	14,798.42
		TWA Baning	204.97
		TWA Bukit Kelam	520.59
26	Balai KSDA Kalimantan Selatan	TWA Tanjung Belimbing	233.52
		SM Kuala Lupak	408.24
		SM Pleihari Tanah Laut	236.94

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	45.55
		TWA Pulau Kembang	80.75
27	Balai KSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)	100
		TWA Bukit Tangkiling	67.78
28	Balai KSDA Kalimantan Timur	CA Teluk Adang	2,038.54
		SM Pulau Semama	64.54
		TWA Pulau Sangalaki	98.84
29	Balai Taman Nasional Kayan Mentarang	TN Kayan Mentarang	30,447.48
30	Balai Taman Nasional Kutai	TN Kutai	8,734.37
31	Balai Taman Nasional Tanjung Putting	TN Tanjung Puting	26,550.61
32	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Tahura Bukit Soeharto	16,695.03
Regional Bali dan Nusa Tenggara			76,628.66
33	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Gunung Mutis	7,350.92
		CA Hutan Bakau Maubesi	2,865.37
		CA Ndeta Kelikima	719.34
		CA Riung	406.99
		CA Wae Wuul	1,499.18
		CA Watu Ata	2,534.64
		CA Wolo Tado	2,692.98
		SM Ale Aisio	3,578.07
		SM Danau Tuadale	817.05
		SM Egon Ile Medo	1,058.06
		SM Harlu	1,640.43
		SM Kateri	3,974.34
		SM Perhatu	332.31
		TB Bena	1,608.41
		TB Pulau Ndana	871.15
		TWA Bipolo	316.7
		TWA Camplong	734.76
		TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	6,558.18
		TWA Manipo	2,388.12
		TWA Pulau Batang	367.42
		TWA Pulau Lapang	253.83

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		TWA Pulau Rusa	931.99
		TWA Ruteng	13,792.63
		TWA Teluk Kupang	8,119.29
		TWA Tujuh Belas Pulau	4,761.12
		TWA Tuti Adagae	3,526.06
34	Balai KSDA Bali	TWA Danau Buyan Danau Tamblingan (RTK.4)	747.45
		TWA Gunung Batur Bukit Payang	1,555.30
		TWA Panelokan	557.54
		TWA Sangeh (RTK.21)	12.4
35	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	KSA/KPA Danuera	56.6
Regional Maluku dan Papua			714,851.61
36	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih	TN Teluk Cenderawasih	150,000.00
37	Balai Taman Nasional Manusela	TN Manusela	11,211.21
38	Balai Besar KSDA Papua	CA Bupul	128.37
		CA Pegunungan Cycloops	5,894.87
		CA Pulau Supiori	138.92
		CA Tanjung Wiay	483.47
		SM Danau Bian	100
		SM Pulau Dolok	100
		SM Pulau Komolon	278.39
		SM Pulau Pombo	17.25
		SM Savan	100
		TWA Nabire	29.97
		TWA Teluk Youtefa	342.59
39	Balai Besar KSDA Papua Barat	CA Pulau Salawati	268.23
		CA Waigeo Timur	941.31
		SM Mubrani Kaironi	153.71
		SM Sidei Wibain	65.45
40	Balai KSDA Maluku	CA Gunung Sibela Pulau Bacan	339.84
		CA Pulau Lifamatola	165.37
		CA Pulau Obi	923.72
		CA Tanjung Sial	300
		KSA/KPA Daab	66.86

No.	UNIT PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	CAPAIAN (Ha)
		KSA/KPA Gunung Sahuwai	86.69
		KSA/KPA Masbait	98.56
		KSA/KPA Sungai Niff	202.82
		KSA/KPA Tafermaar	429
		KSA/KPA Tobalai	206.82
		SM Pulau Baun	300
		SM Pulau Kasa	53.55
		SM Pulau Kobrur	475.29
		TWA Pulau Kasa	48.49
		TWA Pulau Marsegu	1,130.40
41	Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata	TN Aketajawe Lolobata	274.81
42	Balai Taman Nasional Lorentz	TN Lorentz	539,495.64
TOTAL			1,723,896.39

Lampiran 3

HASIL VERIFIKASI LUASAN INDIKATIF INVENTARISASI DAN VERIFIKASI KAWASAN DENGAN NILAI KEHATI TINGGI DI LUAR KSA, KPA, DAN TB TAHUN 2021

No	Unit Kerja	Target 2021 (ha)	Indikatif Luasan Total Area Hasil InVer Kehati (Ha)	Keterangan
Regional Sumatera		2.199.834,00	2.398.545,20	
1	BKSDA NAD	393.933,00	414.469,53	Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Kota Subulussalam, Pidie, Pidie Jaya
2	BBKSDA Sumatera Utara	283.568,00	115.228,49	Asahan, Pakpak Barat, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Utara dan Selatan, Toba samosir
3	BKSDA Sumatera Barat	156.607,00	208.967,25	Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Sijunjung, Tanah Datar, Solok,
4	BBKSDA Riau	711.502,00	756.596,26	Bengkalis, Indragiri Hulu dan Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu dan Hilir, Siak
5	BKSDA Bengkulu-Lampung	156.820,00	63.842,08	Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tanggamus
6	BKSDA Sumatera Selatan	351.922,00	264.105,67	Banyuasin, Musi Banyuasin
7	BKSDA Jambi	145.482,00	575.335,92	Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo
Regional Kalimantan		3.992.343,00	2.783.928,17	
8	BKSDA Kalimantan Selatan	35.141,00	333.556,89	Balangan, Tabalong
9	BKSDA Kalimantan Tengah	1.271.937,00	101.903,82	Kapuas
10	BKSDA Kalimantan Timur	1.749.602,00	2.202.204,40	Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara
11	BKSDA Kalimantan Barat	935.663,00	146.263,06	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Malawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
Regional Sulawesi		1.181.594,00	961.592,20	
12	BBKSDA Sulawesi Selatan	502.112,00	480.851,16	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Timur, Sidenreng rapang, Sinjai, Soppeng, Wajo, Majene, Mamuju, Polewali Mandar
13	BKSDA Sulawesi Tengah	389.247,00	114.113,87	Buol, Donggala Parigi, Moutong
14	BKSDA Sulawesi Tenggara	225.725,00	231.485,16	Konawe Utara
15	BKSDA Sulawesi Utara	64.510,00	135.142,01	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondoow Selatan

No	Unit Kerja	Target 2021 (ha)	Indikatif Luasan Total Area Hasil InVer Kehati (Ha)	Keterangan
Regional Bali dan Nusa Tenggara		189.311,00	245.634,99	
16	BKSDA NTB	3.544,00	3.827,15	Bima
17	BBKSDA NTT	185.767,00	241.807,84	Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Regional Maluku dan Papua		2.474.343,00	2.542.359,06	
18	BKSDA Maluku	197.802,00	191.198,20	Buru, Buru Selatan
19	BBKSDA Papua	1.767.713,00	1.826.488,62	Nabire, Boven Digoel, Merauke, Mappi
20	BBKSDA Papua Barat	508.828,00	524.672,24	Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong, Tambrauw
Jumlah		10.037.425,00	8.932.059,60	

Sumber: Dit BPPE, 2021

Lampiran 4

REKAPITULASI DEvisa PEMANFAATAN TSL TAHUN 2021

NO.	JENIS KOMODITI	SATUAN	REALISASI KUOTA	DEVISA (Rp)	KETERANGAN
			S/D BULAN INI		
I	SATWA				
A	MAMALIA				
1	Mamalia	ekor	0	0	*1) Hasil Penangkaran/ Transplantasi
2	Mamalia *1)	ekor	275	137.500.000	
3	Primata*	ekor	1.240	1.860.000.000	
4	Tanduk Rusa	kg	0	0	*2) Rancing
B	REPTIL				
1	Reptil Hidup (Pet)	ekor	0	0	
2	Reptil Hidup (Konsumsi)	ekor	0	0	
3	Reptil Hidup *1)	ekor	6.225	933.750.000	
4	Kulit Reptil	lembar	0	0	
5	Kulit Buaya (ekspor + re-ekspor)	lembar	0	0	
6	Kulit Buaya porosus*2)	lembar	2.156	13.313.300.000	
7	Kulit Buaya novaeguineae *2)	lembar	0	0	
8	Kulit Buaya novaeguineae	lembar	0	0	
9	Back Croc Bone	buah	0	0	
10	Daging Buaya	kg	2.400	372.000.000	
11	Daging Reptil	kg	0	0	
12	Reptil Kering (dried)	buah	0	0	
13	Empedu Ular	buah		0	
C	AMPHIBI				
1	Amphibi Hidup	ekor	0	0	
2	Amphibi Hidup *1)	ekor	15	7.500.000	
3	Kulit Amphibi	lembar	0	0	
4	Daging	ekor	0	0	
D	BURUNG				
1	Burung N-App	ekor	12.865	6.432.500.000	
2	Burung App *	ekor	4.662	10.011.046.120	
3	Sarang Burung Walet	kg	25.271	391.004.460.000	

NO.	JENIS KOMODITI	SATUAN	REALISASI KUOTA		
			S/D BULAN INI	DEVISA (Rp)	KETERANGAN
E	ARTHROPODA				
1	Kupu-kupu *1)	ekor	17.864	1.679.338.513	
2	Kupu-kupu	ekor	0	0	
3	Lipan	ekor	0	0	
	Arachnida	Ekor	0		
4	Birgus latro	ekor	0	0	
F	AROWANA *1)	ekor	104.770	785.775.000.000	
G	AROWANA IRIAN *2)	ekor	15.120	7.560.000.000	
H	CORAL *1)	buah	692.915	121.260.125.000	
I	CORAL	buah/kg	0	0	
J	IKAN NAPOLEON	ekor	0	0	
K	IKAN NAPOLEON *2)	ekor	0	0	
L	SIRIP IKAN HIU	kg	0	0	
M	Ikan Sapu Zebra*1)	ekor	8.450	633.750.000.000	
N	KUDA LAUT	ekor	0	0	
O	Ikan Clarion Angel	ekor	109	3.720.987.500	
P	Ikan Pari Air Tawar	ekor	0	0	
Q	KIMA *1)	ekor	9.413	470.650.000	
R	Fosil Kima	CBM	0	0	
S	LOLA MERAH	kg	0	0	
	JUMLAH I (SATWA)			1.978.288.157.133	

NO.	JENIS KOMODITI	SATUAN	REALISASI KUOTA	DEVISA (Rp)	KETERANGAN
			S/D BULAN INI		
II	TUMBUHAN				
A	ANGGREK *1)	batang	202.180	23.809.808.998	
B	GAHARU				
1	Gyrinops verteegii/spp		0	0	
2	A. malacensis				
a	Kemedangan	kg	0	0	
b	Abuk	kg	0	0	
3	A. filaria				
a	Kemedangan	kg	0	0	
b	Abuk	kg	0	0	
c	Budidaya	kg	2.021	90.945.000	
d	Gaharu Buaya	kg	0	0	
C	PAKIS	kg	0	0	
D	PENGHAWAR JAMBI	kg	0	0	
E	LIMBAH ANGGREK	kg	0	0	
F	Sonokeling				
1	Dalbergia latifolia	M3	87.932	2.198.297.295.000	
G	Bubinga				
1	Bubinga demeusei	M3	0	0	
2	Bubinga tessmannii	M3	0	0	
H	Pasak Bumi	kg	0	0	
I	Akar Laka	M3	0	0	
	JUMLAH II (TUMBUHAN)			2.222.198.048.998	
	JUMLAH I + II			4.200.486.206.131	

Sumber: Direktorat KKHSG

Lampiran 5

REKAPITULASI NILAI PNBP DARI
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN
TSL TAHUN 2021

NO	SATUAN KERJA	Pemanfaatan Jasling	PNBP TSL (Rp)
1	Sekretariat Ditjen PHKA	0	0
2	Direktorat PIKA	0	0
3	Direktorat BPEE	0	0
4	Direktorat KK	0	0
5	Direktorat KKH	0	21,761,249,424
6	Direktorat PJLHK	10,175,294,498	0
7	BBKSDA Sumatera Utara	6,757,000	1,006,240,000
8	BBKSDA Riau	5,331,500	233,367,500
9	BBKSDA Jawa Barat	6,389,821,000	1,105,275,634
10	BBKSDA Jawa Timur	210,007,500	1,752,646,536
11	BBKSDA Sulawesi Selatan	743,456,500	736,195,637
12	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	9,580,000	3,635,000
13	BBKSDA Papua	230,000	345,847,411
14	BBKSDA Papua Barat	1,515,000	307,447,000
15	BBTN Gunung Leuser	36,270,000	0
16	BBTN Bukit Barisan Selatan	44,669,500	0
17	BBTN Kerinci Seblat	176,625,000	0
18	BBTN GN. Gede Pangrango	3,153,267,000	0
19	BBTN Bromo Tengger Semeru	4,854,346,500	0
20	BBTN Betung Kerihun Sentarum	10,633,000	0
21	BBTN Lore Lindu	70,607,500	0
22	BBTN Teluk Cendrawasih	1,704,000	0
23	BKSDA NAD	3,147,500	11,555,300

NO	SATUAN KERJA	Pemanfaatan Jasling	PNBP TSL (Rp)
24	BKSDA Sumatera Selatan	209,123,000	747,545,120
25	BKSDA Jambi	0	79,058,000
26	BKSDA Bengkulu	171,097,500	198,126,817
27	BKSDA Sumatera Barat	0	37,139,245
28	BKSDA DKI Jakarta	767,732,500	435,677,000
29	BKSDA Jawa Tengah	2,787,152,000	394,950,770
30	BKSDA D.I Yogyakarta	240,000	232,660,000
31	BKSDA Kalimantan Selatan	90,565,000	107,725,000
32	BKSDA Kalimantan Barat	0	504,112,460
33	BKSDA Kalimantan Timur	56,939,500	118,740,400
34	BKSDA Kalimantan Tengah	63,700,000	77,466,870
35	BKSDA Sulawesi Tengah	0	155,514,755
36	BKSDA Sulawesi Tenggara	19,890,000	93,231,480
37	BKSDA Sulawesi Utara	228,270,000	77,209,000
38	BKSDA Maluku	0	158,745,780
39	BKSDA Bali	3,200,000	161,742,592
40	BKSDA Nusa Tenggara Barat	177,235,000	48,161,024
41	BTN Baluran	620,063,000	0
42	BTN Alas Purwo	1,312,210,500	0
43	BTN Meru Betiri	111,282,000	0
44	BTN Ujung Kulon	198,016,000	0
45	BTN Bali Barat	501,992,000	0
46	BTN Gunung Halimun Salak	1,067,869,500	0

NO	SATUAN KERJA	Pemanfaatan Jasling	PNBP TSL (Rp)
47	BTN Siberut	1,190,000	0
48	BTN Berbak Sembilang	300,000	0
49	BTN Bukit Tiga Puluh	10,645,500	0
50	BTN Kepulauan Seribu	37,169,500	0
51	BTN Karimun Jawa	73,023,000	0
52	BTN Way Kambas	6,000,000	0
53	BTN Kutai	198,234,000	0
54	BTN Tanjung Puting	83,822,500	0
55	BTN Bukit Baka Bukit Raya	7,372,500	0
56	BTN Bogani Nani Wartabone	7,220,000	0
57	BTN Bunaken	86,295,000	0
58	BTN Takabone Rate	68,050,000	0
59	BTN Rawa Aopa Watumuhai	4,512,000	0
60	BTN Komodo	4,602,517,500	0
61	BTN Gunung Rinjani	567,406,500	0
62	BTN Gunung Palung	35,920,000	0
63	BTN Kelimutu	313,025,500	0
64	BTN Manusela	160,000	0
65	BTN Wakatobi	89,107,500	0
66	BTN Wasur	620,000	0
67	BTN Lorentz	785,000	0
68	BTN Kayan Mentarang	250,000	0
69	BTN Sebangau	1,107,500	0
70	BTN Kepulauan Togean	12,115,000	0

NO	SATUAN KERJA	Pemanfaatan Jasling	PNBP TSL (Rp)
71	BTN Bantimurung Bulusaraung	1,203,369,500	0
72	BTN Aketajawe Lolobata	2,828,000	0
73	BTN Gunung Ceremai	1,751,337,500	0
74	BTN Gunung Merbabu	538,237,500	0
75	BTN Gunung Merapi	266,232,000	0
76	BTN Batang Gadis	0	0
77	BTN Tesso Nilo	0	0
78	BTN Bukit Dua Belas	430,000	0
79	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi W	25,517,500	0
80	BTN TAMBORA	120,142,500	0
JUMLAH		44,394,783,498.00	30,891,265,755.00

Lampiran 6

REKAPITULASI LUAS PEMBERIAN AKSES KEMITRAAN KONSERVASI TAHUN 2021

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
1	BTN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	KTM Garehong Cianten (Garcin 1)	Purwabakti	1	7	21,84				21,84
		TN Gunung Halimun Salak	KTSH Garehong Cianten (Garcin 2)	Purasari	1	18	11,77				11,77
		TN Gunung Halimun Salak	KT Mandiri Taman Nasional	Tamansari	1	59	79,29				79,29
		TN Gunung Halimun Salak	KT Mandiri 2 Taman Nasional	Tamansari	1	11	79,29				79,29
		TN Gunung Halimun Salak	KT Rindu Alam 2	Gunung Malang	1	15	27,11				27,11
		TN Gunung Halimun Salak	KT Rindu Alam	Desa Tapos 1	1	10	40,36				40,36
		TN Gunung Halimun Salak	KTH Giri Catur	Pasawahan	1	23					-
		TN Gunung Halimun Salak	KTHK Cikaniki Sejahtera	Malasari	1	189				112,45	112,45
2	BTN Komodo	TN Komodo	Duli Ngenco	Komodo	1	200	724,18				724,18
3	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	TN Manupeu Tanah Daru	KTH Nippa Cunambani	Padiratana	1	24	59,28				59,28

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			KTH Tana Lanyur	Mondulambi	1	30	89,69				89,69
			KTH Hammu	Okawacu	1	19	370,92				370,92
			KTH Buhang Pameruk	Tanamodu	1	23	20,89				20,89
		TN Laiwangi Wanggameti	KTH Pre Kaka	Pre Komba	1	20	18,2				18,2
			KMPH Matawai Amahu	Wanggameti	1	16	3,4				3,4
			KTH Danda Duangu	Tandula Jangga	1	11	13,7				13,7
			KMPH (Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan) Kahaungu Eti	Wanggabewa	1	20	378,49				378,49
		4	BBTN Betung kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun	Kemitraan Konservasi Banua Sio	Tanjung Lasa	1	30	125,25		
TN Danau Sentarum	KTHN Pengail Bersatu			Lubuk Pengail	1	30	198,38				198,38
	KTHN Jaya Bersama			Pulau Majang	1	32	652				652

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			KTHN Arwana	Vega	1	50	149,74				149,74
			Pokmas Periau Semangit	Nanga Leboyan	1	28	459,57				459,57
			KTH Madu Periau Pulau Majang	Pulau Majang	1	23	944				944
5	BTN Gunung Merbabu	TN Gunung Merbabu	Desa Senden	Senden	1	16	4,71				4,71
			Desa Kenalan	Kenalan	1	19	48,21				48,21
			Desa Jagonayan	Jagonayan	1	73	32,51				32,51
			Desa Tejosari	Tejosari	1	133	18,98				18,98
			Desa Genikan	Genikan	1	86	23,18				23,18
			Desa Wulung Gunung	Wulung Gunung	1	8	4,81				4,81
			Desa Kopeng	Kopeng	1	83	43,21				43,21
			Desa Tajuk	Tajuk	1	167	65,84				65,84

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			Desa Batur	Batur	1	369	59,29				59,29
			Desa Muneng	Muneng	1	10	5,23				5,23
			Desa Munengwarangan	Munengwarangan	1	18	12,5				12,5
			Desa Jambewangi	Jambewangi	1	129	20,33				20,33
			Desa Gondangsari	Gondangsari	1	39	25,64				25,64
			Desa Kaponan	Kaponan	1	54	26,8				26,8
			Desa Ketundan	Ketundan	1	208	87,44				87,44
			Desa Pogalan	Pogalan	1	274	134,82				134,82
6	BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	KT Belimau Sari	Sukau Datang	1	19	49				49
			KT Tunas Muda	Suka Negeri	1	20	24,8				24,8
			Pokmas Hutan Krio Agung Lestari	Bukit Ulu	1	19	26				26
			Pokmas Wana Bal Asri	Pasenan	1	19	35				35
			Pokmas Wana Simol Lestari	Batu Gane	1	23	35				35
7	BTN Kepulauan Togeang	TN Kepulauan Togeang	KTH Lestari	Tobil	1	20	360,07				360,07
			Pokmas Nangga Jaya	Tanimpo	1	19	76,7				76,7

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			Pokmas Posamaturu	Tumbulawa	1	16	55,39				55,39
			Pokmas Nelayan Tangkap Kerapu Jaya	Siatu	1	10		634,26			634,26
			Pokmas Usaha Sumber Tani	Tanimpopo	1	10	51,7				51,7
			Pokmas Usaha Tani Bonsay Kelapa	Tanimpopo	1	10	56,28				56,28
			Pokmas Samaturu	Bangkagi	1	10	54,79				54,79
			KTH Karya Mandiri	Kalia	1	26	275,09				275,09
			Pokmas Usaha Mandiri	Katupat	1	10		3.708,35			3.708,35
			KTH Aren Lestari	Urulepe	1	15	30,69				30,69
8	BTN Gunung Tambora	TN Tambora	Kelompok Tani Karyasari	Sori Tatanga	1	50	144,35				144,35
9	BBKSDA Sumatera Utara	SM Karang Gading & Langkat Timur Laut	Tanjung Harapan	Paluh Kurau	1	50				91,25	91,25
10	BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	KTHK Makmur Jaya	Pontian Mekar	1	26				50	50
			KTHK Ampera	Pontian Mekar	1	25				150	150
			KTHK Kembang Setaman	Pontian Mekar	1	25				50	50

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			LPKD Moa	Moa	1	17	71,49				71,49
			LPKD Piliimakujawa	Piliimakujawa	1	15	164,69				164,69
			LPKD Tompi Bugis	Tompi Bugis	1	22	65,74				65,74
			LPKD Oo	Oo	1	21	431,11				431,11
			LPKD Watukilo	Watukilo	1	24	58,05				58,05
			LPKD Bakubakulu	Bakubakulu	1	24	46,87				46,87
			LPKD Bobo	Bobo	1	21	263,87				263,87

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
11	BTN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	Koperasi Jasa Lingga Buana Bukit Batu Semar	Bantaragung	1	30				10	10
			Koperasi Jasa Cipeuteuy Agung Lestari	Bantaragung	1	43				10	10
			Indra Mulya Sadar	Indrakila	1	20				10	10
			KTH Sapu Jagat	Setianegara	1	25				10	10
12	BBKSDA Papua	CA Pegunungan Cycloop	Kibinime	Kelurahan Angkasapura	1	10				15	15
13	BBTN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	KTHK Gunung Setan	Aunan Sepakat	1	51				91,5	91,5
			KTHK Aih Terjun	Aunan Sepakat	1	27				44,5	44,5
			KTHK Gelah Musara	Salim Pipit	1	42				106,5	106,5
			KTHK Gelah Sepakat	Titi pasir	1	73				142	142
			KTHK Sepakat Indah	Salim Pipit	1	50				123	123
			KTHK Genting	Simpur Jaya	1	22				64,5	64,5
			KTHK Galakase	Simpur Jaya	1	50				98	98
			KTHK Selayar	Simpur Jaya	1	65				142	142
			KTHK Aih Segiring	Simpur Jaya	1	24				70,5	70,5

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			KTHK Mitra Alam	Kuning Abadi	1	29				57	57
			KTHK Gayo Lestari	Kuning Abadi	1	32				52,5	52,5
			KTHK Langkah Lestari Alam	Kuning Abadi	1	30				69	69
			KTHK Musara Alam	Kuning Abadi	1	29				45	45
			KTHK Muara Alam	Kuning Abadi	1	25				51,5	51,5
			KTHK Lestari Alam	Kuning Abadi	1	40				80	80
			KTHK Penghijauan Kembali	Rambung Teldak	1	43				79	79
			KTHK Gunung Lestari	Rambung Teldak	1	42				127,8	127,8
			KTHK Gunung Gitul	Rambung Teldak	1	35				62,5	62,5
			KTHK Rambung Lestari	Rambung Jaya	1	36				94,3	94,3
			KTHK Lestari Lawe Meruntuh	Tanjung Aman	1	49				120	120
			KTHK Lestari	Tanjung Aman	1	42				78	78
			KTHK Lestari Lawe Deski	Tanjung Aman	1	56				117,5	117,5
14	BBKSDA Riau	TWA Sungai Dumai	KTH Meranti Sejahtera	Mundam	1	17				30	30

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
15	BTN Batang Gadis	TN Batang Gadis	KTH Rubaton Jaya	Hutalombang	1	16	10,57				10,57
			KTH Simangombus Lestari	Ampung Batang	1	18	13,93				13,93
			KTH Aek Talap Lestari	Lumban Dolok	1	30	30,92				30,92
			KTH Parkobun Bandar Batang	Muara Batang Angkola	1	16	28,02				28,02
16	BBKSDA Sulawesi Selatan	TWA Nanggala III	KTH To'jambu Satu	Battang Barat	1	24	182,11				182,11
17	BBKSDA NTT	TB Bena	Kelompok Tahat Toen	Bena	1	15		25,83			25,83
		TWAL Teluk Kupang	Pokmas Kita Sama	Kel. Sulamu	1	21		221,15			221,15
		TWAL Teluk Maumere	Pokmas Koja Bahari	Koja Doi	1	20		20			20
18	BTN Rawa Aopa Watumohai	TN Rawa Aopa Watumohai	Kelompok Nelayan Pelestari Rawa	Laonaha	1	20		250			250
			Pokmas Sumber Pangan	Lantari		1	15	250			

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
19	BBTN Lore Lindu	TN Lore Lindu	Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) Bolapapu	Bolapapu	1	15	72,93				72,93
			LPKD Namu	Namu	1	25	194,91				194,91
			LPKD Salua	Salua	1	20	364,37				364,37
			LPKD Masyarakat Hukum Adat Desa Marena	Marena	1	15	395,34				395,34
			LPKD Mataue	Mataue	1	23	24,14				24,14
			LPKD Sungku	Sungku	1	19	80,42				80,42
			LPKD Gimpu	Gimpu	1	17	203,02				203,02

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			LPKD Bunga	Bunga	1	27	139,4				139,4
			LPKD Kapiroe	Kapiroe	1	26	124,12				124,12
			LPKD Sigimpu	Sigimpu	1	27	68,77				68,77
			LPKD Wanga	Wanga	1	20	263,87				263,87
			LPKD Siliwanga	Siliwanga	1	15	78,4				78,40
			LPKD Watutau	Watutau	1	20	139,2				139,20
20	BTN Wakatobi	TN Wakatobi	Pokmas Padakauang	Samabahari	1	59		2.000,00			2.000,00
			Pokmas Raea Jaya	Ambeua Raya	1	32		2.000,00			2.000,00
21	BTN Gunung Rinjani	TN Gunung Rinjani	KTH Gawah Gantar	Sanjang	1	40	170				170,00
			KTH Inget Temurun	Batu Rakit	1	50	19,47				19,47
22	BTN Karimunjawa	TN Karimunjawa	Kelompok Kerja Kawasan Pengelolaan Desa (KPDN) Nyamuk	Nyamuk	1	26		10.953,98			10.953,98

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
23	BTN Siberut	TN Siberut	KTH Bebegen Sagulebbeg Jaya	Sagulebbeg	1	18	205				205
			KTH Riu - Riu Ake	Sagulebbeg	1	12	205				205,00
24	BTN Kepulauan Seribu	TN Kepulauan Seribu	Pernitas (Perhimpunan nelayan ikan hias dan tanaman hias)	Pulau Panggang	1	9			24,69		24,69
25	BKSDA Sulawesi Tenggara	TWAL Kepulauan Padamarang	Pokmas Perikanan Bahagia	Towua	1	11		1.000,00			1.000,00
		TWA Teluk Lasolo	KTH Padakau	Basule	1	15		500			500
		TWA Teluk Lasolo	KTH Pasamaturuan	Labengki	1	16		500			500
26	BTN Bukit Duabelas	TN Bukit Duabelas	KTH Bukit Sayak	Rantau Panjang	1	16	120,80				120,80
			KTH Cabe Godong	Rantau Panjang	1	26	181,1				181,1
			Wilayah Adat Temenggung Cellitai	Rawa Mekar	1	39	6.475,14				6.475,14
27	BBTN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Gede Pangrango	KTH Civaluh Hilir	Wates Jaya	1	30	31,97				31,97

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
			KTH Ciwaluh Girang	Wates Jaya	1	32	27,5				27,5
			KTH Cipeucang	Pasir Buncir	1	32	30,2				30,2
28	BKSDA Sumatera Selatan	SM Dangku	KTH Jranggang Hijau Lestari	Sidomulyo	1	76				145,61	145,61
		SM Padang Sugihan	KTHK Perigi Jaya	Perigi	1	39				39,26	39,26
		SM Dangku	KTHK Sidomulyo	Dawas	1	51				118,19	118,19
		SM Padang Sugihan	KTHK Siju Jaya Bersama	Siju	1	77				128,37	128,37
29	BTN Lorentz	TN Lorentz	KT Bean	Nakai	1	15	710,33				710,33
			KT Omapaknam	Nakai	1	15	710,36				710,36
30	BBTN Teluk Cenderawasih	TN Teluk Cenderawasih	Pokmas Bumka Yenui	Menarbu	1	31		3.741,00			3.741,00
			Pokmas Mama Ira	Yomakan	1	17		1.158,00			1.158,00
			Pokmas Somus	Yomakan	1	16		1.029,00			1.029,00
			Pokmas Tapapai	Yomakan	1	11		913			913

No	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra	Desa	PKS	Anggota	Zn. Trad (Darat)	Zn Trad. (Perairan)	Zona Pemanfaatan (Perairan)	Zona Rehabilitasi	Total (Ha)
31	BTN Gunung Merapi	TN Gunung Merapi	Desa Balerante	Balerante	1	124	25,24				25,24
			Desa Glagaharjo	Glagaharjo	1	152	32,73				32,73
Total Luasan (Ha)					146	5.728	19.066,81	28.654,57	24,69	2.886,73	50.632,80

Lampiran 7

REKAPITULASI DESA YANG MELAKUKAN KESEPAKATAN KONSERVASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2021

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	
1	BBTN Gunung Leuser	Taman Nasional Gunung Leuser	Agusan	Blangkejeren	Gayo Lues	Aceh	
			Alue Sungai Pinang	Jeumpa	Aceh Barat Daya		
			Bineh Krueng	Tangan-Tangan			
			Blang Dalam	Babah Rot			
			Kuning Abadi	Darul Hasanah	Aceh Tenggara		
			Rambung Teldak	Darul Hasanah			
			Simpur Jaya	Ketambe			
			Singah Mulo	Puteri Betung	Gayo Lues		
			Tanjung Lama	Darul Hasanah	Aceh Tenggara		
			Batu Jong-Jong	Bahorok	Langkat		Sumatera Utara
			Bukit Mas	Besitang			
Sampe Raya	Bahorok						
2	BKSDA Aceh	TWA Jantho dan CA Jhanto	Awek	Kota Jantho	Aceh Besar	Aceh	
			Data Cut	Kota Jantho			
			Suka Tani	Kota Jantho			
		TWA Kepulauan Banyak	Haloban	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil		
		SM Rawa Singkil	Cot Bayu	Trumon Tengah	Aceh Selatan		
			Longkib	Longkib	Kota Subulussalam		
3	BBKSDA Sumatera Utara	TWA Lau Debuk-Debuk	Daulu	Berastagi	Karo	Sumatera Utara	
		CA Martelu Purba	Tiga Runggu	Purba	Simalungun		
		CA/TWA Sibolangit	Sibolangit	Sibolangit	Deli Serdang		
4	BTN Batang Gadis	Taman Nasional Batang Gadis	Pagaran Gala-Gala	Panyabungan Selatan	Mandailing Natal	Sumatera Utara	
			Lumban Dolok	Panyabungan Selatan			
			Huta Lombang	Puncak Sorik Marapi			
			Ampung Padang	Batang Natal			
			Simpang Banyak Jae	Ulu Pungkut			
			Simpang Banyak Julu	Ulu Pungkut			
			Laru Lombang	Tambangan			
5	BBKSDA Riau	Cagar Alam (CA)	Pulau Terap	Kuok	Kampar	Riau	
		Bukit Bungkok	Kerumutan	Kerumutan	Pelalawan		
		Suaka Margasatwa	Rantau Bakung	Rengat Barat	Indragiri Hulu		

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		(SM) Kerumutan	Buluh Cina	Siak Hulu	Kampar	
		Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina	Teluk Meranti	Teluk Meranti	Pelalawan	
		Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai	Mundam	Dumai Timur	Dumai	
			Jaya Mukti	Dumai Timur	Kota Dumai	
		Suaka Margasatwa (SM) Giam Siak Kecil	Muara Dua	Siak Kecil	Bengkalis	
			Buantan Besar	Siak	Siak	
Tuah Indrapura	Bunga Raya		Siak			
6	BKSDA Sumatera Barat	SM Tarusan Arau Hilir	Pancuang Taba	IV Nagari Bayang Utara	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
			Kapujan	Bayang		
		SM Barisan	Anduring	2 x 11 Kayu Tanam	Padang pariaman	
			Guguak	2 x 11 Kayu Tanam		
			Gantung Ciri	Kubung	Solok	
			Koto Sani	X Koto Singkarak		
		TWA Gunung Sago Malintang	Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang	Luak	Lima Puluh Kota	
		TWA Singgalang Tandikat	Pandai Sikek	X Koto	Tanah Datar	
Singgalang	X Koto					
CA Batang Pangean I	Solok Ambah	Sijunjung	Sijunjung			
7	BKSDA Sumatera Selatan	HSA KH Gumai Tebing Tinggi	Muara Karang	Pendopo	Empat Lawang	Sumatera Selatan
			Pagar Jati	Kikim Selatan		
			Pandan Arang	Kikim Selatan	Lahat	
			Pelajaran	Jarai		
			Tanah Pilih	Gumai Talang		
			Muara Payang	Muara Payang		
		SM Padang Sugihan	Bukit Batu	Pangkalan Lampam	Ogan Komering Ilir	
			Rambai	Pangkalan Lampam		
			Sunggutan	Pangkalan Lampam		
		SM Isau-Isau	Geramat	Merapi Selatan	Lahat	
			Lubuk Betung	Merapi Selatan		
			Perangai	Merapi Selatan		
			Gemidar Ilir	Pagar Gunung		
Danau	Pagar Gunung					

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	
			Germidar Ulu	Pagar Gunung			
			Kupang	Pagar Gunung			
			Padang	Pagar Gunung			
			Penantian	Pagar Gunung			
			Sawah Darat	Pagar Gunung			
			Bentayan	Tungkal Ilir	Musi Banyuasin		
8	BTN Siberut	Taman Nasional Siberut	Matotonan	Siberut Selatan	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	
			Saibi Samukop	Siberut Tengah			
			Simalégi	Siberut Barat			
			Simatalu	Siberut barat			
9	BBTN Kerinci Seblat	Taman Nasional Kerinci Seblat	Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya	Sangir	Solok Selatan	Sumatera Barat	
			Persiapan Lubuk Gadang Tenggara	Sangir			
			Wali Nagari Luak Kapau	Pauh Duo			
			Sako Utara Pasia Talang	Sungai Pagu			
			Lubuk Gadang Timur	Sangir			
			Painan Selatan Painan	IV Jurai			
			Painan Timur Painan	IV Jurai	Pesisir Selatan		
			Koto Rawang	IV Jurai			
			Salido Sari Bulan	IV Jurai			
			Kambang Timur	Lengayang			
			Sungai Gambir Sako	Ranah Ampek Hulu Tapan			
			Batu Gane	Selangit			
			Sukaraya Baru	STL Ulu Terawas	Musi Rawas		Sumatera Selatan
			Kuto Tanjung	Ulu Rawas	Rejang Lebong		Bengkulu
			Karang Jaya	Selupu Rejang			
			Sukau Datang	Tubei			
			Pungguk Pedaro	Bingin Kuning			
			Ketenong Jaya	Pinang Belapis			
		Lebong					
10	BBTN Bukit Barisan Selatan	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Suka Marga	Suoh	Lampung Barat	Lampung	
			Bumi Hantatai	Bandar Negeri Suoh			

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
			Teba Liokh	Batu Brak		Bengkulu
			SKB II Ujung Rembun	Lumbok Seminung		
			Gunung Ratu	Bandar Negeri Suoh		
			Penengahan	Karya Penggawa	Pesisir Barat	
			Labuhan Mandi	Way Krui		
			Pemancar	Pesisir Utara		
			Suka Jaya	Nasal	Kaur	
11	BKSDA Bengkulu	TWA Bukit Kaba	Suka Sari	Kebawetan	Kepahiang	Bengkulu
			IV Suko Menanti	Sindang Dataran	Rejang Lebong	
		TWA Danau Dendam Tak Sudah	Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu	
		TWA Seblat	Dusun Pulau	Air Rami	Mukomuko	
		TWA Pantai Panjang Pulau Baai	Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu	
			CAL Bukit Barisan Selatan	Tanjung Jati	Lemong	
		CA Sungai Baheuwo dan CA Teluk Klowe	Tampang Tua	Pematang Sawa	Tanggamus	
			TB Semidang Bukit Kabu	Kota Niur	Semidang Lagan	
12	BTN Bukit Tiga Puluh	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Rantai Langsung	Batang Gangsal	Indragiri Hulu	Riau
			Siambul	Batang Gangsal		
			Usul	Batang Gangsal		
			Talang Lakat	Batang Gangsal		
			Keritang	Kemuning	Indragiri Hilir	
			Selensen	Kemuning		
			Batu Ampar	Kemuning		
13	BTN Tesso Nilo	Taman Nasional Tesso Nilo	Rambahan	Logas Tanah Darat	Kuantan Singingi	Riau
			Pontian Mekar	Lubuk Batu Jaya	Indragiri Hulu	
14	BKSDA Jambi	CA Durian Luncuk II	Jangga Baru	Batin XXIV	Batanghari	Jambi
		CA Gua Ulu tiangko	Tiangko	Sungai Manau	Merangin	
		CA Hutan Bakau Pantai Timur	Sungaidualap	Kuala Betara	Tanjung Jabung Barat	
		KSA Sungai Bengkal	Betung Bedarah Barat	Tebo Ilir	Tebo	
15	BTN Way Kambas	Taman Nasional Way	Margasari	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	Lampung

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		Kambas	Karang Anyar	Labuhan Maringgai		
			Braja Luhur	Braja Selehah		
			Braja Kencana	Braja Selehah		
			Braja Yekti	Braja Selehah		
			Braja Asri	Way Jepara		
			Labuhan Ratu VI	Labuhan Ratu		
			Rajabasa Lama I	Labuhan Ratu		
			Muara Jaya	Sukadana		
			Tambah Dadi	Purbolinggo		
			Taman Endah	Purbolinggo		
			Taman Fajar	Purbolinggo		
			Tanjung Kesuma	Purbolinggo		
			Tegal Ombo	Way Bungur		
			Toto Projo	Way Bungur		
			Tanjung Tirto	Way Bungur		
			Kali Pasir	Way Bungur		
16	BKSDA DKI Jakarta	SM Pulau Rambut dan CA Pulau Bokor	Tanjung Pasir	Teluknaga	Tangerang	Banten
17	BTN Ujung Kulon	Taman Nasional Ujung Kulon	Kertajaya	Sumur	Pandeglang	Banten
			Tamanjaya	Sumur		
			Kertamukti	Sumur		
18	BBKSDA Jawa Barat	CA/TWA Pangandaran	Pangandaran	Pangandaran	Pangandaran	Jawa Barat
		CA Gunung Simpang	Sukabakti	Naringgul	Cianjur	
			Balegede	Naringgul		
		CA Sancang	Sancang	Sancang	Serang	
		CA Rawa Danau	Barugbug	Padarincang		
			Cikedung	Mancak		
		CA Pulau Dua	Sawah Luhur	Kasemen	Kota Serang	
		CA Gunung Tukung Gede	Cikolelet	Cinangka	Serang	
		CA Manggis Gadungan	Wonorejo	Puncu	Kediri	
			Manggis	Puncu		
		CA Gunung Picis	Talun	Ngebel	Ponorogo	

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		TWA Tampomas	Jambu	Conggeang	Sumedang	
			Cikurubuk	Cimalaka		
			Cibitung	Buahdua		
			Bojongloa	Buahdua		
			Sekarwangi	Buahdua		
		TWA Patengan	Patengan	Rancabali	Bandung	
		TWA Kawah Ijen	Kalianyar	Ijen	Bondowoso	
		TWA Gunung Baung	Semut	Purwodadi	Pasuruan	
			Kedemungan	Kejayan		
			Kertosari	Purwosari		
		TB Masigit Kareumbi	Margamekar	Pamulihan	Sumedang	
			Cilembu	Pamulihan		
			Tegalmanggung	Cimanggung		
			Cimarias	Pamulihan		
SM dan CA Pulau Bawean	Suwari	Sangkapura	Gresik			
	Pudakit Barat	Sangkapura				
SM Dataran Tinggi Yang	Baderan	Sumbermalang	Situbondo			
SM Gunung Sawal	Padamulya	Cihaurbeuti	Ciamis			
	Sukawening	Cipaku				
SM Cikepuh	Gunung Batu	Ciracap	Sukabumi			
19	BBTN Gunung Gede Pangrango	Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Sukatani	Pacet	Cianjur	Jawa Barat
			Tegallega	Warungkondang		
			Cimacan	Cipanas		
			Gekbrong	Gekbrong		
			Benda	Cicurug	Sukabumi	
			Ambarjaya	Ciambar		
			Cihanyawar	Nagrak		
			Pasir Datar Indah	Caringin		
			Cisarua	Sukaraja		
			Padaluyu	Warungkondang		

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
			Cipendawa	Pacet	Bogor	
			Ciloto	Cipanas		
			Cileungsi	Ciawi		
			Bojong Murni	Ciawi		
			Basir Buncir	Caringin		
			Watesjaya	Cigombong		
			Citapen	Ciawi		
			Sukagalih	Megamendung		
20	BTN Gunung Halimun Salak	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Pangradin	Jasinga	Bogor	Jawa Barat
			Cikelat	Cisolok	Sukabumi	
			Kabandungan	Kabandungan		
			Ridogalih	Cikakak		
			Sirnarasa	Cikakak		
			Tenjolaya	Cicurug	Lebak	
			Parakansalak	Parakansalak		
			Wanasari	Cibeber		
			Cisungsang	Cibeber		
			Cirompang	Sobang		
21	BKSDA Jawa Tengah	CA Keling II/III	Bumiharjo	Keling	Jepara	Jawa Tengah
		CA Pantodomas	Pecekelan	Sapuran	Wonosobo	
		CA Curug Bengkawah	Sikasur	Belik	Pemalang	
		CA Sepakung	Sepakung	Banyubiru	Semarang	
		CA Donoloyo	Watusomo	Slogohimo	Wonogiri	
		CA Bekutuk	Tanggal	Randublatung	Blora	
		CA Tlogoranjeng	Pandansari	Paguyangan	Brebes	
		TWA Sumber Semen	Gading	Sale	Rembang	
		TWA Guci	Guci	Bumijawa	Tegal	
22	BTN Gunung Merapi	Taman Nasional Gunung Merapi	Ngargomulyo	Dukun	Magelang	Jawa Tengah
			Kepuharjo	Kapanewon Cangkringan	Sleman	
			Tegalmulyo	Kemalang	Klaten	
			Samiran	Selo	Boyolali	

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
			Wonodoyo	Cepogo		
23	BTN Gunung Merbabu	Taman Nasional Gunung Merbabu	Jeruk	Selo	Boyolali	Jawa Tengah
24	BBTN Bromo Tengger Semeru	Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Bambang	Wajak	Malang	Jawa Timur
			Mororejo	Tosari	Pasuruan	
			Blarang	Tutur		
			Ngadirejo	Tutur		
			Wonokitri	Tosari	Lumajang	
			Sumber Mujur	Candipuro		
			Supiturang	Pronojiwo		
			Argosari	Senduro		
25	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Taman Nasional Danau Sentarum	Laut Tawang	Suhaid	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
			Pulau Majang	Badau		
			Datah Dian	Putussibau Utara		
			Melemba	Batang Lupar		
			Sepandan	Batang Lupar		
26	BKSDA Kalimantan Barat	CA Muara Kendawangan	Pembedilan	Kendawangan	Ketapang	Kalimantan Barat
			Betok Jaya	Kepulauan Karimata	Kayong Utara	
			TWA Sungai Liku	Malek	Paloh	
27	BKSDA Kalimantan Selatan	SM Pelaihari	Sabuhur	Jorong	Tanah Laut	Kalimantan Selatan
			Jorong	Jorong		
			Swarangan	Jorong		
			Alur	Jorong		
			Kandangan Lama	Panyipatan		
		CA Gunung Kentawan	Lumpang	Loksado	Hulu Sungai Selatan	
			Hulu Banyu	Loksado		
		CA Selat Laut	Langadai	Kelumpang Hilir	Kotabaru	
			Tarjun	Kelumpang Hilir		
		CA Selat Sebuku	Sajakah	Pulau Laut Timur		
		TWA Pelaihari	Tanjung Dewa	Panyipatan	Tanah Laut	
		TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	Pulau Burung	Simpang Empat	Tanah Bumbu	
			Batulicin	Batulicin		

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
28	BKSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA Sei Barito	Danau Rawah	Mentangai	Kapuas	Kalimantan Tengah
			Tabore	Mentangai		
		KSA/KPA Sungai Kapuas	Sungai Jaya	Dusun Hilir	Barito Selatan	
			Batilap	Dusun Hilir		
		Mahajandau	Dusun Hilir			
29	BTN Sebangau	Taman Nasional Sebangau	Perigi	Mendawai	Katingan	Kalimantan Tengah
			Mendawai	Mendawai		
			Kereng Bangkirai	Sabangau	Kota Palangka Raya	
			Sebangau Permai	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	
30	BTN Tanjung Puting	Taman Nasional Tanjung Puting	Bahaur	Hanau	Seruyan	Kalimantan Tengah
			Palingkau	Danau Sembuluh		
			Telaga Pulang	Danau Sembuluh		
			Parang Batang	Hanau		
			Pembuang Hulu I	Hanau		
31	BTN Kayan Mentarang	Taman Nasional Kayan Mentarang	Liang Lunuk	Krayan Selatan	Nunukan	Kalimantan Utara
			Long Puak	Krayan Barat		
			Lung Fala	Mentarang Hulu	Malinau	
			Long Tebulo	Bahau Hulu		
			Long Uli	Bahau Hulu		
			Long Kemuat	Bahau Hulu		
			Long Berini	Bahau Hulu		
			Long Alango	Bahau Hulu		
32	BTN Kutai	Taman Nasional Kutai	Beno Harapan	Batu Ampar	Kutai Timur	Kalimantan Timur
			Teluk Singkama	Sanggatta Selatan		
			Sangkima	Sanggatta Selatan	Kota Bontang	
			Bontang Baru	Bontang Utara		
33	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	CA Mutis	Fatumnasi	Fatumnasi	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
		SM Ale Aisio	Oekiu	Amanuban Selatan		
		TB Bena	Bena	Amanuban Selatan		
		SM Harlu	Daiama	Landu Leko	Rote Ndao	
34	BKSDA Nusa Tenggara Barat	TWA Suranadi	Suranadi	Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
		TWA Tanjung Tamba	Selong Belanak	Praya Barat	Lombok Tengah	

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		TWA Danau Rawa Taliwang	Meraran	Setelok	Sumbawa Barat	
		TWA Pulau Satonda	Labuhan Kenanga	Tambora	Bima	
		KSA Jereweh	Mataiyang	Jereweh	Sumbawa Barat	
35	BTN Gunung Rinjani	Taman Nasional Gunung Rinjani	Sambik Elen	Bayan	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
			Gumantar	Anyar		
			Bayan	Bayan		
			Aik Bual	Kopang	Lombok Tengah	
			Pesanggrahan	Montong Gading	Lombok Timur	
			Perian	Montong Gading		
			Tetebatu	Sikur		
			Timbanuh	Pringgasele		
Sembalun Bumbung	Sembalun					
36	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Taman Nasional Matalawa	Padiratana	Umbu Ratu Nggay	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
			Okawacu	Katikutana Selatan		
			Maradesa Selatan	Umbu Ratu Nggay		
			Tanamodu	Katikutana Selatan		
			Umamanu	Lewa Tidahu	Sumba Timur	
			Mondulambi	Lewa Tidahu		
			Pindu Wangga Wundut	Lewa		
			Lailunggi	Pinu Pahar		
			Wanggabewa	Pinu Pahar		
			Nangga	Karera		
			Pre Komba	Tabundung		
37	BTN Bantimurung Bulusaraung	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Padaelo	Mallawa	Maros	Sulawesi Selatan
			Uludaya	Mallawa		
			Gattareng Matinggi	Mallawa		
			Batu Putih	Mallawa		
			Tellumpanuae	Mallawa		
			Bantimurung	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	
			Tompobulu	Balocci		
Kabba	Minasa Tene					

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
			Biraeng	Minasa Tene		
38	BKSDA Sulawesi Selatan	TWA Malino	Pattapang	Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan
			Manimbahoi	Parigi		
		TWA Cani Sirenreng	Siame	Palakka	Bone	
			Tadang Palie	Ulaweng		
		TWA Sidrap	Kulo	Kulo	Sidenreng Rappang	
		TWA Danau Towuti	Timampu	Towuti	Luwu Timur	
		TWA Danau Matano	Nikkel	Nuha		
			Sorowako	Nuha		
			Magani	Nuha		
		TWA Nanggala III	Battang	Wara Barat	Kota Palopo	
		TWA Danau Mahalona	Tole	Towuti	Luwu Timur	
		TB Ko'mara	Kale Ko'mara	Polombangkeng Utara	Takalar	
			Beroanging	Bangkala Barat	Jenepono	
		SM Ko'mara	Bissoloro	Bungaya	Gowa	
		CA Faruhumpenai, CA Kalaena, CA Pondaponda	Kasintuwu	Mangkutana	Luwu Timur	
			TN Gandang Dewata	Salutiwo	Bonehau	
Kinatang	Bonehau					
Aralle Timur	Buntu Malangka	Mamasa				
Ulumambi	Bambang					
Sikamase	Bambang					
Osango	Mamasa					
RambuSaratu	Mamasa					
Lambanan	Mamasa					
Taupe	Mamasa					
Bubun Batu	Mamasa					
Mambuliling	Mamasa					
39	BKSDA Sulawesi Tengah	TWA Wera	Balumpewa	Dolo Barat	Sigi	Sulawesi Tengah
			Kalukutunggu	Dolo Barat		
		CA Pangi Binangga	Binangga	Parigi Tengah	Parigi Moutong	
			Toboli Barat	Parigi Utara		

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
			Petapa	Parigi Tengah		
			Matolele	Parigi Tengah		
		CA Pati-pati	Lembah Tompotika	Bualemo	Banggai	
			Toiba	Bualemo		
		CA Pamona	Mayoa	Pamona Selatan	Poso	
			Boe	Pamona Selatan		
			Pandajaya	Pamona Selatan		
		CA Morowali	Uwewajo	Bungku Utara	Morowali Utara	
			Baturube	Bungku Utara		
			Tambayoli	Soyo Jaya		
			Tokala Atas	Bungku Utara		
			Sumara Jaya	Soyo Jaya		
			Tandoyondo	Soyo Jaya		
		CA Gunung Tinombala	Kayu Agung	Mepanga	Parigi Moutong	
			Ogobayas	Mepanga		
			Moubang	Mepanga		
			Tinombala	Ongka Malino		
		CA Tanjung Api	Labuan	Ratolindo	Tojo Una Una	
			Pusungi	Ampana Tete		
			Tete B	Ampana Tete		
CA Gunung Dako	Ogomoli	Galang	Toli-toli			
SM Pinjan Tanjung Matop	Binontoan	Toli-toli Utara				
	Gio	Tolitoli Utara				
SM Lombuyan	Salodik	Luwuk Utara	Banggai			
	Tombang	Pagimana				
SM Tanjung Santigi	Bolano Barat	Bolano	Parigi Moutong			
SM Pulau Pasoso	Pomolulu	Balaesang Tanjung	Donggala			
CA Gunung Sojol	Bou	Sojol				
	Siboang	Sojol				
40	BTN Kep. Togean	Taman Nasional Togean	Loe	Walea Kepulauan	Tojo Una-una	Sulawesi Tengah
41	BKSDA Sulawesi Tenggara	SM Tanjung Peropa	Labutaone	Laonti	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
			Batu Putih	Kolono Timur		
			Tumbu-tumbu Jaya	Kolono Timur		
		SM Buton Utara	Torombia	Kulisusu Utara	Buton Utara	
		SM Lambusango	Winning	Pasarwajo	Buton	
			Mantowu	Pasarwajo		
			Wakangka	Kapontori		
		TWA Teluk Lasolo	Kaumbu	Kaumbu	Wolowa	
			Boedingi	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	
		Waturambaha	Lasolo Kepulauan			
		TWA Laut Kep. Padamarang	Sani-sani	Samaturu	Kolaka	
TWA Tirta Rimba	Kadolo Katapi	Wolio	Kota Bau Bau			
	Kaisabu Baru	Sorawolio	Baubau			
TVAL Teluk Lasolo	Basule	Lasolo	Konawe Utara			
	Boenaga	Lasolo Kepulauan				
42	BTN Rawa Aopa Watumohai	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Lantari	Lantari Jaya	Bombana	Sulawesi Tenggara
			Puuhopa	Puriala	Konawe	
			Lara	Tumbudadio	Kolaka Timur	
			Mokupa	Lambandia		
43	BTN Wakatobi	Taman Nasional Wakatobi	Samabahari	Kaledupa	Wakatobi	
44	BKSDA Sulawesi Utara	CA Gunung Lokon	Wailan	Tomohon Utara	Tomohon	Sulawesi Utara
			Kakaskasen Dua	Tomohon Utara		
			Kayaw	Tomohon Utara		
		CA Gunung Ambang	Singsingon Barat	Passi Timur	Kotamobagu	
		CA Pulau Mas Popaya Raja	Dunu	Monano	Gorontalo Utara	
		CA Tanjung Panjang	Patuhu	Randangan	Pahuwato	
		SM Manembo-nembo	Wawona	Tatapaan	Minahasa Selatan	
SM Nantu - Boliohuta	Didingga	Biau	Gorontalo Utara	Gorontalo		
45	BTN Boganinani Wartabone	Taman Nasional Boganinani Wartabone	Bolangat	Sangtombolang	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
			Batu Merah	Sang Tombolang		
			Ibolian	Dumoga Tengah		
			Matayangan	Dumoga Barat		

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
			Tapa Aog	Lolayan		
			Pinonobatuan Barat	Dumoga Timur		
			Mopuya Utara	Dumoga Utara		
			Siniyung	Dumoga		
			Bumbung	Lolak		
			Totabuan	Lolak		
			Tangagah	Bolaang Uki	Bolaang Mongondow Selatan	
			Sogitia	Bone	Bone Bolango	
			Mongiilo Utara	Bulango Ulu		
			Lonuo	Tilongkabila		
			Lombongo	Suwawa Tengah		
			Tilonggibila	Pinogu		
46	BTN Bunaken	Taman Nasional Bunaken	Bango	Wori	Minahasa Utara	Sulawesi Utara
			Buhias	Wori		
			Nain Satu	Wori		
			Tiwoho	Wori		
			Tinongko	Wori		
47	BTN Aketajawe Lolobata	Taman Nasional Aketajawe Lolobata	Koli	Oba	Tidore Kepulauan	Maluku Utara
			Woda	Oba		
			Wasileo	Maba Utara	Halmahera Timur	
			Geltoli	Maba		
			Lolobata	Wasile Tengah		
			Kobe	Weda Tengah	Halmahera Tengah	
			Sidanga	Weda		
48	BKSDA Maluku	CA Lifamatola	Waisum	Mangoli Utara Timur	Kepulauan Sula	Maluku Utara
		CA Pulau Obi	Buton	Obi	Halmahera Selatan	
		CA Gunung Sibela	Sawadai	Bacan Selatan		
		KSA Masbait	Batu Jungku	Batabual	Buru	
			Seith	Teluk Kaiely		
			Pela	Batabual		
		KSA Sungai Nief	Salas	Bula	Seram Bagian Timur	

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		KSA Tanjung Sial	Iha	Huamual	Seram Bagian Barat	Maluku
		KSA Daab	Reyamru	Kei Besar	Maluku Tenggara	
		KSA Tafermar	Adodo Molu	Molu Maru	Kepulauan Tanimbar	
			Wadankou	Molu Maru		
		TWAL Pulau Marsegu	Piru	Seram Barat	Seram Bagian Barat	
SM Koproor	Irlroy	Aru Tengah	Kepulauan Aru			
49	BBKSDA Papua Barat	TWA Sorong	Klablim	Klaurung	Kota Sorong	Papua Barat
		CA Pegunungan Arfak	Margo Rukun	Oransbari	Manokwari Selatan	
		CA Waigeo Timur	Kalitoko	Teluk Mayalibit	Raja Ampat	
50	BBTN Teluk Cenderawasih	Taman Nasional Teluk Cenderawasih	Yopanggar	Teluk Duairi	Teluk Wondama	Papua Barat
			Yopmeos	Windesi		
51	BBKSDA Papua	TWA Teluk Youtefa	Enggros	Abepura	Kota Jayapura	Papua
		TWA Nabire	Air Mandidi	Teluk Kimi	Nabire	
		TWA Supiori	Waryei	Supiori Barat	Supiori	
		CA Pegunungan Cycloop	Dosay	Sentani Barat	Jayapura	
			Doyo Baru	Waibu		
			Yewena	Depapre	Kota Jayapura	
			Angkasa	Jayapura Utara		
		Waena	Heram			
		CA Supiori	Odori	Supiori Selatan	Supiori	
		CA Bupul	Kweel	Elikobal	Merauke	
Tanas	Elikobal					
52	BTN Lorentz	Taman Nasional Lorentz	Putagaima	Asotipo	Jayawijaya	Papua
			Heberima	Asotipo		
			Hitigima	Asotipo		
			Holima Atas	Walaik		
			Yelai	Walaik		
			Walekama	Walaik		
			Elarek	Walaik		
			Fanamo	Mimika Timur Jauh	Mimika	
			Omawita	Mimika Timur Jauh		
			Nakai	Pulau Tiga	Asmat	

No	UPT	KK	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
53	BTN Wasur	Taman Nasional Wasur	Erambu	Sota	Merauke	Papua
			Tomerau	Naukenjerai		
			Sota	Sota		

Lampiran 8

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
PER-SATKER TAHUN 2021

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
A	BALAI / BALAI BESAR TN				
1	BBTN Gunung Leuser	1	Gunung Leuser	TN	74
2	BBTN Kerinci Seblat	2	Kerinci Seblat	TN	72
3	BBTN Bukit Barisan Selatan	3	Bukit Barisan Selatan	TN	83
4	BBTN Gunung Gede Pangrango	4	Gunung Gede Pangrango	TN	84
5	BBTN Bromo Tengger Semeru	5	Bromo Tengger Semeru	TN	78
6	BBTN Betung Kerihun & D. Sentarum	6	Betung Kerihun	TN	77
		7	Danau Sentarum	TN	82
7	BBTN Lore Lindu	8	Lore Lindu	TN	80
8	BBTN Teluk Cenderawasih	9	Teluk Cenderawasih	TNL	78
9	BTN Batang Gadis	10	Batang Gadis	TN	70
10	BTN Siberut	11	Siberut	TN	76
11	BTN Tesso Nilo	12	Tesso Nilo	TN	71
12	BTN Bukit Dua Belas	13	Bukit Dua Belas	TN	84
13	BTN Bukit Tiga Puluh	14	Bukit Tiga Puluh	TN	74
14	BTN Berbak dan Sembilang	15	Sembilang	TN	75
		16	Berbak	TN	75
15	BTN Way Kambas	17	Way Kambas	TN	68
16	BTN Ujung Kulon	18	Ujung Kulon	TN	82
17	BTN Kepulauan Seribu	19	Kepulauan Seribu	TNL	78
18	BTN Gunung Halimun Salak	20	Gunung Halimun Salak	TN	70
19	BTN Gunung Ciremai	21	Gunung Ciremai	TN	82
20	BTN Gunung Merapi	22	Gunung Merapi	TN	82
21	BTN Gunung Merbabu	23	Gunung Merbabu	TN	81

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
22	BTN Meru Betiri	24 Meru Betiri	TN	84
23	BTN Baluran	25 Baluran	TN	74
24	BTN Karimun Jawa	26 Karimun Jawa	TNL	79
25	BTN Alas Purwo	27 Alas Purwo	TN	81
26	BTN Bali Barat	28 Bali Barat	TN	81
27	BTN Gunung Rinjani	29 Gunung Rinjani	TN	71
28	BTN Komodo	30 Komodo	TN	80
29	BTN Gunung Tambora	31 Gunung Tambora	TN	72
30	BTN Kelimutu	32 Kelimutu	TN	75
31	BTN Kayan Mentarang	33 Kayan Mentarang	TN	72
32	BTN Bukit Baka Bukit Raya	34 Bukit Baka Bukit Raya	TN	79
33	BTN Gunung Palung	35 Gunung Palung	TN	76
34	BTN Sebangau	36 Sebangau	TN	77
35	BTN Kutai	37 Kutai	TN	76
36	BTN Tanjung Puting	38 Tanjung Puting	TN	75
37	BTN Kepulauan Togean	39 Kepulauan Togean	TNL	82
38	BTN Bantimurung-Bulusaraung	40 Bantimurung-Bulusaraung	TN	88
39	BTN Bogani Nani wartabone	41 Bogani Nani Wartabone	TN	77
40	BTN Bunaken	42 Bunaken	TNL	77
41	BTN Aketajawe Lolobata	43 Aketajawe Lolobata	TN	80
42	BTN Matalawa	44 Manupeu Tanah Daru	TN	81
		45 Laiwangi Wanggameti	TN	85
43	BTN Rawa Aopa Watumohai	46 Rawa Aopa Watumohai	TN	76
44	BTN Taka Bonerate	47 Taka Bonerate	TNL	84

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
45	BTN Wakatobi	48 Wakatobi	TNL	83
46	BTN Manusela	49 Manusela	TN	77
47	BTN Lorentz	50 Lorentz	TN	70
48	BTN Wasur	51 Wasur	TN	76
B	BALAI / BALAI BESAR KSDA			
1	BBKSDA Riau			
		1 Bukit Bungkok	CA	70
		2 Pulau Berkeh	CA	70
		3 Gunung Kijang	KSA/KPA	10
		4 Gunung Lengkuas	KSA/KPA	10
		5 Sungai Pulai	KSA/KPA	10
		6 Balai Raja	SM	56
		7 Bukit Batu	SM	72
		8 Bukit Rimbang Bukit Baling	SM	79
		9 Giam Siak Kecil	SM	72
		10 Kerumutan	SM	74
		11 PLG Sebanga	SM	48
		12 Tasik Belat	SM	66
		13 Tasik Besar (Serkap)	SM	52
		14 Tasik Serkap (Tasik Sarang Burung)	SM	52
		15 Tasik Tanjung Padang	SM	76
		16 Pulau Rempang	TB	62
		17 Zamrud	TN	73
		18 Buluh Cina	TWA	70

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		19 Muka Kuning	TWA	71
		20 Sungai Dumai	TWA	72
2	BBKSDA Sumatera Utara			
		1 Batu Gajah	CA	51
		2 Batu Ginurit	CA	43
		3 Lubuk Raya	KSA/KPA	42
		4 Dolok Saut	CA	68
		5 Dolok Sibual-Buali	CA	76
		6 Dolok Sipirok	CA	74
		7 Dolok Tinggi Raja	CA	70
		8 Liang Balik	CA	38
		9 Martelu Purba	CA	76
		10 Sibolangit	CA	75
		11 Sei Ledong	KSA/KPA	37
		12 Barumon	SM	74
		13 Dolok Surungan	SM	70
		14 Karang Gading Langkat Timur Laut	SM	75
		15 Siranggas	SM	70
		16 Pulau Pini	TB	36
		17 Deleng Lancuk	TWA	46
		18 Dolok Tinggi Raja	TWA	57
		19 Holiday Resort	TWA	64
		20 Lau Debuk-debuk	TWA	66
		21 Sibolangit	TWA	75

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		22 Sicike-cike	TWA	72
		23 Sijaba Huta Ginjang	TWA	55
3	BBKSDA Jawa Barat			
		1 Bojong Larang Jayanti	CA	49
		2 Cadas Malang	CA	62
		3 Cibanteng	CA	71
		4 Cigenteng Cipanyi	CA	57
		5 Dungus Iwul	CA	52
		6 Gunung Burangrang	CA	78
		7 Gunung Jagat	CA	60
		8 Gunung Papandayan	CA	61
		9 Gunung Simpang	CA	65
		10 Gunung Tangkuban Perahu	CA	70
		11 Gunung Tilu	CA	69
		12 Gunung Tukung Gede	CA	59
		13 Junghuhn	CA	61
		14 Kawah Kamojang	CA	59
		15 Leuweung Sancang	CA	69
		16 Malabar	CA	0
		17 Nusa Gede Panjalu	CA	71
		18 Pananjung Pangandaran	CA	71
		19 Pulau Dua	CA	59
		20 Rawa Danau	CA	57
		21 Sukawayana	CA	71

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		12 Malino	TWA	49
		13 Nanggala III	TWA	66
		14 Sidrap	TWA	53
		15 Sopeng	KSA/KPA	0
		16 Toraja Utara	KSA/KPA	0
		17 Calon Tahura Mesawa	KSA/KPA	0
7	BBKSDA Papua			
		1 Biak Utara	CA	51
		2 Bupul	CA	55
		3 Enarotali	CA	38
		4 Pegunungan Cycloops	CA	65
		5 Pegunungan Wayland	CA	27
		6 Yapen Tengah	CA	48
		7 Pulau Supiori	CA	55
		8 Tanjung Wiay	CA	63
		9 Mapia	KSA/KPA	30
		10 Danau Bian	SM	60
		11 Memberamo Foja	SM	48
		12 Pegunungan Jayawijaya	SM	20
		13 Pulau Dolok	SM	40
		14 Pulau Komolon	SM	38
		15 Pulau Pombo	SM	40
		16 Savan	SM	40
		17 Nabire	TWA	53

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		22 Takokak	CA	62
		23 Talaga Bodas	CA	70
		24 Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	CA	56
		25 Telaga Patengan	CA	57
		26 Telaga Warna	CA	70
		27 Yanlapa	CA	51
		28 Cikepuh	SM	72
		29 Gunung Sawal	SM	65
		30 Sindangkerta	SM	67
		31 Masigit Kareumbi	TB	67
		32 Cimanggu	TWA	60
		33 Darajat	TWA	61
		34 Gunung Guntur	TWA	59
		35 Gunung Pancar	TWA	70
		36 Gunung Papandayan	TWA	70
		37 Gunung Tampomas	TWA	63
		38 Jember	TWA	71
		39 Kawah Gunung Tangkuban Perahu	TWA	73
		40 Kamojang	TWA	73
		41 Linggarjati	TWA	71
		42 Pananjung Pangandaran	TWA	72
		43 Pulau Sangiang	TWA	67
		44 Sukawayana	TWA	71
		45 Talaga Bodas	TWA	56

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		46 Telaga Patengan	TWA	58
		47 Telaga Warna	TWA	72
4	BBKSDA Jawa Timur			
		1 Manggis Gadungan	CA	67
		2 Besowo Gadungan	CA	63
		3 Ceding	CA	60
		4 Curah Manis Sempolan I-VII	CA	65
		5 Gua Nglirip	CA	72
		6 Gunung Abang	CA	73
		7 Gunung Picis	CA	79
		8 Gunung Sigogor	CA	79
		9 Janggangan Rogojampi I	CA	64
		10 Janggangan Rogojampi II	CA	72
		11 Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	CA	76
		12 Pancur Ijen I	CA	54
		13 Pancur Ijen II	CA	71
		14 Pulau Bawean	CA	67
		15 Pulau Noko	CA	54
		16 Pulau Nusa	CA	70
		17 Pulau Sempu	CA	73
		18 Saobi	CA	77
		19 Sungai Kolbu Iyang Plateau	CA	74
		20 Watangan Puger	CA	73
		21 Dataran Tinggi Yang	SM	82

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		22 Pulau Bawean	SM	71
		23 Pulau Nusa Barung	SM	73
		24 Gunung Baung	TWA	76
		25 Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	TWA	79
		26 Tretes	TWA	71
5	BBKSDA NTT			
		1 Hutan Bakau Maubesi	CA	71
		2 Gunung Mutis	CA	49
		3 Kemang Boleng I	CA	46
		4 Kemang Boleng II	CA	44
		5 Ndeta Kelikima	CA	40
		6 Riung	CA	35
		7 Wae Wuul	CA	57
		8 Watu Ata	CA	46
		9 Wolo Tado	CA	47
		10 Sisimeni Sanam	KSA/KPA	0
		11 Ale Aisio	SM	63
		12 Danau Tuadale	SM	46
		13 Egon Ilmedo	SM	61
		14 Harlu	SM	64
		15 Kateri	SM	63
		16 Perhatu	SM	37
		17 Dataran Bena	TB	46
		18 Pulau Ndana	TB	41

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		19 Baumata	TWA	73
		20 Bipolo	TWA	52
		21 Camplong	TWA	73
		22 Gugus Pulau Teluk Maumere	TWAL	52
		23 Manipo	TWA	71
		24 Pulau Batang	TWA	38
		25 Pulau Lapang	TWA	36
		26 Pulau Rusa	TWA	37
		27 Ruteng	TWA	75
		28 Teluk Kupang	TWA	52
		29 Tujuh Belas Pulau	TWA	63
		30 Tuti Adagae	TWA	52
6	BBKSDA Sulawesi Selatan			
		1 Faruhumpenai	CA	70
		2 Kalaena	CA	70
		3 Ponda-ponda	CA	71
		4 Komara	SM	65
		5 Komara	TB	65
		6 Gandang Dewata	TN	53
		7 Cani Sirenreng	TWA	56
		8 Danau Mahalona	TWA	60
		9 Danau Matano	TWA	59
		10 Danau Towuti	TWA	56
		11 Lejja	TWA	73

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		18 Supiori	TWA	53
		19 Teluk Youtefa	TWA	53
8	BBKSDA Papua Barat			
		1 Waigeo Timur	CA	74
		2 Waigeo Barat	CA	74
		3 Pualu Misool	CA	46
		4 Pegunungan Arfak	CA	56
		5 Pegunungan Fakfak	CA	60
		6 Pegunungan Tamrau Selatan	CA	38
		7 Pegunungan Tamrau Utara	CA	58
		8 Pegunungan Wondiboy	CA	49
		9 Pulau Salawati Utara	CA	44
		10 Teluk Bintuni	CA	51
		11 Pantai Sausafor	CA	56
		12 Pegunungan Kumawa	CA	48
		13 Pulau Batanta Barat	CA	47
		14 Pulau Kofiau	CA	15
		15 Wagura Kote	CA	29
		16 Hutan Pendidikan Tuan Wowi	KSA/KPA	0
		17 Mubrani - Kaironi	SM	48
		18 Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	SM	47
		19 Pulau Venu	SM	43
		20 Sidei Wibain	SM	59
		21 Waigeo	SM	0

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		22 Beriat	TWA	68
		23 Gunung Meja	TWA	69
		24 Klamono	TWA	63
		25 Sorong	TWA	70
9	BKSDA Aceh			
		1 Hutan Pinus Janthoi	CA	87
		2 Serbojadi	CA	74
		3 Rawa Singkil	SM	83
		4 Lingga Isaq	TB	73
		5 Jhantoi	TWA	78
		6 Kepulauan Banyak	TWA	79
		7 Kuta Malaka	TWA	52
		8 Pulau Weh	TWA	82
10	BKSDA Sumatera Barat			
		1 Baringin Sati	CA	44
		2 Batang Palupuh	CA	52
		3 Batang Pangean I	CA	52
		4 Batang Pangean II	CA	52
		5 Lembah Anai	CA	59
		6 Lembah Harau	CA	59
		7 Maninjau	CA	58
		8 Rimbo Panti	CA	49
		9 Arau Hilir dan Air Tarusan	SM	65
		10 Barisan	SM	61

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		11 Malampah Alahan Panjang	SM	58
		12 Pagai Selatan	SM	45
		13 Air Putih Kelok 9	TWA	53
		14 Gunung Marapi	TWA	63
		15 Gunung Sago Malintang	TWA	52
		16 Lembah Harau	TWA	73
		17 Mega Mendung	TWA	49
		18 Rimbo Panti	TWA	59
		19 Saibi Sarabua	TWA	36
		20 Singgalang Tandikat	TWA	53
11	BKSDA Jambi			
		1 Durian Luncuk I	CA	75
		2 Durian Luncuk II	CA	76
		3 Hutan Bakau Pantai Timur	CA	75
		4 Sungai Batara	CA	25
		5 Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	KSA/KPA	39
		6 Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	KSA/KPA	39
12	BKSDA Bengkulu dan Lampung			
		1 Air Alas	CA	58
		2 Air Seblat	CA	48
		3 Bukit Barisan Selatan	CA	43
		4 Danau Dusun Besar	CA	78
		5 Danau Menghijau	CA	53
		6 Kepulauan Krakatau	CA	76

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021	
1	2	3	4	5	
		7	Kioyo I dan II	CA	71
		8	Muko-muko	CA	55
		9	Pagar Gunung I	CA	68
		10	Pagar Gunung II	CA	68
		11	Pagar Gunung III	CA	77
		12	Pagar Gunung IV	CA	77
		13	Pagar Gunung V	CA	77
		14	Pasar Ngalam	CA	77
		15	Pasar Seluma	CA	70
		16	Pasar Talo	CA	70
		17	Sungai Bahewo	CA	64
		18	Taba Pananjung I	CA	75
		19	Taba Pananjung II	CA	75
		20	Talang Ulu I	CA	75
		21	Talang Ulu II	CA	75
		22	Tanjung Laksaha	CA	76
		23	Teluk Klowe	CA	70
		24	Rawa Kandis	KSA/KPA	45
		25	Gunung Nanu'ua	TB	71
		26	Semidang Bukit Kabu	TB	62
		27	Air Hitam	TWA	70
		28	Air Ketebat Danau Tes	TWA	50
		29	Air Rami I/II	TWA	50
		30	Bukit Kaba	TWA	81

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		31 Danau Dendam Tak Sudah	TWA	58
		32 Lubuk Tapi Kayu Ajaran	TWA	53
		33 Muko-muko	TWA	56
		34 Pantai Panjang dan Pulau Baai	TWA	68
		35 Seblat	TWA	62
		36 Way Hawang	TWA	44
13	BKSDA Sumatera Selatan			
		1 Bentayan	SM	70
		2 Dangku	SM	71
		3 Gumai Pasemah	SM	71
		4 Gunung Raya	SM	66
		5 Isau-isau	SM	78
		6 Padang Sugihan	SM	70
		7 Gunung Maras	TN	43
		8 Bukit Selero (eks PLG KH Isau-isau)	TWA	70
		9 Gunung Permisan	TWA	56
		10 Jering Menduyung	TWA	64
		11 Punti Kayu	TWA	76
14	BKSDA Jakarta			
		1 Pulau Bokor	CA	79
		2 Muara Angke	SM	78
		3 Pulau Rambut	SM	86
		4 Angke Kapuk	TWA	86
15	BKSDA Jawa Tengah			

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		1 Bantarbolang	CA	77
		2 Bekutuk	CA	76
		3 Cabak I/II	CA	79
		4 Curug Bengkawah	CA	65
		5 Donoloyo	CA	77
		6 Gebugan	CA	66
		7 Gunung Butak	CA	81
		8 Gunung Celing	CA	85
		9 Sub Vak 18C/19B	CA	77
		10 Karang Bolong	CA	77
		11 Kecubung Ulo Lanang	CA	73
		12 Keling I ABC	CA	79
		13 Keling II/III	CA	75
		14 Kembang	CA	74
		15 Moga	CA	76
		16 Nusakambangan Barat	CA	78
		17 Nusakambangan Timur	CA	75
		18 Pager Wunung Darupono	CA	76
		19 Pantodomas	CA	83
		20 Peson Subah I	CA	67
		21 Peson Subah II	CA	69
		22 Pringombo I	CA	74
		23 Pringombo II	CA	73
		24 Sepakung	CA	73

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		25 Telogo Dringo	CA	74
		26 Telogo Ranjeng	CA	78
		27 Telogo Sumurup	CA	71
		28 Wijaya Kusuma	CA	71
		29 Gunung Tunggangan	SM	72
		30 Grojogan Sewu	TWA	76
		31 Guci	TWA	75
		32 Gunung Selok	TWA	79
		33 Sumber Semen	TWA	75
		34 Telogo Warno / Telogo Pengilon	TWA	76
16	BKSDA Yogyakarta			
		1 Batu Gamping	CA	81
		2 Imogiri	CA	77
		3 Paliyan	SM	73
		4 Sermo	SM	76
		5 Batu Gamping	TWA	81
17	BKSDA Bali			
		1 Batukau	CA	70
		2 Danau Buyan Danau Tamblingan (RTK.4)	TWA	74
		3 Gunung Batur Bukit Payang	TWA	66
		4 Panelokan	TWA	62
		5 Sangeh (RTK.21)	TWA	71
18	BKSDA NTB			
		1 Pulau Sangiang	CA	59

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		2 Pedauh	CA	60
		3 Toffo Kota Lambu	CA	40
		4 Danuera	KSA/KPA	9
		5 Jereweh	KSA/KPA	31
		6 Pulau Panjang	CA	50
		7 Pulau Moyo	TB	58
		8 Bangko Bangko	TWA	56
		9 Danau Rawa Taliwang	TWA	61
		10 Gunung Tunak	TWA	80
		11 Kerandangan	TWA	74
		12 Madapangga	TWA	76
		13 Pelangan	TWA	39
		14 Pulau Moyo	TWA	55
		15 Pulau Satonda	TWA	66
		16 Semongkat	TWA	68
		17 Suranadi	TWA	76
		18 Tanjung Tamba	TWA	46
19	BKSDA Kalimantan Barat			
		1 Gunung Raya Pasi	CA	75
		2 Karimata	CA	56
		3 Lo Pat Foen Pi	CA	52
		4 Mandor	CA	55
		5 Muara Kendawangan	CA	70
		6 Nyiut Penrissen	CA	70

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		7 Asuansang	TWA	54
		8 Baning	TWA	70
		9 Bukit Kelam	TWA	71
		10 Gunung Dungan / Gunung Batu	TWA	51
		11 Gunung Melintang	TWA	56
		12 Sungai Liku	TWA	64
		13 Tanjung Belimbing	TWA	76
20	BKSDA Kalimantan Selatan			
		1 Gunung Kentawan	CA	70
		2 Sungai Bulan dan Sungai Lulan	CA	58
		3 Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	CA	62
		4 Teluk Pamukan	CA	69
		5 Asam-asam	KSA/KPA	18
		6 Tanjung Pengharapan - Sungai Embung	KSA/KPA	20
		7 Kuala Lupak	SM	70
		8 Pleihari Tanah laut	SM	72
		9 Pulau Kaget	SM	71
		10 Pleihari Tanah Laut	TWA	61
		11 Pulau Bakut	TWA	71
		12 Pulau Burung dan Suwangi	TWA	61
		13 Pulau Kembang	TWA	67
21	BKSDA Kalimantan Tengah			
		1 Bukit Sapat Hawung	CA	55

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		2 Bukit Tangkiling	CA	23
		3 Pararawen I dan II	CA	64
		4 Bukit Rawi (Eks PLG II)	KSA/KPA	25
		5 EX PLG IV	KSA/KPA	20
		6 Marang (Eks PLG I)	KSA/KPA	23
		7 Sei Sebangau	KSA/KPA	25
		8 Sungai Barito	KSA/KPA	26
		9 Sungai Kapuas	KSA/KPA	34
		10 Tanjung Malatayur	KSA/KPA	18
		11 Lamandau	SM	72
		12 Bukit Tangkiling	TWA	62
		13 Tanjung Keluang	TWA	67
22	BKSDA Kalimantan Timur			
		1 Muara Kaman Sedulang	CA	67
		2 Padang Luwai	CA	65
		3 Teluk Adang	CA	71
		4 Teluk Apar	CA	62
		5 Pulau Semama	SM	76
		6 Pulau Sangalaki	TWA	77
23	BKSDA Sulawesi Tenggara			
		1 Kakenauwe	CA	75
		2 Lamedae	CA	75
		3 Napabalano	CA	73
		4 Buton Utara	SM	71

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		5 Lambusango	SM	73
		6 Tanjung Amolengo	SM	74
		7 Tanjung Batikolo	SM	71
		8 Tanjung Peropa	SM	73
		9 Kepulauan Padamarang	TWAL	78
		10 Mangolo	TWA	70
		11 Teluk Lasolo	TWAL	78
		12 Tirta Rimba / Air Jatuh	TWA	73
24	BKSDA Sulawesi Tengah			
		1 Gunung Dako	CA	81
		2 Gunung Sojol	CA	83
		3 Gunung Tinombala	CA	71
		4 Morowali	CA	65
		5 Pamona	CA	73
		6 Pangi Binangga	CA	77
		7 Tanjung Api	CA	74
		8 Bakiriang	SM	78
		9 Lombuyan	SM	58
		10 Pati-Pati	CA	63
		11 Pinjan/Tanjung Matop	SM	71
		12 Pulau Dolangan	SM	72
		13 Tanjung Santigi	SM	64
		14 Landusa Tomata	TB	58
		15 Bancea	TWA	72

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		16 Pulau Pasoso	SM	82
		17 Pulau Tokobae	TWA	47
		18 Wera	TWA	71
25	BKSDA Sulawesi Utara			
		1 Gunung Ambang	CA	46
		2 Gunung Dua Sudara	CA	66
		3 Gunung Lokon	CA	55
		4 Mas Popaya Raja	CA	51
		5 Panua	CA	67
		6 Tangale	CA	47
		7 Tanjung Panjang	CA	47
		8 Nantu	SM	63
		9 Gunung Manembo-nembo	SM	56
		10 Karakelang	SM	46
		11 Batu Angus	TWA	60
		12 Batu Putih	TWA	64
		13 Gunung Ambang	TWA	52
26	BKSDA Maluku			
		1 Bekau Huhun	CA	18
		2 Gunung Api Kisar	CA	17
		3 Gunung Sibela Pulau Bacan	CA	60
		4 Lifamatola	CA	35
		5 Pombo	CA	57
		6 Pulau Angwarmase	CA	69

No	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
		7 Pulau Nustaram	CA	53
		8 Pulau Nuswotar	CA	55
		9 Pulau Obi	CA	38
		10 Pulau Seho	CA	49
		11 Taliabu	CA	37
		12 Tanjung Sial	CA	55
		13 Tobalai	KSA/KPA	39
		14 Daab	KSA/KPA	31
		15 Danau Tihu	SM	31
		16 Gunung Sahuwai	KSA/KPA	64
		17 Pulau Larat	KSA/KPA	43
		18 Sungai Niff	KSA/KPA	53
		19 Tafermaar	KSA/KPA	54
		20 Masbait	SM	60
		21 Pulau Baun	SM	37
		22 Pulau Kasa	SM	75
		23 Pulau Kobror	SM	38
		24 Pulau Manuk	SM	45
		25 Tanimbar	SM	70
		26 Gunung Api Banda	TWA	79
		27 Pulau Kasa	TWAL	71
		28 Pulau Marsegu	TWAL	74
		29 Pulau Pombo	TWAL	66
C	UPTD TAHURA			

No	UPTD/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2	3	4	5
1	UPTD Tahura Lae Kombih	1 Lae Kombih	TAHURA	34
2	UPTD Tahura Pocut Meurah Intan	2 Pocut Meurah Intan	TAHURA	56
3	UPTD Tahura Simeulue	3 Simeulue	TAHURA	28
4	UPTD Tahura Tuanku Tambusai	4 Tuanku Tambusai	TAHURA	23
5	UPTD Tahura Bukit Barisan	5 Bukit Barisan	TAHURA	60
6	UPTD Tahura Sultan Syarif Hasyim	6 Sultan Syarif Hasyim	TAHURA	52
7	UPTD Tahura Dr. Muhammad Hatta	7 Dr. Muhammad Hatta	TAHURA	58
8	UPTD Tahura Bukit Sari	8 Bukit Sari	TAHURA	67
9	UPTD Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	9 Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	TAHURA	66
10	UPTD Tahura Sultan Thaha Syaifuddin	10 Sultan Thaha Syaifuddin	TAHURA	65
11	UPTD Tahura Bukit Rabang-Gluguran	11 Bukit Rabang - Gluguran	TAHURA	20
12	UPTD Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	12 Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	TAHURA	32
13	UPTD Tahura Wan Abdul Rahman	13 Wan Abdul Rahman	TAHURA	70
14	UPTD Tahura Gunung Lalang	14 Gunung Lalang	TAHURA	12
15	UPTD Tahura Gunung Mangkol	15 Gunung Mangkol	TAHURA	63
16	UPTD Tahura Gunung Menumbing	16 Gunung Menumbing	TAHURA	45
17	UPTD Tahura Banten	17 Banten	TAHURA	69
18	UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	18 Gunung Palasari - Gunung Kunci	TAHURA	63
19	UPTD Tahura Ir. H. Juanda	19 Ir. H. Juanda	TAHURA	74
20	UPTD Tahura Pancoran Mas	20 Pancoran Mas	TAHURA	69
21	UPTD Tahura KGPAА Mangkunegoro I (Ngargoyoso)	21 KGPAА Mangkunegoro I	TAHURA	70
22	UPTD Tahura Gunung Bunder	22 Gunung Bunder	TAHURA	70
23	UPTD Tahura R. Soeryo	23 R. Soeryo	TAHURA	82

No	UPT/UPTD		NAMA KAWASAN	FUNGSI	BASE LINE 2021
1	2		3	4	5
24	UPTD Tahura Ngurah Rai	24	Ngurah Rai	TAHURA	74
25	UPTD Tahura Nuraksa	25	Nuraksa	TAHURA	65
26	UPTD Tahura Prof. Ir. Herman Johannes	26	Prof. Ir. Herman Johannes	TAHURA	45
27	UPTD Tahura Sultan Adam	27	Sultan Adam	TAHURA	69
28	UPTD Tahura Lapak Jaru	28	Lapak Jaru	TAHURA	70
29	UPTD Tahura Bukit Soeharto	29	Bukit Soeharto	TAHURA	75
30	UPTD Tahura Lati Petangis	30	Lati Petangis	TAHURA	70
31	UPTD Tahura Murhum	31	Murhum	TAHURA	67
32	UPTD Tahura Abdul Latief/Sinjai	32	Abdul Latief/Sinjai	TAHURA	73
33	UPTD Tahura Bontobahari	33	Bontobahari	TAHURA	52
34	UPTD Tahura Sulteng	34	Sulteng	TAHURA	71
35	UPTD Tahura Gunung Tumpa (Haveworang)	35	Gunung Tumpa (Haveworang)	TAHURA	76
36	UPTD Tahura Sebatung	36	Sebatung	TAHURA	0
37	Dishutbun Kalbar	37	Pandan Puloh	TAHURA	0
38	Pemda Kab. Malino	38	Malino	TAHURA	0
Jumlah Total Nilai					34.474
Rata-rata 560 unit KK					61,56

Lampiran 9

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER-SATKER TAHUN 2021

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Balai Taman Nasional Tambora	10.196.595.000	10.036.288.696	98,43
2	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta Raya	15.424.764.000	15.145.022.175	98,19
3	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	39.092.899.000	37.190.951.793	95,13
4	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah	21.020.597.000	20.116.826.303	95,70
5	Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur	28.617.354.000	26.698.559.571	93,29
6	Balai Taman Nasional Baluran	13.272.359.000	13.038.842.524	98,24
7	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nangroe Aceh Darussalam	33.418.687.000	26.137.761.881	78,21
8	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara	31.469.571.000	30.517.505.757	96,97
9	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat	19.037.359.000	17.852.715.922	93,78
10	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	32.951.403.000	32.600.797.194	98,94
11	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi	20.502.283.000	19.496.451.821	95,09
12	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan	32.587.890.000	31.102.620.932	95,44
13	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat	19.719.844.000	18.477.618.063	93,70
14	Balai Taman Nasional Tanjung Puting	12.981.235.000	12.846.516.017	98,96
15	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan	16.723.285.000	16.552.454.988	98,98
16	Balai Taman Nasional Kutai	16.640.305.000	15.746.114.188	94,63
17	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara	13.720.727.000	13.384.950.472	97,55
18	Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tengah	15.496.493.000	15.299.998.188	98,73
19	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan	33.225.850.000	30.280.674.867	91,14
20	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara	15.945.249.000	15.901.695.872	99,73
21	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku	56.940.872.000	45.480.173.630	79,87
22	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali	15.209.655.000	15.035.822.860	98,86
23	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat	15.309.842.000	14.885.168.522	97,23
24	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu	26.830.828.000	26.637.025.561	99,28
25	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	21.055.376.000	20.934.527.122	99,43
26	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	36.180.500.000	30.220.452.161	83,53
27	Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	24.336.431.000	23.408.219.821	96,19
28	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	30.796.525.000	27.696.609.519	89,93
29	Balai Taman Nasional Komodo	23.494.248.000	23.161.810.853	98,59
30	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua	28.172.995.000	27.653.264.114	98,16
31	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat	20.657.214.000	20.303.255.819	98,29

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
32	Balai Taman Nasional Kayan Mentarang	9.853.253.000	9.821.273.669	99,68
33	Balai Taman Nasional Ujung Kulon	90.269.384.000	32.484.694.572	35,99
34	Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	17.036.312.000	16.417.993.365	96,37
35	Balai Taman Nasional Bali Barat	16.633.368.000	15.972.786.020	96,03
36	Balai Taman Nasional Sebangau	13.776.151.000	13.623.012.701	98,89
37	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Ksdae	134.407.342.000	122.384.586.087	91,05
38	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah	16.220.900.000	15.422.906.002	95,08
39	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur	22.913.415.000	22.399.495.839	97,76
40	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	38.207.716.000	36.934.507.734	96,67
41	Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	19.789.254.000	19.421.795.171	98,14
42	Balai Taman Nasional Batang Gadis	14.323.761.000	12.682.287.175	88,54
43	Balai Taman Nasional Tesso Nilo	12.443.083.000	12.343.201.456	99,20
44	Balai Taman Nasional Bukit 12	11.714.870.000	11.565.501.104	98,72
45	Balai Taman Nasional Gunung Ceremai	13.276.757.000	12.991.319.762	97,85
46	Balai Taman Nasional Gunung Merapi	13.504.491.000	13.064.287.195	96,74
47	Balai Taman Nasional Gunung Merbabu	12.437.571.000	12.375.042.283	99,50
48	Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Dan Laiwangi Wanggameti	12.996.698.000	12.965.033.902	99,76
49	Balai Taman Nasional Kepulauan Togean	8.770.572.000	8.683.316.429	99,01
50	Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung	14.659.093.000	14.562.147.776	99,34
51	Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata	10.299.366.000	10.246.132.718	99,48
52	Balai Taman Nasional Lorentz	11.476.455.000	11.165.787.257	97,29
53	Balai Taman Nasional Meru Betiri	13.311.233.000	13.201.911.674	99,18
54	Balai Taman Nasional Way Kambas	29.526.126.000	28.473.097.075	96,43
55	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	24.491.579.000	23.890.325.387	97,55
56	Balai Taman Nasional Alas Purwo	13.518.555.000	13.120.441.398	97,06
57	Balai Taman Nasional Bunaken	9.818.762.000	9.742.538.517	99,22
58	Balai Taman Nasional Kep. Seribu	11.089.899.000	11.022.837.721	99,40
59	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih	24.235.117.000	23.744.158.489	97,97
60	Balai Taman Nasional Gunung Halimun	16.995.982.000	16.965.897.663	99,82
61	Balai Taman Nasional Karimun Jawa	13.850.631.000	13.663.257.085	98,65
62	Balai Taman Nasional Wasur	13.140.816.000	12.569.374.502	95,65

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
63	Balai Taman Nasional Siberut	12.589.688.000	12.484.131.989	99,16
64	Balai Taman Nasional Berbak Dan Sembilang	18.171.996.000	16.420.745.385	90,36
65	Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Dan Danau Sentarum	34.305.742.000	33.921.021.407	98,88
66	Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	43.225.299.000	41.189.407.868	95,29
67	Balai Taman Nasional Kelimutu	9.791.180.000	9.762.629.202	99,71
68	Balai Taman Nasional Wakatobi	13.112.426.000	13.111.958.183	100
69	Balai Taman Nasional Gunung Palung	12.157.415.000	12.002.532.303	98,73
70	Balai Taman Nasional Taka Bonerate	11.269.055.000	11.230.788.023	99,66
71	Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	12.839.674.000	12.450.013.357	96,97
72	Balai Taman Nasional Manusella	10.494.962.000	10.074.554.196	95,99
73	Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	10.346.348.000	10.234.918.608	98,92
74	Balai Taman Nasional Gunung Rinjani	16.480.546.000	16.089.346.473	97,63
75	Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I Yogyakarta	13.324.091.000	12.660.521.622	95,02
TOTAL		1.644.126.169.000	1.509.394.213.550	91,81